



- Ringo Rahata
- Arin Kusumaningrum
- Samsudar Makfi

MENGACU:

Permendikbud RI Nomor 8 Tahun 2016
tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan
dan

Permendikbud RI Nomor 37 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti
dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN SEJARAH INDONESIA

Mata Pelajaran Wajib

SMA/MA
Kelas

XII

PT Penerbit Intan Pariwara

Daftar Isi

Halaman Judul	1
Daftar Isi	2
BAB I Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa	3
A. Berbagai Ancaman Disintegrasi Bangsa pada 1945–1965, 3	
B. Upaya Mempertahankan Integrasi Bangsa, 5	
BAB II Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan hingga Masa Demokrasi Liberal	11
A. Kehidupan Politik pada Awal Kemerdekaan hingga Masa Demokrasi Liberal, 11	
B. Kehidupan Ekonomi pada Awal Kemerdekaan hingga Masa Demokrasi Liberal, 13	
Penilaian Tengah Semester 1	20
BAB III Dinamika Politik–Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965)	26
A. Dinamika Politik pada Masa Demokrasi Terpimpin, 26	
B. Dinamika Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin, 28	
BAB IV Indonesia pada Masa Orde Baru	35
A. Masa Transisi 1966–1967, 35	
B. Stabilitas Politik dan Rehabilitasi Ekonomi, 37	
C. Integrasi Timor Timur, 39	
D. Dampak Kebijakan Masa Orde Baru, 41	
Penilaian Akhir Semester 1	46
Remedial Semester 1	21
BAB V Indonesia pada Masa Reformasi,	65
A. Masa Akhir Orde Baru, 65	
B. Pemerintahan pada Masa Reformasi, 67	
BAB VI Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia,	73
A. Landasan Politik Luar Negeri Bebas Aktif, 73	
B. Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Pelaksanaannya, 75	
Penilaian Tengah Semester 2	82
BAB VII Perkembangan Iptek di Indonesia,	88
A. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 88	
B. Dampak Perkembangan Iptek di Indonesia, 80	
Penilaian Akhir Semester 2	96
Remedial Semester 2	101
Latihan Ujian Sekolah Berstandar Nasional	113

BAB I

Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa

A. Berbagai Ancaman Disintegrasi Bangsa pada 1945–1965

Uji Kompetensi 1

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: b**

Pada masa pergerakan nasional PKI merupakan salah satu partai beraliran radikal yang menentang pemerintah kolonial Belanda. Dalam perkembangannya, PKI mulai mengurangi pergerakannya terutama pada masa pendudukan Jepang. Pergerakan PKI kembali tampak setelah Indonesia merdeka. Aktivitas PKI dimulai dengan adanya Maklumat Pemerintah pada 3 November 1945 yang ditandatangani oleh Moh. Hatta. Berdasarkan maklumat tersebut, pemerintah Indonesia memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan partai politik.

2. **Jawaban: c**

Negara Islam Indonesia (NII) diproklamasikan pada 7 Agustus 1949 di Desa Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. NII berbentuk republik dengan Kartosuwiryo sebagai kepala negaranya. Pengaruh DI/TII berhasil menyebar ke berbagai wilayah, seperti Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh angka 3), 4), dan 5).

3. **Jawaban: c**

Pada masa Demokrasi Terpimpin PKI memiliki kedudukan yang kuat dalam struktur politik dan pemerintahan di Indonesia. Pada masa itu PKI menjadi pesaing utama Angkatan Darat dalam percaturan politik Indonesia. Persaingan antara PKI dan Angkatan Darat juga berkaitan dengan rencana pembentukan Angkatan Kelima.

Rencana yang diajukan PKI tersebut ditolak oleh Angkatan Darat. Angkatan Darat juga menentang keras penyusupan kelompok komunis dalam angkatan bersenjata.

4. **Jawaban: a**

Pada 1 Oktober 1965 Mayor Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) mengambil alih pimpinan Angkatan Darat untuk menumpas pemberontakan G 30 S/PKI. Tindakan yang dilakukan Mayjen Soeharto dalam operasi penumpasan tersebut antara lain menetralisasi pasukan-pasukan yang berada di sekitar lapangan Merdeka, merebut gedung RRI dan kantor pusat Telkom yang telah dikuasai PKI, serta membersihkan pangkalan udara Halim Perdanakusuma dari pasukan-pasukan G 30 S/PKI. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh pilihan a.

5. **Jawaban: c**

Pada 23 Januari 1950 sekira delapan ratus pasukan APRA bersenjata berat memasuki Kota Bandung. Pasukan APRA juga memasuki wilayah Jakarta pada 26 Januari 1950. Di Jakarta pasukan APRA berencana menyerang gedung tempat diselenggarakannya sidang Kabinet RIS. Mereka berupaya menculik semua menteri dan membunuh Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX; Sekjen Kementerian Pertahanan Keamanan Mr. Ali Budiardjo; dan Kepala Staf Angkatan Perang, Kolonel T.B. Simatupang. Akan tetapi, usaha pasukan APRA tersebut berhasil digagalkan pasukan APRIS.

6. **Jawaban: d**

Pada 8 Agustus 1950 pihak KNIL yang mendukung pemberontakan Andi Aziz meminta untuk berunding. Perundingan dilakukan oleh Kolonel A.E. Kawilarang dari pihak APRIS dan Mayor Jenderal Scheffelaar dari pihak KNIL. Hasilnya, kedua belah pihak setuju menghentikan tembakan-menembak. Selain itu, dalam waktu dua hari pasukan KNIL harus meninggalkan Makassar.

7. **Jawaban: c**

Untuk menumpas pemberontakan RMS, pemerintah RIS menggunakan dua cara, yaitu cara damai dan cara militer. Cara damai ditempuh melalui perundingan dengan mengirim tokoh asli Maluku, yaitu J. Leimena, Putuhena, Pelaupessy, dan Rehattu ke Ambon untuk melakukan kompromi dengan Soumokil dan pengikutnya. Akan tetapi, misi ini ditolak oleh Soumokil yang tetap pada pendiriannya untuk memisahkan diri, baik dari NIT maupun RIS. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh kombinasi **A2), A3), dan B2)**.

8. **Jawaban: c**

Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dideklarasikan pada 15 Februari 1958 oleh Letkol Ahmad Husain di Padang, Sumatra Barat. PRRI dibentuk sebagai ungkapan protes terhadap pemerintahan pusat. Gerakan ini bermaksud mengingatkan bahwa pemerintah pusat mempunyai daerah-daerah yang harus diperhatikan dan dikembangkan demi kemajuan negara.

9. **Jawaban: c**

Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) ditandai dengan pembentukan dewan-dewan daerah. Beberapa dewan daerah yang terbentuk yaitu Dewan Banteng di Sumatra Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husain, Dewan Gajah di Sumatra Utara yang dipimpin oleh Letkol M. Simbolon, Dewan Garuda di Sumatra Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian, serta Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual. Jadi, pasangan yang tepat ditunjukkan oleh kombinasi **X2) dan Y2)**.

10. **Jawaban: b**

Pada 1961 Presiden Soekarno melalui Keppres Nomor 322/1961 memberi amnesti dan abolisi bagi orang-orang yang terlibat PRRI dan Permesta. Berdasarkan keputusan tersebut pemerintah pusat menghentikan pengusutan

perkara kepada tokoh Permesta. Tokoh Permesta tersebut antara lain Kolonel D.J. Somba, Mayor Jenderal A.E. Kawilarang, Kolonel Dolf Runturambi, Kolonel Petit Muharto Kartodirdjo, dan Kolonel Ventje Sumual.

B. Uraian

1. **Jawaban:**

Berdasarkan hasil Perundingan Renville, pemerintah Indonesia harus menarik pasukannya dari kantong gerilya yang berada dalam jangkauan garis demarkasi van Mook. Sekarmadji Marjjan Kartosuwiryo berpendapat berpindahnya pasukan Divisi Siliwangi dari Jawa Barat sama artinya wilayah itu telah diserahkan kepada Belanda. Oleh karena itu, saat para pemimpin pemerintah dan TNI pindah ke wilayah Republik Indonesia, Kartosuwiryo memilih tetap tinggal di pedalaman Jawa Barat bersama para pengikutnya. Kartosuwiryo kemudian membentuk gerakan Darul Islam (DI) dan Tentara Islam Indonesia (TII) untuk mewujudkan Negara Islam Indonesia (NII).

2. **Jawaban:**

Pada 30 September 1965 terjadi sebuah pergolakan di Indonesia yang dikenal dengan Gerakan 30 September (G 30 S/PKI). Pemberontakan tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan PKI untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Untuk mengatasi pemberontakan tersebut, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) melakukan operasi penumpasan pada 1 Oktober 1965. Dalam operasi tersebut pasukan Angkatan Darat berhasil mengambil alih kantor pusat Telkom, RRI, dan pangkalan udara Halim Perdanakusuma yang dikuasai pasukan G 30 S/PKI. Cepatnya operasi penumpasan tersebut mencerminkan kesaktian Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa yang tidak tergantikan. Oleh karena itu, berdasarkan Keppres Nomor 153 Tahun 1967 pemerintah menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai hari Kesaktian Pancasila.

3. **Jawaban:**

Pemberontakan RMS mendapat dukungan penuh dari Belanda. Kondisi ini terlihat dari keberpihakan pasukan *Koninklijke Nederlands Indische Leger* (KNIL) terhadap pemimpin pergerakan RMS. Selain itu, pada 27 April 1950 Belanda mengizinkan RMS untuk membuka perwakilan

pemerintahannya di Den Haag. Adapun pejabat RMS yang berkedudukan di Belanda adalah Dr. J.P. Nikijuluw. Ia ditunjuk sebagai Wakil Presiden RMS untuk daerah luar negeri.

4. **Jawaban:**

Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) didasari atas kepercayaan masyarakat akan datangnya seorang Ratu Adil. Kepercayaan masyarakat terkait Ratu Adil terdapat pada ramalan Jayabaya. Ratu Adil merupakan pemimpin yang dapat dianggap menghadirkan suasana aman, tenteram, serta memerintah dengan adil dan bijaksana. Berbekal kepercayaan masyarakat tersebut, APRA berupaya memengaruhi rakyat yang telah lama menginginkan kemakmuran dan kesejahteraan.

5. **Jawaban:**

Pemberontakan PRRI dan Permesta dilatarbelakangi adanya kecemburuan pemerintah di daerah terhadap pemerintah pusat. Untuk mengantisipasi munculnya pemberontakan serupa pada masa kini, pemerintah harus senantiasa mendengarkan aspirasi pemerintah daerah dalam setiap pengambilan keputusan. Pemerintah juga harus pemeratakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, baik pembangunan infrastruktur, ekonomi, maupun pendidikan.

B. Upaya Mempertahankan Integrasi Bangsa

Uji Kompetensi 2

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: e**

Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 tidak lantas menjamin kondisi Indonesia stabil. Indonesia masih harus menghadapi berbagai ancaman disintegrasi bangsa. Tidak hanya dari luar, ancaman disintegrasi juga datang dari dalam negeri. Ancaman disintegrasi dari dalam negeri ini berupa konflik dan pergolakan yang terjadi di sejumlah daerah pada periode 1945–1965. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh pilihan **e**.

2. **Jawaban: a**

Gambar pada soal merupakan tokoh integrasi asal Papua yang bernama Frans Kaisiepo. Pada Juli 1946 Frans Kaisiepo menggagas berdirinya Partai Indonesia Merdeka (PIM) di Biak. Dalam partai tersebut, Frans Kaisiepo menentang integrasi Papua ke dalam NIT. Pada 1961 Frans Kaisiepo membentuk Partai Irian Sebagian Indonesia (ISI) yang menuntut integrasi *Nederlands Nieuwe Guinea* ke dalam wilayah Republik Indonesia. Tuntutan tersebut ditunjukkan dengan membantu perjuangan pembebasan Irian Barat. Dengan demikian, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh pilihan **a**.

3. **Jawaban: b**

Silas Papare pernah menjadi pegawai pemerintah Belanda. Akan tetapi, setelah Indonesia merdeka Silas Papare mengadakan perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Pada Desember 1945 Silas Papare ditangkap dan dipenjara di Jayapura karena dianggap memengaruhi Batalion Papua untuk melancarkan pemberontakan terhadap Belanda. Setelah bebas dari penjara, Silas Papare membentuk Partai Kemerdekaan Irian Indonesia (PKII).

4. **Jawaban: c**

Pada masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia Sultan Hamengku Buwono IX pernah menolak tawaran Belanda untuk menjadi raja seluruh Jawa pasca-Agresi Militer II. Belanda berusaha memengaruhinya agar mendukung upaya Belanda menghancurkan Indonesia. Akan tetapi, dengan semangat nasionalisme, Sri Sultan Hamengku Buwono IX tetap berdiri di belakang Republik Indonesia dan menolak disintegrasi Yogyakarta dari Indonesia.

5. **Jawaban: a**

Opu Daeng Risaju merupakan perempuan pejuang integrasi bangsa yang berasal dari kalangan bangsawan Kerajaan Luwu. Perjuangan Opu Daeng Risaju dimulai ketika bergabung dengan

Partai Serikat Islam Indonesia (PSII) dan terpilih menjadi ketua PSII Palopo pada 1930. Pada 1946 Opu Daeng Risaju beserta Pemuda Republik melakukan serangan terhadap tentara NICA. Beberapa bulan kemudian Opu Daeng Risaju ditangkap di Latonro dan dipaksa berjalan kaki sejauh 40 km menuju Watampone. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh angka **1)** dan **2)**.

6. **Jawaban: c**

Lagu pada soal merupakan karya Ismail Marzuki, seorang tokoh dari Betawi yang berjuang di bidang budaya melalui musik. Banyak lagu yang bernuansa perjuangan yang ia ciptakan. Lagu-lagu Ismail Marzuki mampu menggugah semangat juang dan jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Kondisi ini menunjukkan perjuangan integrasi dapat dilakukan melalui penciptaan lagu-lagu perjuangan.

7. **Jawaban: e**

Sultan Syarif Kasim II merupakan seorang raja lokal yang mendukung kedaulatan Indonesia. Dukungan Sultan Syarif Kasim II ditunjukkan dengan cara menyerahkan sebagian harta untuk membantu perjuangan pemerintah Indonesia. Selain itu, Sultan Syarif Kasim II membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak, Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan Barisan Pemuda Republik. Ia juga mengibarkan bendera Merah Putih di istana Kesultanan Siak, Riau sebagai dukungan terhadap pemerintah Indonesia.

8. **Jawaban: b**

Untuk menumpas pemberontakan PRRI, pemerintah melakukan operasi militer yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Yani. Operasi pertama kali dilakukan pada 14 Maret 1958 dan ditujukan ke Pekanbaru untuk mengamankan sumber-sumber minyak. Pada 17 Maret 1958 TNI dapat merebut Kota Medan. Keberhasilan operasi penumpasan pemberontakan PRRI ditandai dengan direbutnya kembali Kota Padang dan Bukittinggi dari tangan pemberontak PRRI pada 5 Mei 1958.

9. **Jawaban: b**

M.T. Haryono memiliki sejumlah peranan penting selama perang kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya ia ditempatkan sebagai staf di Kantor Penghubung. Selanjutnya, ia dipercaya

sebagai Sekretaris Delegasi Republik Indonesia dalam perundingan dengan Inggris dan Belanda. Ia juga pernah ditempatkan sebagai Sekretaris Dewan Pertahanan Negara dan Wakil Tetap Kementerian Pertahanan Urusan Gencatan Senjata. Dalam Konferensi Meja Bundar (KMB), M.T. Haryono ditugaskan menjadi Sekretaris Delegasi Militer Indonesia. Terakhir ia menjabat sebagai Deputy III Menteri/Panglima Angkatan Darat (Men/Pangad) dengan pangkat mayor jenderal. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh kombinasi **A1)**, **A3)**, dan **B1)**.

10. **Jawaban: a**

Slamet Riyadi merupakan tokoh integrasi bangsa yang pernah terlibat dalam operasi penumpasan gerakan DI/TII di Jawa Barat dan gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) di Ambon. Slamet Riyadi gugur saat usianya belum genap 24 tahun. Ia meninggalkan naskah tertulis berjudul *Pedoman Gerilya I dan II*. Salah satu petunjuknya yang legendaris adalah *de beste verdediging ligt juist in de anvall* yang berarti pertahanan terbaik terletak pada penyerangan.

B. Uraian

1. **Jawaban:**

Indonesia adalah negara yang beragam. Keragaman Indonesia terdiri atas berbagai suku, bahasa, budaya, dan agama. Wilayah Indonesia juga berupa kepulauan yang terpisah-pisah. Keragaman seperti itu rentan mengalami konflik dan pergolakan. Oleh karena itu, segenap bangsa Indonesia perlu mengembangkan kesadaran terhadap pentingnya integrasi untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

2. **Jawaban:**

Marthen Indey merupakan tokoh yang berjuang menjaga keutuhan NKRI. Sejak tahun 1946, Marthen Indey bergabung dalam Partai Indonesia Merdeka yang dibentuk Frans Kaisiepo. Marthen Indey juga memimpin dua belas kepala suku di Papua untuk melancarkan aksi protes menentang pemisahan Papua dari Indonesia. Pada masa perjuangan Trikora 1962, Marthen Indey membantu TNI melakukan penyusupan ke Irian Barat. Saat Trikora berakhir, Marthen Indey bersama

E.Y. Bonay meminta PBB agar segera menggabungkan Irian Barat ke wilayah Republik Indonesia.

3. **Jawaban:**

Setelah Indonesia merdeka, Opu Daeng Risaju tetap melakukan perjuangan mempertahankan integrasi bangsa. Pada 1946 Opu Daeng Risaju beserta Pemuda Republik melakukan serangan terhadap tentara NICA. Akan tetapi, sebulan kemudian tentara NICA melakukan serangan balik terhadap pasukan tersebut. Beberapa bulan kemudian Opu Daeng Risaju ditangkap Belanda di Latonro dan dipaksa berjalan kaki sejauh 40 km menuju Watampone.

4. **Jawaban:**

Muhammad Yamin menyumbangkan banyak pemikirannya bagi integrasi Indonesia. Sejak masa pergerakan nasional, Muhammad Yamin telah memotivasi pergerakan bangsa Indonesia.

Perjuangannya dimulai ketika ia bergabung dengan *Jong Sumatranen Bond*. Ia pernah membentuk Partai Gerakan Rakyat Indonesia bersama dengan Adam Malik, Wilopo, dan Amir Sjarifuddin. Ia juga berperan memelopori Sumpah Pemuda yang salah satu isinya menghendaki bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Selain itu, Muhammad Yamin menjadi salah satu tokoh yang menyumbangkan konsep Pancasila dan UUD 1945.

5. **Jawaban:**

Pada saat terjadi pemberontakan PRRI di Sumatra Barat, A.H. Nasution yang saat itu menjabat sebagai KSAD tidak turun langsung dalam operasi penumpasan pemberontakan. Akan tetapi, ia mengirim pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani untuk melakukan operasi penumpasan pemberontakan PRRI di Sumatra Barat, A.H. Nasution memantau jalannya operasi penumpasan dari Jakarta.

Penilaian Harian

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: c**

Pemberontakan yang berkaitan dengan perbedaan ideologi antara lain pemberontakan PKI di Madiun 1948, pemberontakan DI/TII, dan pemberontakan G 30 S/PKI 1965. Pemberontakan yang disebabkan oleh konflik kepentingan, yaitu pemberontakan Andi Aziz, pemberontakan APRA, dan pemberontakan RMS. Adapun pemberontakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan antara lain pemberontakan PRRI dan Permesta. Jadi, pasangan yang tepat ditunjukkan oleh kombinasi **A2)** dan **B2)**.

2. **Jawaban: a**

Pemberontakan di Madiun telah mendorong pemerintah Indonesia mengambil tindakan keras terhadap PKI. Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia melancarkan operasi militer di Madiun. Pemerintah mengirim Divisi Siliwangi I dan Divisi Siliwangi II di bawah pimpinan Kolonel Sungkono dan Kolonel Gatot Soebroto untuk menyerang gerakan PKI di Madiun. Pasukan Divisi Siliwangi I menyerang Madiun dari arah timur, sedangkan Pasukan Divisi Siliwangi II menyerang dari arah barat.

3. **Jawaban: a**

Pengaruh DI/TII berhasil menyebar ke berbagai wilayah, salah satunya Jawa Tengah. Wilayah Jawa Tengah yang terpengaruh oleh DI/TII antara lain Brebes, Tegal, dan Pekalongan. DI/TII di wilayah ini dipimpin oleh Amir Fatah. Di Kebumen juga muncul gerakan DI/TII pimpinan Kiai Moh. Mahfudz yang terkenal dengan nama Kiai Sumolangu. Gerakan DI/TII di Jawa Tengah didukung oleh Batalion 426 sehingga memiliki kekuatan cukup besar.

4. **Jawaban: d**

Selain menumpas pusat gerakan DI/TII di Jawa Barat, pemerintah melakukan operasi penumpasan DI/TII di berbagai daerah. Di Jawa Tengah penumpasan dilakukan dengan menerjunkan operasi militer. Operasi ini dikenal dengan nama Gerakan Banteng Nasional (GBN) dan Operasi Merdeka Timur. GBN dipimpin oleh Letkol Sarbini, Letkol M. Bachrun, dan Letkol Ahmad Yani. Sementara itu, pelaksanaan Operasi Merdeka Timur dipimpin Letkol Soeharto.

5. **Jawaban: d**

Pada 1948 PKI melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Republik Indonesia. Meskipun demikian, pemerintah tidak melarang aktivitas PKI. Pada masa Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno mencetuskan ajaran nasionalis, agama, dan komunis (Nasakom). Ajaran ini dimanfaatkan PKI untuk menyebarluaskan pengaruhnya. PKI juga berhasil memperkuat kedudukannya dalam percaturan politik Indonesia melalui ajaran Presiden Soekarno tersebut.

6. **Jawaban: b**

Operasi penumpasan terhadap G 30 S/PKI dimulai pada 1 Oktober 1965 pukul 19.00 WIB. Pada saat itu Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) yang sekarang bernama Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edhie Wibowo berhasil merebut kembali studio RRI pusat dan kantor pusat Telkom. Operasi militer dilanjutkan untuk membebaskan pangkalan udara Halim Perdanakusuma. Pada 2 Oktober 1965 pangkalan ini telah dapat dikuasai. Penyisiran juga dilakukan di sekitar Lubang Buaya. Pada 3 Oktober 1965 di sebuah sumur tua di daerah Lubang Buaya ditemukan para korban penculikan dan pembunuhan PKI. Dengan demikian, urutan peristiwa yang tepat adalah 1–3–2.

7. **Jawaban: a**

Peter Dale Scott dan Geoffrey Robinson mengungkapkan bahwa CIA terlibat dalam peristiwa G 30 S/PKI. Keterlibatan tersebut didorong oleh upaya Amerika Serikat membendung pengaruh komunisme di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, CIA bekerja sama dengan kelompok dalam Angkatan Darat untuk memprovokasi PKI agar melakukan kudeta terhadap pemerintahan Presiden Soekarno.

8. **Jawaban: b**

Pada 30 Maret 1950 Andi Aziz bersama pasukannya menggabungkan diri ke dalam APRIS. Akan tetapi, pada 5 April 1950 terdengar berita bahwa pemerintah RIS mengirimkan sekira sembilan ratus pasukan APRIS yang berasal dari TNI ke Makassar. Kedatangan pasukan APRIS menyebabkan pasukan bekas KNIL khawatir akan terdesak oleh pasukan baru tersebut. Oleh karena itu, Andi Aziz memimpin pasukannya untuk

menentang pemerintah RIS. Andi Aziz juga menyatakan gerakannya sebagai upaya mempertahankan Negara Indonesia Timur (NIT).

9. **Jawaban: b**

Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) berkaitan dengan ketidakpuasan beberapa pejuang terhadap kebijakan pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS). Menurut kesepakatan dalam KMB, anggota inti unsur Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) diambil dari TNI. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran anggota KNIL berkaitan dengan kedudukan mereka dalam APRIS. Kekhawatiran itu mendorong beberapa anggota KNIL bergabung dalam pemberontakan APRA di Bandung. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh angka II.

10. **Jawaban: b**

Penumpasan pemberontakan RMS di Maluku diwujudkan pemerintah Indonesia melalui dua cara, yaitu cara damai dan militer. Cara damai ditempuh melalui perundingan dengan mengirim tokoh asli Maluku untuk melakukan kompromi dengan Soumokil dan para pengikutnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tetap mengedepankan cara damai untuk menghadapi pemberontakan yang mengancam integrasi bangsa. Cara damai dipilih untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa atau konflik yang berkepanjangan.

11. **Jawaban: d**

Pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Aziz dilatarbelakangi permasalahan yang sama. Permasalahan tersebut berkaitan dengan keberadaan pasukan KNIL yang menolak keberadaan TNI di wilayah yang mereka kuasai. Mereka menginginkan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia.

12. **Jawaban: a**

Tuntutan PRRI kepada pemerintah Indonesia sebagai berikut.

- 1) Membubarkan Kabinet Djuanda.
- 2) Mendesak pemerintah untuk menaati kembali UUDS 1950.
- 3) Menolak keikutsertaan PKI dalam pemerintahan.

Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh pilihan a.

13. **Jawaban: e**
Permesta dideklarasikan oleh Letkol Ventje Sumual, pemimpin sipil dan militer Indonesia Timur. Gerakan Permesta menghendaki pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap pemerintah daerah. Keinginan inilah yang melatarbelakangi pemberontakan Permesta di Sulawesi. Latar belakang ini sama dengan latar belakang munculnya PRRI di Sumatra Barat.
14. **Jawaban: d**
Bijeenkomst voor Federal Overleg/BFO (pertemuan untuk musyawarah federal) memiliki dua kubu utama yaitu kubu pro-Belanda dan kubu pro-Indonesia. Kubu pro-Indonesia memilih bekerja sama dengan Republik Indonesia untuk membentuk Negara Indonesia Serikat. Kubu ini dipelopori oleh Ida Anak Agung Gde Agung (Negara Indonesia Timur), R.T. Adil Puradiredja dan R.T. Djumhana (Negara Pasundan). Sementara itu, kubu pro-Belanda ingin mempertahankan kerja sama BFO dengan Belanda. Kubu ini dipimpin oleh Sultan Hamid II (Pontianak) dan dr. T. Mansur (Sumatra Timur). Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan angka 2), 4), dan 5).
15. **Jawaban: e**
Marthen Indey merupakan pejuang integrasi Papua menjadi bagian Indonesia. Keinginannya tersebut ditunjukkan dengan memimpin aksi protes yang didukung delegasi dua belas kepala suku di Papua. Aksi protes ini dilakukan untuk menolak rencana pemisahan Papua dari wilayah Indonesia. Marthen Indey juga membujuk anggota militer yang bukan orang Belanda untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda.
16. **Jawaban: a**
Peran Opu Daeng Risaju dalam perjuangan integrasi dimulai ketika ia bergabung dengan Partai Serikat Islam Indonesia (PSII). Selama perjuangannya, Opu Daeng Risaju rela menanggalkan gelar kebangsawannya. Opu Daeng Risaju juga pernah menjadi ketua PSII Palopo pada 1930. Sejak saat itu, Opu Daeng Risaju aktif berjuang melawan kolonialisme Belanda.
17. **Jawaban: c**
Salah satu tokoh yang berjuang mewujudkan integrasi melalui seni adalah Ismail Marzuki. Ia menghasilkan banyak karya seni dalam bentuk

lagu bertema perjuangan. Banyak lagu bernuansa perjuangan telah diciptakan Ismail Marzuki, misalnya "Halo-Halo Bandung" dan "Indonesia Pusaka".

18. **Jawaban: a**
Gambar pada soal merupakan Slamet Riyadi. Pada 2007 Slamet Riyadi dianugerahi gelar sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Penganugerahan gelar tersebut tidak terlepas dari peran Slamet Riyadi dalam menjaga integrasi bangsa Indonesia. Pada 1962 Slamet Riyadi terlibat dalam penumpasan pemberontakan DI/TII di Jawa Barat. Slamet Riyadi juga ditugaskan dalam operasi penumpasan pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) bersama Kolonel Alexander Evert Kawilarang.
19. **Jawaban: a**
Muhammad Yamin merupakan tokoh integrasi bangsa yang berjuang melalui pemikiran politik dan karya sastra. Peran Muhammad Yamin dimulai ketika bergabung dengan *Jong Sumatranen Bond*. Muhammad Yamin juga berperan sebagai penggagas Sumpah Pemuda yang salah satu isinya menghendaki bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Selain itu, ia menjadi salah satu tokoh yang menyumbangkan konsep dasar negara dan konstitusi negara Indonesia.
20. **Jawaban: b**
Jenderal A.H. Nasution merupakan tokoh Angkatan Darat yang berperan menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Pada masa revolusi, A.H. Nasution bertugas sebagai Panglima Divisi Siliwangi. Pada 1948 A.H. Nasution diangkat sebagai Panglima Tentara dan Teritorial Jawa. Setelah masa revolusi, A.H. Nasution diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat selama dua periode (1949–1952 dan 1955–1962). Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh angka 1) dan 3).

B. Uraian

1. **Jawaban:**
Andi Aziz melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia karena anggota pasukan KNIL beranggapan bahwa pemerintah akan menganaktirikan pasukan KNIL. Selain itu, adanya pertentangan pendapat mengenai peleburan negara bagian Indonesia Timur (NIT) ke dalam negara Republik Indonesia turut menyebabkan Andi Aziz melakukan pemberontakan.

2. **Jawaban:**

Gerakan DI/TII di Aceh dipimpin oleh Daud Beureueh. Ia mengawali gerakannya dengan menyatakan Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia pimpinan S.M. Kartosuwiryo. Pernyataan proklamasi tersebut dilakukan pada 20 September 1953. Adapun upaya penumpasan pemberontakan DI/TII di Aceh dilakukan dengan cara damai. Cara tersebut dilakukan pemerintah Republik Indonesia dengan mengajak Daud Beureueh bermusyawarah.

3. **Jawaban:**

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, pemerintah pusat melakukan pembangunan besar-besaran. Akan tetapi, pemerintah kurang memperhatikan pembangunan di daerah-daerah. Oleh karena itu, muncul pemberontakan yang dilakukan dengan tujuan mengingatkan bahwa pemerintah pusat mempunyai daerah-daerah yang harus diperhatikan dan dikembangkan demi kemajuan dan keutuhan negara.

4. **Jawaban:**

Sultan Hamengku Buwono IX dan Sultan Syarif Kasim II merupakan dua raja lokal yang mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, kedua raja tersebut menyatakan dukungan terhadap Indonesia. Dukungan Sultan Hamengku Buwono IX ditunjukkan dengan menawarkan Yogyakarta sebagai ibu kota sementara Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan. Adapun Sultan Syarif Kasim II menunjukkan dukungannya dengan menyerahkan sebagian hartanya bagi perjuangan Indonesia.

5. **Jawaban:**

Pada 1949 Silas Papare membentuk Partai Kemerdekaan Irian Indonesia (PKII). Partai ini diundang pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Selanjutnya, Silas Papare mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta untuk mewujudkan integrasi Papua–Indonesia. Pada 1962 Silas Papare mewakili Irian Barat sebagai anggota delegasi RI dalam Perundingan New York antara Indonesia dan Belanda mengenai penyelesaian masalah Papua.

BAB II

Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan hingga Masa Demokrasi Liberal

A. Kehidupan Politik pada Awal Kemerdekaan hingga Masa Demokrasi Liberal

Uji Kompetensi 1

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: d**

Setelah merdeka pada 17 Agustus 1945 Indonesia menerapkan sistem presidensial. Pada perkembangannya terjadi perubahan sistem ketatanegaraan. Perubahan tersebut terjadi karena KNIP menerbitkan Maklumat Nomor 5 tanggal 11 November 1945. Berdasarkan maklumat tersebut, kabinet terdiri atas menteri yang bekerja kolektif dan dipimpin seorang perdana menteri. Perdana menteri ditunjuk oleh presiden. Format itu pun disetujui Presiden Soekarno. Akhirnya, pada 14 November 1945 terbentuk kabinet baru dengan Sutan Sjahrir sebagai perdana menteri. Sejak saat itu pemerintahan Indonesia berubah dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer.

2. **Jawaban: e**

Pemerintahan dengan sistem parlementer yang dipimpin oleh Sutan Sjahrir dikenal dengan Kabinet Sjahrir I. Kabinet Sjahrir I hanya menjalankan tugasnya selama tiga bulan. Pada 23 Februari 1945 Sutan Sjahrir menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Kejatuhan Kabinet Sjahrir I terjadi karena kabinet ini cenderung tidak memiliki mayoritas suara di parlemen sehingga mudah dijatuhkan.

3. **Jawaban: a**

Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk PPKI setelah Indonesia merdeka. KNIP bertugas membantu pekerjaan presiden dan wakil presiden. Terbitnya Maklumat Nomor X pada 16 Oktober 1945 telah mengubah fungsi KNIP.

Sejak saat itu KNIP bertugas menjalankan fungsi DPR dan MPR selama keduanya belum terbentuk. Dapat disimpulkan, terbitnya Maklumat Nomor X pada 16 Oktober 1945 telah mengubah fungsi KNIP menjadi lembaga legislatif.

4. **Jawaban: b**

Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (RERA) merupakan kebijakan yang dicetuskan oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin pada 1947. Kebijakan ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Kabinet Moh. Hatta. Latar belakang Moh. Hatta menerapkan kebijakan ini adalah mengurangi pengaruh golongan kiri dalam tubuh Angkatan Perang dan kesulitan ekonomi akibat inflasi yang berdampak pada pembiayaan Angkatan Perang. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh angka 1) dan 3).

5. **Jawaban: b**

Demokrasi Liberal dimulai sejak Indonesia kembali berbentuk negara kesatuan setelah sebelumnya berbentuk negara serikat. Masa Demokrasi Liberal memiliki corak politik yang berbeda dari masa sebelumnya. Pada masa Demokrasi Liberal presiden hanya bertugas sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Partai-partai politik pada masa Demokrasi Liberal mengusung berbagai ideologi. Partai-partai besar biasanya dominan dalam format kabinet karena sebuah kabinet harus mendapat dukungan mayoritas parlemen. Oleh karena itu, sebuah kabinet yang tidak didukung mayoritas parlemen harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.

6. **Jawaban: d**

Setelah dilantik sebagai perdana menteri, Moh. Natsir menginginkan kabinet yang dipimpinnya bersifat nasionalis dengan koalisi dari berbagai partai. Akan tetapi, keinginan Natsir tersebut tidak terlaksana karena terjadi perebutan kursi antara PNI dan Masyumi di dalam kabinet. Kabinet Natsir pun kesulitan menempatkan PNI dalam kabinetnya sehingga Moh. Natsir memutuskan tidak melibatkan PNI di dalamnya.

7. **Jawaban: e**

Pada 1952 kabinet Sukiman melalui Menteri Luar Negeri Ahmad Soebardjo menandatangani *Mutual Security Act* (MSA) dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Merle Cochran. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa Indonesia bersedia menerima bantuan ekonomi, teknik, dan persenjataan dari Amerika Serikat berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan MSA. Oleh partai oposisi, tindakan Ahmad Subardjo ini dianggap sebagai kebijakan politik luar negeri yang mendukung blok Barat sehingga menyimpang dari prinsip politik luar negeri bebas aktif.

8. **Jawaban: d**

Kabinet Ali Sastroamidjojo I memerintah pada 30 Juli 1953–24 Juli 1955. Pada masa pemerintahannya, Ali Sastroamidjojo menorehkan berbagai prestasi antara lain menyelenggarakan Konferensi Asia–Afrika (KAA), membentuk panitia pemilihan umum yang diketuai Hadikusumo, dan membatalkan hasil Konferensi Meja Bundar yang berkaitan utang Indonesia terhadap Belanda. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh kombinasi **A2)**, **A3)**, dan **B2)**.

9. **Jawaban: a**

Salah satu kebijakan penting Kabinet Djuanda terkait permasalahan di dalam negeri adalah menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Musyawarah ini membahas masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, serta pembagian wilayah Indonesia.

10. **Jawaban: e**

Pada 3 November 1945 Wakil Presiden Moh. Hatta mengeluarkan maklumat tentang pembentukan partai politik. Maklumat tersebut menandai pemberlakuan sistem multipartai.

Menurut Moh. Hatta, sistem multipartai bertujuan memudahkan dalam mengukur kekuatan perjuangan dan memudahkan dalam meminta pertanggungjawaban kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan.

B. Uraian

1. **Jawaban:**

Pada awal kemerdekaan, Indonesia menerapkan sistem presidensial. Dalam sistem tersebut Presiden Soekarno berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Akan tetapi, sistem pemerintahan tersebut tidak berlangsung lama karena digantikan sistem parlementer yang ditandai dengan terbitnya Maklumat KNIP Nomor 5 Tanggal 11 November 1945 oleh Sutan Sjahrir. Berdasarkan maklumat tersebut, kabinet terdiri atas menteri yang bekerja kolektif dan dipimpin seorang perdana menteri. Perdana menteri ditunjuk oleh presiden. Format itu pun disetujui Presiden Soekarno. Akhirnya, pada 14 November 1945 terbentuk kabinet baru dengan Sutan Sjahrir sebagai perdana menteri. Sejak saat itu pemerintahan Indonesia berubah dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer.

2. **Jawaban:**

Kebijakan Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (RERA) diterapkan secara penuh pada masa pemerintahan Kabinet Hatta. Pada masa ini kebijakan RERA bertujuan mengurangi pengaruh golongan kiri dalam tubuh Angkatan Perang. Tujuan ini dilakukan dengan meleburkan TNI-Masyarakat yang dibentuk oleh Amir Syarifuddin ke dalam TNI. Semua laskar kiri harus meleburkan diri dalam TNI dan menaati perintah TNI. Selain itu, Moh. Hatta melihat permasalahan ekonomi sebagai acuan untuk menyederhanakan Angkatan Perang. Pembiayaan angkatan perang menjadi masalah besar pada saat ini karena adanya inflasi. Oleh karena itu, Moh. Hatta memfokuskan kebijakan RERA ke arah pengurangan Angkatan Perang.

3. **Jawaban:**

Masa pemerintahan Kabinet Wilopo tidak dapat dilepaskan dari berbagai masalah. Beberapa masalah tersebut antara lain terjadinya krisis ekonomi, munculnya gerakan separatisme, dan terjadinya perselisihan internal di tubuh TNI.

Kabinet Wilopo semakin tidak stabil saat terjadi peristiwa Tanjung Morawa. Dalam peristiwa tersebut polisi mengusir petani yang menduduki tanah-tanah pemerintah di Tanjung Morawa. Peristiwa ini menyebabkan lima petani tewas dan beberapa petani lainnya ditangkap. Akibat peristiwa ini, Sidik Kertapati yang menjabat sebagai ketua Sarekat Tani Indonesia mengirim mosi tidak percaya kepada parlemen melalui fraksi PNI. Mosi tersebut menyebabkan Kabinet Wilopo akhirnya mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno pada 2 Juni 1953.

4. **Jawaban:**

Terbitnya Maklumat Wakil Presiden 3 November 1945 dilatarbelakangi oleh langkah Presiden Soekarno yang menetapkan PNI sebagai partai negara (*staatspartij*). Langkah Presiden Soekarno menjadikan PNI sebagai partai negara akhirnya mendapat kritik dan penolakan dari berbagai pihak karena menimbulkan kesan adanya

partai tunggal. Selanjutnya, BP-KNIP mengusulkan kepada pemerintah agar memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk mendirikan partai politik. Berdasarkan usul tersebut, pada 3 November 1945 Wakil Presiden Moh. Hatta mengeluarkan maklumat tentang pembentukan partai politik.

5. **Jawaban:**

Pada perjalanannya, Konstituante yang dibentuk berdasarkan hasil pemilu 1955 belum berhasil menyelesaikan tugas utamanya, yaitu menetapkan undang-undang dasar negara. Kegagalan Konstituante tersebut disebabkan faktor-faktor berikut.

- Perdebatan yang berlarut-larut dalam Konstituante.
- Adanya perselisihan antarpartai.
- Munculnya desakan untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945.

B. Kehidupan Ekonomi pada Awal Kemerdekaan hingga Masa Demokrasi Liberal

Uji Kompetensi 2

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: b**

Setelah merdeka, bangsa Indonesia tidak serta merta dapat melepaskan diri dari usaha Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Belanda masih berusaha memprovokasi rakyat dan pemerintah. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh bagi kehidupan politik, tetapi juga kehidupan ekonomi. Sikap dan aksi Belanda tersebut menyebabkan kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia menjadi terhambat.

2. **Jawaban: d**

Sebagai negara yang baru merdeka, perekonomian bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan masih dipenuhi oleh kekacauan. Kekacauan ini karena beberapa peristiwa yang menyebabkan guncangan perekonomian. Beberapa peristiwa tersebut adalah inflasi yang tidak terkendali (hiperinflasi), blokade ekonomi yang dilakukan Belanda, dan kekosongan kas negara. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh angka 2), 4), dan 5).

3. **Jawaban: b**

Salah satu penyebab terjadinya hiperinflasi di Indonesia pada awal kemerdekaan adanya peredaran mata uang asing yang tidak terkendali. Kondisi tersebut dapat terjadi karena panglima *Allied Forces for Netherlands East Indies* (AFNEI) mengumumkan berlakunya mata uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai Sekutu. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengajukan protes kepada panglima AFNEI karena sebelumnya tidak ada kesepakatan mengenai peredaran mata uang NICA.

4. **Jawaban: e**

Pada 1 November 1946 pemerintah mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI). Pendirian BNI didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946 untuk mengatur kurs mata uang Jepang terhadap Oeang Republik Indonesia (ORI). Berdasarkan undang-undang tersebut BNI bertugas mengatur nilai tukar ORI terhadap valuta asing yang ada di Indonesia.

5. **Jawaban: c**

Banking and Trading Corporation (BTC) merupakan suatu badan perdagangan semi-pemerintah yang bertugas mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri, salah satunya dengan perusahaan swasta di Amerika Serikat. BTC dipimpin oleh dua tokoh yaitu Sumitro Djojohadikusumo dan Ong Eng Die. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh pilihan c.

6. **Jawaban: d**

Perekonomian Indonesia pada masa Demokrasi Liberal belum tertata dengan baik. Indonesia masih harus menanggung utang yang cukup tinggi. Aktivitas ekspor yang coba dikembangkan pun belum berjalan dengan baik dan masih berada di bawah standar internasional. Kondisi ini terjadi karena kegiatan ekspor masih bergantung pada beberapa jenis hasil perkebunan. Selain itu, Indonesia belum memiliki komoditas ekspor yang laku dalam perdagangan internasional.

7. **Jawaban: e**

Memasuki periode 1950-an, bangsa Indonesia berusaha menciptakan sistem ekonomi baru yang akan menjadi landasan kehidupan ekonomi bangsa. Akan tetapi, untuk mewujudkan sistem ekonomi baru tersebut, bangsa Indonesia masih menemukan hambatan besar. Hambatan tersebut adalah sistem ekonomi kolonial yang masih mengakar kuat. Sistem ekonomi kolonial ditandai banyaknya perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia dan aktivitas perekonomian yang didominasi para pedagang Tionghoa. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh kombinasi X2), X3), dan Y3).

8. **Jawaban: c**

Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap Indonesia mengirim delegasi ke Belanda dengan misi merundingkan masalah Financial Ekonomi (Finek). Perundingan ini dilakukan pada 7 Januari 1956. Dalam perundingan tersebut Indonesia memberikan beberapa usulan kepada Belanda. Akan tetapi, usulan tersebut ditolak oleh Belanda. Akibatnya, pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan Finek dengan membubarkan Uni Indonesia–Belanda pada 13 Februari 1956.

9. **Jawaban: d**

Keterangan pada soal terkait dengan Gerakan Benteng yang dicetuskan oleh Soemitro Djojohadikusumo. Dalam kebijakan ini pemerintah memberikan bantuan kepada kalangan pengusaha pribumi agar mereka ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Bantuan tersebut berupa bimbingan konkret dan bantuan kredit. Selain memberikan bantuan modal, pemerintah berusaha membangun kewirausahaan pribumi agar mampu membentengi perekonomian negara Indonesia yang baru merdeka.

10. **Jawaban: a**

Salah satu strategi untuk menyelesaikan masalah ekonomi pada masa Demokrasi Liberal adalah melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan asing. Pada 1957 pemerintah Indonesia memutuskan menasionalisasi beberapa perusahaan asing milik Belanda. Kebijakan nasionalisasi tersebut dilakukan karena Belanda dianggap ingkar janji dengan tidak menyerahkan kembali Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia sesuai kesepakatan dalam KMB.

B. Uraian

1. **Jawaban:**

Indonesia mengalami masa kesulitan ekonomi pada awal kemerdekaan. Salah satu kesulitan tersebut adalah terjadinya inflasi yang tidak terkendali (hiperinflasi). Hiperinflasi disebabkan oleh peredaran mata uang asing yang tidak terkendali. Pada masa itu pemerintah Indonesia tidak melarang peredaran uang Jepang karena Indonesia belum memiliki mata uang sendiri. Di sisi lain pada 6 Maret 1946 panglima *Allied Forces for Netherlands East Indies* (AFNEI) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai Sekutu. Kebijakan ini menyebabkan peredaran uang di Indonesia semakin tidak terkendali.

2. **Jawaban:**

Pemerintah menerapkan beberapa strategi untuk menembus blokade ekonomi Belanda. Strategi pemerintah untuk menembus blokade ekonomi Belanda sebagai berikut.

- a. Menyelenggarakan operasi Panitia Oeroesan Pemulang Djepang (POPDA) dan *Allied Prisoners of War and Internees* (APWI).

- b. Melakukan diplomasi beras dengan India.
 - c. Membentuk *Banking and Trading Corporation* (BTC).
 - d. Membentuk *Indonesia Office* (Indof) di Singapura.
 - e. Membentuk Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPULN) yang diketuai Ali Jayengprawiro.
3. **Jawaban:**
Rakyat Indonesia sangat mendukung Program Pinjaman Nasional yang dicetuskan Ir. Surachman. Rakyat Indonesia berbondong-bondong mendatangi Bank Tabungan Pos dan rumah-rumah pegadaian untuk menyetorkan uangnya. Pada tahun pertama berhasil dikumpulkan uang sejumlah Rp500.000.000,00. Keberhasilan ini menunjukkan besarnya dukungan, partisipasi, dan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Republik Indonesia.
4. **Jawaban:**
Memasuki periode tahun 1950-an, bangsa Indonesia berusaha menciptakan sistem ekonomi baru yang akan menjadi landasan kehidupan ekonomi bangsa. Akan tetapi, untuk mewujudkan

sistem ekonomi baru tersebut, bangsa Indonesia masih menemukan hambatan besar. Menghadapi kondisi tersebut, Soemitro Djojohadikusumo mencoba mempraktikkan ekonomi nasional pada sektor perdagangan. Ia berusaha merangkul kaum pribumi menengah untuk menumbuhkan kelas pengusaha pribumi. Gagasan Soemitro tersebut disampaikan kepada Kabinet Natsir dan diwujudkan dalam penancangan Rencana Urgensi Perekonomian (RUP) yang sering disebut dengan *Plan Soemitro*.

5. **Jawaban:**
Memasuki tahun 1951 perekonomian Indonesia kembali tidak stabil karena menurunnya volume perdagangan internasional. Indonesia hanya mengandalkan komoditas ekspor berupa hasil perkebunan. Pemerintah belum mampu meningkatkan produksi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada untuk meningkatkan pendapatan nasional. Kondisi ini diperparah dengan kondisi keuangan Indonesia masih menggunakan rancangan pemerintah kolonial Belanda. Dapat dikatakan, pemerintah Indonesia mengalami kesulitan untuk mengubah sistem ekonomi kolonial ke ekonomi nasional.

Penilaian Harian

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: d**
Pada awalnya Komite Nasional Indonesia Pusat dibentuk untuk membantu tugas presiden dan wakil presiden. Lembaga ini dibentuk berdasarkan sidang ketiga PPKI pada 22 Agustus 1945. Pada 16 Oktober 1945 Wakil Presiden Moh. Hatta mengeluarkan Maklumat Nomor X. Maklumat tersebut mengubah fungsi KNIP. Dengan adanya maklumat tersebut, KNIP memiliki fungsi baru yaitu sebagai majelis legislatif. Fungsi legislatif KNIP berlangsung selama MPR dan DPR belum terbentuk.
2. **Jawaban: b**
Pada 14 Januari 1946 pemerintah Indonesia memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Yogyakarta. Pemindahan tersebut memengaruhi

situasi politik dan pemerintahan. Pemindahan ibu kota ke Yogyakarta dilakukan karena Jakarta terancam oleh kekuatan asing. Meskipun ibu kota telah pindah ke Yogyakarta, Perdana Menteri Sutan Sjahrir tetap tinggal di Jakarta untuk mengadakan hubungan dengan dunia internasional.

3. **Jawaban: e**
Setelah dilantik sebagai perdana menteri, Amir Sjarifuddin merencanakan kebijakan Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (RERA). Kebijakan RERA berawal dari munculnya mosi untuk menyederhanakan Angkatan Perang pada 20 Desember 1947. Mosi tersebut muncul dari anggota fraksi sayap kiri dalam BP KNIP, yaitu Z. Baharuddin. Selanjutnya, mosi tersebut disetujui oleh Presiden Soekarno. Pada perkembangannya, kebijakan tersebut dilanjutkan oleh pemerintahan Kabinet Moh. Hatta.

4. **Jawaban: c**

Pada masa Demokrasi Liberal kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Sebagian besar kabinet pada masa Demokrasi Liberal tidak dapat bertahan lama. Kondisi tersebut karena biasanya sebuah kabinet selalu mendapatkan mosi tidak percaya dari parlemen. Oleh karena itu, agar dapat bertahan lama sebuah kabinet harus mendapat dukungan dari mayoritas anggota parlemen.

5. **Jawaban: a**

Sistem pemerintahan yang diterapkan pada masa Demokrasi Liberal adalah parlementer. Dalam periode ini parlemen memiliki peran besar dalam sistem pemerintahan. Parlemen memiliki peran besar dalam mengangkat dan memberhentikan kabinet. Kabinet pada masa Demokrasi Liberal sebagai berikut.

- 1) Kabinet Natsir (6 September 1950–21 Maret 1951).
- 2) Kabinet Sukiman (26 April 1951–23 Februari 1952).
- 3) Kabinet Wilopo (30 Maret 1952–2 Juni 1953).
- 4) Kabinet Ali Sastroamidjojo I (30 Juli 1953–24 Juli 1955).
- 5) Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955–3 Maret 1956).
- 6) Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956–14 Maret 1957).
- 7) Kabinet Djuanda/Karya (9 April 1957–5 Juli 1959).

Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh urutan 1)–7)–5)–3)–4)–6)–2).

6. **Jawaban: d**

Mosi Hadikusumo merupakan tuntutan agar pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1950 tentang Pemilihan Anggota Lembaga Perwakilan Daerah dan menggantinya dengan undang-undang baru yang lebih demokratis. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1950 dianggap tidak demokratis karena dalam menentukan pilihannya dilakukan secara bertingkat. Mosi Hadikusumo ini mendapat dukungan dari parlemen. Kondisi ini menyebabkan hubungan Kabinet Natsir dan parlemen menjadi renggang. Akhirnya, pada 21 Maret 1951 Natsir menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno.

7. **Jawaban: a**

Keterangan pada soal terkait dengan Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman merupakan kolaborasi antara PNI dan Masyumi. Kabinet Sukiman tidak terlepas dari berbagai masalah seperti keputusan sepihak Menteri Kehakiman, Muhammad Yamin, membebaskan 950 tahanan *Staat van Oorlog en Beleg* (SOB) tanpa persetujuan perdana menteri dan anggota kabinet. Selanjutnya, Kabinet Sukiman jatuh karena penandatanganan perjanjian *Mutual Security Act* (MSA). Tindakan tersebut dianggap menyimpang dari prinsip politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas aktif.

8. **Jawaban: e**

Kabinet Wilopo merupakan koalisi antara PNI dan Masyumi. Salah satu aspek menarik dari Kabinet Wilopo adalah penerapan sistem *zaken kabinet*, yaitu kabinet terdiri atas menteri-menteri yang ahli di bidangnya. Dengan sistem ini Wilopo berharap kabinet mampu bekerja secara profesional dan menyelesaikan permasalahan bangsa tanpa mengutamakan kepentingan golongan atau kelompok tertentu.

9. **Jawaban: e**

Gambar pada soal merupakan Konferensi Asia–Afrika yang diselenggarakan pada 1955. KAA diselenggarakan pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Bagi Ali Sastroamidjojo, pelaksanaan KAA bertujuan untuk menunjukkan peran aktif Indonesia dalam kancah internasional. Dengan begitu, bangsa Indonesia tetap dapat melaksanakan politik luar negeri bebas aktif secara murni dan konsekuen.

10. **Jawaban: c**

Kabinet Burhanuddin Harahap memerintah pada 12 Agustus 1955–3 Maret 1956. Meskipun berlangsung singkat, Kabinet Burhanuddin Harahap tetap memiliki peran besar bagi kehidupan politik bangsa Indonesia. Salah satu keberhasilan Kabinet Burhanuddin Harahap yang berpengaruh besar bagi kehidupan bangsa Indonesia adalah pelaksanaan pemilihan umum untuk pertama kali pada 1955. Pemilu dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR (parlemen). Tahap kedua dilaksanakan pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante.

11. **Jawaban: b**
Pada 8 Maret 1956 Presiden Soekarno memilih Ali Sastroamidjojo sebagai formatur kabinet baru. Anggota Kabinet Ali Sastromidjojo dilantik pada 20 Maret 1956. Selanjutnya, kabinet ini disebut Kabinet Ali Sastroamidjojo II yang terdiri atas koalisi PNI, Masyumi, dan NU. PKI tidak dilibatkan dalam kabinet karena ditolak beberapa tokoh Islam seperti Sukiman dan K.H. Idham Chalid. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh kombinasi A1), A3), dan B2).
12. **Jawaban: d**
Pada tahun 1955 bangsa Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu untuk pertama kalinya. Sebagai hasil pemilu, pada tanggal 26 Maret 1956 dibentuk parlemen baru yang kemudian diikuti dengan pembentukan Konstituante pada tanggal 10 November 1956. Parlemen baru terdiri atas wakil-wakil 28 partai politik, organisasi, dan perkumpulan pemilih yang dibagi dalam tujuh belas fraksi.
13. **Jawaban: b**
Konstituante bertugas menyusun undang-undang dasar baru pengganti UUDS 1950. Akan tetapi, tugas tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Hingga pertengahan 1959 Konstituante belum berhasil menyelesaikan undang-undang dasar baru. Ketidakterhasilan ini disebabkan terjadinya perdebatan berlarut-larut sebagai dampak dari anggota Konstituante yang berasal dari berbagai partai. Setiap partai dalam Konstituante selalu mempertahankan pendapatnya tanpa diikuti sikap toleran terhadap pendapat anggota partai lain.
14. **Jawaban: e**
Pada awal kemerdekaan, Moh. Hatta mencetuskan ide sistem multipartai. Moh. Hatta berharap sistem multipartai memudahkan dalam mengukur kekuatan perjuangan dan memudahkan dalam meminta pertanggungjawaban kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Akan tetapi, pada masa Demokrasi Liberal sistem ini tidak berjalan dengan baik karena partai politik saling bersaing, mencari kesalahan, dan menjatuhkan. Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan parlemen menjadi partai oposisi yang berusaha menjatuhkan partai politik yang sedang memerintah.
15. **Jawaban: c**
Anggota Konstituante mewakili partai politik, golongan, dan aliran. Selain ketiga unsur tersebut, dalam Konstituante terdapat perwakilan dari golongan minoritas yang mewakili setiap etnik di Indonesia. Kelompok minoritas yang ditetapkan jumlah kursinya antara lain 18 kursi golongan Tionghoa, 12 kursi golongan Eropa, dan 6 kursi golongan Arab.
16. **Jawaban: a**
Kemerdekaan yang diraih pada 17 Agustus 1945 tidak menjamin bangsa Indonesia keluar dari permasalahan. Pada awal kemerdekaan, bangsa Indonesia masih harus menghadapi permasalahan di berbagai bidang. Dalam bidang ekonomi, bangsa Indonesia masih menghadapi kekacauan sistem perekonomian dan keuangan.
17. **Jawaban: c**
Pada awal kemerdekaan Indonesia mendapat warisan kekacauan perekonomian dari Jepang. Permasalahan tersebut diperparah dengan kondisi keamanan dalam negeri yang tidak stabil akibat sering terjadi pergantian kabinet. Sementara itu, Belanda tetap tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia dan masih terus memprovokasi rakyat dan pemerintah sehingga menghambat kebijakan pemerintah. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh keterangan angka 2), 3), dan 4).
18. **Jawaban: e**
Salah satu penyebab hiperinflasi pada awal kemerdekaan Indonesia adalah peredaran mata uang asing yang tidak terkendali. Mata uang tersebut adalah mata uang Jepang dan mata uang NICA. Pada kondisi tersebut, pemerintah memutuskan tidak melarang peredaran mata uang Jepang karena pada saat itu Indonesia belum memiliki mata uang sendiri.
19. **Jawaban: d**
Keterangan pada soal berkaitan dengan Bank Negara Indonesia yang didirikan pada 1 November 1946. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946 Bank Negara Indonesia bertugas mengatur kurs mata uang Jepang dan mata uang asing lainnya terhadap ORI. Pada awalnya BNI adalah Yayasan Pusat Bank yang didirikan pada Juli 1946 dan dipimpin oleh Margono Djojohadikusumo.

20. **Jawaban: b**

Pada 19 Mei 1946 Perdana Menteri Sutan Sjahrir menyerahkan bantuan beras kepada India yang saat itu sedang dilanda bencana kelaparan. Bantuan tersebut diterima oleh delegasi India di Indonesia bernama K.L. Punjabi. Selain bersifat kemanusiaan, bantuan tersebut digunakan sebagai strategi diplomasi. Dengan bantuan tersebut, India menjadi negara yang paling aktif memperjuangkan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia dalam forum internasional.

21. **Jawaban: d**

Pada 1947 pemerintah mendirikan perwakilan di Singapura bernama *Indonesia Office* (Indof). Perwakilan ini juga digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menembus blokade ekonomi Belanda. Perwakilan ini dipimpin oleh Oetoyo Ramelan dan dibantu oleh beberapa staf yaitu Soejono Daroesman, Zairin Zain, Tharuddin Rahmat, Soeroso, dan Tamtono.

22. **Jawaban: a**

Setelah pengakuan kedaulatan pada 1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan sebagai akibat hasil kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB). Salah satu hasil KMB adalah Indonesia harus menanggung utang-utang sejak masa Hindia Belanda. Utang-utang tersebut tentu saja sangat memberatkan bagi kondisi perekonomian Indonesia karena usia negara masih sangat muda dan Indonesia belum mampu mengelola perekonomiannya dengan baik.

23. **Jawaban: d**

Sistem ekonomi Ali-Baba diprakarsai oleh Iskaq Tjokroadisurjo yang pada masa pemerintahan kabinet Ali Sastroamidjojo I menjabat sebagai menteri perekonomian. Tujuan kebijakan ini adalah menciptakan kerja sama antara pengusaha pribumi (Ali) dengan pengusaha nonpribumi (Baba). Kebijakan ini mendorong berkembangnya pengusaha swasta nasional pribumi dalam usaha merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.

24. **Jawaban: e**

Sebagai salah satu ekonom terbaik Indonesia, Soemitro Djojohadikusumo berusaha mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Menurutnya, setelah Indonesia merdeka sudah saatnya untuk menerapkan sistem ekonomi

nasional. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Soemitro Djojohadikusumo merupakan tokoh nasionalis sejati yang berusaha menempatkan semangat nasionalisme di atas segalanya.

25. **Jawaban: a**

Kebijakan Gerakan Benteng dimulai pada April 1950. Inti dari kebijakan ini adalah memberikan bantuan kepada pengusaha pribumi agar mereka ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Bantuan tersebut berupa bimbingan konkret atau bantuan kredit. Selain memberikan bantuan modal, pemerintah berusaha membangun kewirausahaan pribumi agar mampu membentengi perekonomian negara Indonesia yang baru merdeka. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh kombinasi **X1**, **X2**, dan **Y1**). Adapun pernyataan **X3**, **Y2**, dan **Y3**) terkait dengan kebijakan Gunting Syafruddin.

B. Uraian

1. **Jawaban:**

Pada awalnya, KNIP dibentuk sebagai lembaga yang membantu tugas presiden dan wakil presiden. Akan tetapi, tugas tersebut mengalami perubahan sejak Badan Pekerja (BP) KNIP mengeluarkan Maklumat KNIP Nomor 5 tanggal 11 November 1945 tentang peralihan pertanggungjawaban menteri dan presiden kepada Badan Pekerja KNIP. Ketentuan tersebut menyebabkan KNIP memiliki kekuasaan sangat besar. Posisi Soekarno dan Moh. Hatta bergeser dari kepemimpinan yang nyata menjadi pimpinan bersifat simbolis.

2. **Jawaban:**

Demokrasi Liberal memberi kesempatan luas kepada partai-partai politik untuk tumbuh dan berkembang. Partai politik dapat menempatkan wakilnya dalam kabinet. Pada sistem Demokrasi Liberal, partai-partai besar juga memiliki partisipasi yang besar pula dalam pemerintahan. Partisipasi ini terjadi karena kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen merupakan kekuatan berdasarkan pemberlakuan UUDS 1950.

3. **Jawaban:**

Salah satu keputusan kontroversial yang terjadi pada masa Kabinet Sukiman adalah ketika Menteri Luar Negeri Ahmad Soebardjo me-

nandatangani perjanjian *Mutual Security Act* (MSA) dengan Duta Besar Amerika Serikat, Merle Cochran. Sunario dari PNI mengeluarkan mosi tidak percaya karena menganggap Ahmad Soebardjo melanggar politik luar negeri bebas aktif. Akibat mosi tersebut Ahmad Soebardjo akhirnya mengundurkan diri. Selanjutnya, pada 27 Februari 1952 Kabinet Sukiman menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno.

4. **Jawaban:**

Untuk melaksanakan pemilihan umum, Kabinet Wilopo menyampaikan rancangan undang-undang mengenai sistem pemilihan umum secara proporsional kepada perlemen. Rancangan undang-undang tersebut akhirnya disahkan parlemen menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Pada 31 Mei 1954 pemerintah membentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang diketuai Hadikusumo dan Rustam Sutan Palindih sebagai wakil ketua. Selanjutnya, PPI

secara resmi dilantik Presiden Soekarno pada 28 November 1954. PPI menetapkan pemilu dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu pada 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen (DPR) dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante.

5. **Jawaban:**

Soemitro Djojohadikusumo memiliki peran penting pada masa Demokrasi Liberal. Untuk menstabilkan perekonomian pada masa Demokrasi Liberal, Soemitro Djojohadikusumo mengeluarkan kebijakan Gerakan Benteng. Inti kebijakan ini adalah memberikan bantuan kepada kalangan pengusaha pribumi agar mereka ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Bantuan tersebut berupa bimbingan konkret atau bantuan kredit. Selain memberikan bantuan modal, pemerintah juga berusaha membangun kewirausahaan pribumi agar mampu membentengi perekonomian negara Indonesia yang baru merdeka.

Penilaian Tengah Semester 1

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: e**

Front Nasional merupakan gerakan yang dibentuk PKI pada saat pemberontakan di Madiun tahun 1948. Gerakan tersebut dibentuk dengan tujuan mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme. Gerakan tersebut dipimpin oleh Musso, Amir Syarifuddin, dan D.N. Aidit.

2. **Jawaban: d**

Wilayah Jawa Tengah yang terpengaruh oleh gerakan DI/TII di antaranya Brebes, Tegal, dan Pekalongan. Gerakan di tiga wilayah ini dipimpin oleh Amir Fatah. Selain itu, muncul gerakan DI/TII yang dipimpin oleh Kiai Sumolangu. Gerakan DI/TII di Jawa Tengah dianggap memiliki kekuatan cukup besar karena didukung kekuatan militer yaitu dari Batalion 426.

3. **Jawaban: a**

Gerakan Benteng Nasional merupakan operasi militer yang dilakukan TNI untuk menumpas gerakan DI/TII di Jawa Tengah. Gerakan Benteng Nasional (GBN) dipimpin oleh Letkol Sarbini, Letkol M. Bachrun, dan Letkol A. Yani. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh angka 1), 2), dan 3). Adapun angka 4) dan 5) merupakan tokoh-tokoh yang menumpas pemberontakan PKI di Madiun 1948.

4. **Jawaban: c**

Sejak peristiwa PKI tahun 1948 di Madiun, mulai muncul benih konflik antara PKI dan TNI Angkatan Darat. TNI Angkatan Darat melihat PKI sebagai ancaman karena kedekatannya dengan Presiden Soekarno. Menjelang peristiwa G 30 S/PKI 1965, ketegangan antara keduanya semakin memuncak karena Angkatan Darat menolak usulan PKI tentang pembentukan angkatan kelima oleh PKI. Angkatan kelima terdiri atas para buruh tani yang dipersenjatai.

5. **Jawaban: c**

Teori mengenai keterlibatan Inggris dan Amerika Serikat dalam peristiwa G 30 S/PKI dikemukakan oleh teori Greg Poulgrain. Dalam teori tersebut disebutkan bahwa muncul keinginan Amerika Serikat maupun Inggris untuk menjatuhkan kekuasaan Presiden Soekarno. Kampanye Ganyang Malaysia oleh Presiden Soekarno dianggap mengganggu kepentingan Inggris di Malaysia.

6. **Jawaban: b**

Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) berawal dari pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Pemerintah RIS kemudian menempatkan TNI sebagai anggota inti unsur APRIS. Adapun anggota lainnya diambil dari kalangan bekas anggota *Koninklijke Nederlands Indische Leger* (KNIL). Kebijakan inilah yang kemudian mendorong beberapa anggota KNIL bergabung dalam pemberontakan APRA.

7. **Jawaban: a**

Peristiwa pada gambar soal merupakan pendudukan pasukan APRA di Kota Bandung. Pasukan tersebut menduduki Kota Bandung pada 23 Januari 1950. Pasukan APRA menuntut agar mereka diakui sebagai tentara negara Pasundan. Padahal, dalam Konferensi Inter-Indonesia di Yogyakarta telah disetujui bahwa APRIS adalah Angkatan Perang Nasional.

8. **Jawaban: c**

Pengiriman pasukan TNI ke Makassar pada 5 April 1950 merupakan awal dari munculnya pemberontakan Andi Azis. Pada saat itu, di Sulawesi Selatan sedang dilanda kekacauan yang terjadi karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat antifederal, mereka mendesak pimpinan NIT agar segera menggabungkan diri dengan RI. Oleh karena itu, pemerintah me-

ngirimkan pasukan TNI ke Makassar untuk meredakan ketegangan akibat banyaknya demonstrasi.

9. **Jawaban: a**

Pemberontakan RMS berkaitan dengan kebijakan pemerintah RIS yang ingin membubarkan negara-negara bagian dan menyatukannya dalam NKRI. Kebijakan tersebut sebagian ditolak oleh negara-negara bagian salah satunya Negara Indonesia Timur (NIT). Penolakan tersebut dipelopori oleh Christian Robert Steven Soumokil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur (NIT). Ia merasa tidak puas apabila NIT harus kembali menjadi bagian NKRI.

10. **Jawaban: d**

Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dideklarasikan pada 15 Februari 1958 oleh Letkol Ahmad Husein di Padang, Sumatra Barat. Pemberontakan tersebut dilatarbelakangi adanya kecemburuan pemerintah di daerah terhadap pemerintah pusat. Pemberontakan ini didukung oleh beberapa tokoh sipil seperti Syafruddin Prawiranegara dan Soemitro Djojohadikusumo. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh angka 2), 4), dan 5). Adapun keterangan angka 1) dan 3) tidak terkait dengan Gerakan 30 September 1965/PKI.

11. **Jawaban: b**

Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) dideklarasikan oleh Letkol Ventje Sumual, seorang pemimpin sipil dan militer Indonesia Timur pada 2 Maret 1957. Gerakan Permesta tersebar di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Gerakan ini berhasil merekrut para pelajar, mahasiswa, pemuda, dan mantan perwira KNIL sebagai pasukan dalam Angkatan Perang Permesta.

12. **Jawaban: e**

Pembentukan *Bijeenkomst voor Federal Overleg* (BFO) oleh van Mook berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa Indonesia karena adanya dua golongan yaitu, golongan federalis dan unitaris. Dalam perkembangannya, BFO dan pemerintah Republik Indonesia justru bersatu dalam pelaksanaan Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi ini diselenggarakan untuk menyamakan persepsi antara BFO dan Republik Indonesia menjelang pelaksanaan Konferensi Meja Bundar (KMB).

13. **Jawaban: a**

Pada 1960 pihak Permesta menyatakan kesediaannya berunding dengan pemerintah Republik Indonesia. Dalam perundingan tersebut Permesta diwakili Panglima Besar Angkatan Perang Permesta, Mayor Jenderal Alexander Evert Kawilarang. Adapun pemerintah Indonesia diwakili oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Nicolas Bondon. Perundingan tersebut mencapai sebuah kesepakatan bahwa pasukan Permesta akan membantu TNI dalam upaya menghadapi komunis di Pulau Jawa.

14. **Jawaban: e**

Jenderal Abdul Harris Nasution merupakan tokoh Angkatan Darat yang berperan dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Pada masa revolusi, A.H. Nasution bertugas sebagai Panglima Divisi Siliwangi. Pada 1948, A.H. Nasution diangkat sebagai Panglima Tentara dan Teritorial Djawa. Setelah perang berakhir, A.H. Nasution diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat selama dua periode (1949–1952 dan 1955–1962). Pascarevolusi ia kemudian menjabat sebagai Menteri Keamanan Nasional. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh angka 3) dan 4). Pernyataan pada angka 1) merupakan peran Ahmad Yani. Adapun pernyataan angka 2) merupakan peran Slamet Riyadi.

15. **Jawaban: c**

Pada Juli 1946 Frans Kaisiepo memelopori pembentukan Partai Indonesia Merdeka (PIM) di Biak. Ia juga terlibat dalam Konferensi Malino di Sulawesi Selatan. Dalam konferensi tersebut, Frans Kaisiepo menentang integrasi Papua ke dalam Negara Indonesia Timur (NIT). Ia juga mengusulkan mengganti nama Papua dan *Nederlands Nieuwe Guinea* dengan kata Irian. Kata Irian merupakan akronim dari Ikut Republik Indonesia Anti-Netherlands.

16. **Jawaban: b**

Silas Papare merupakan salah satu tokoh Papua yang turut menjaga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, Silas Papare turut berperan dalam membentuk Komite Indonesia Merdeka (KIM). Komite yang terbentuk pada September 1945 tersebut bertujuan menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

17. **Jawaban: a**

Sejak awal kemerdekaan, Sri Sultan Hamengku Buwono IX menyatakan bahwa Kesultanan Yogyakarta merupakan bagian dari Republik Indonesia. Bahkan, saat situasi Jakarta tidak kondusif, Sri Sultan Hamengku Buwono IX bersedia menjamin keamanan atas penyelenggaraan pemerintahan Indonesia di Yogyakarta. Sikap nasionalismenya juga ia tunjukkan dengan menolak tawaran Belanda untuk menjadi raja seluruh Jawa pasca-Agresi Militer II.

18. **Jawaban: c**

Ismail Marzuki merupakan tokoh yang berjuang menjaga integrasi Republik Indonesia melalui karya seni. Lagu-lagu Ismail Marzuki mampu menggugah semangat juang dan jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Hingga tahun 1950, Ismail Marzuki telah menciptakan berbagai lagu perjuangan yang menggugah semangat perjuangan. Lagu-lagu perjuangan yang diciptakan oleh Ismail Marzuki antara lain "Sepasang Mata Bola", "Halo-Halo Bandung", "Gugur Bunga", "Indonesia Pusaka", dan "Rayuan Pulau Kelapa".

19. **Jawaban: e**

Ahmad Yani merupakan tokoh militer dari Angkatan Darat yang berperan dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ahmad Yani pernah memimpin operasi militer untuk menumpas gerakan DI/TII di Jawa Barat. Dalam melaksanakan tugas ini, Ahmad Yani kemudian membentuk kesatuan yang dinamakan *The Banteng Raiders*. Selanjutnya, pada saat terjadi pemberontakan PRRI, Ahmad Yani merupakan pimpinan dari Operasi 17 Agustus untuk menumpas pemberontakan PRRI. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh pilihan e.

20. **Jawaban: b**

Slamet Riyadi merupakan prajurit yang gugur dalam operasi penumpasan gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) di benteng Victoria. Ia gugur saat usianya belum genap berusia 24 tahun. Perjuangan Slamet Riyadi tersebut menunjukkan bahwa ia merupakan pejuang sejati yang rela berkorban dalam perjuangan.

21. **Jawaban: a**

Ciri utama sistem parlementer adalah adanya jabatan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Sistem parlementer di Indonesia

pertama kali diterapkan pada awal kemerdekaan. Penerapan sistem tersebut ditandai dengan pembentukan kabinet kedua Republik Indonesia dengan Sutan Sjahrir sebagai perdana menteri.

22. **Jawaban: d**

Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (RERA) merupakan kebijakan yang dilatarbelakangi tidak adanya garis koordinasi yang tegas antara Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang. Pada masa Kabinet Moh. Hatta kebijakan ini difokuskan pada pengurangan atau penyederhanaan angkatan perang. Dalam perkembangannya para anggota angkatan perang yang tersingkir melalui kebijakan RERA direkrut oleh PKI sebagai sayap bersenjata.

23. **Jawaban: b**

Kabinet Ali Sastroamidjojo II dilantik pada 20 Maret 1956. Kabinet Ali Sastroamidjojo II terdiri atas koalisi PNI, Masyumi, dan NU. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh kombinasi **X1)**, **X2)**, dan **Y2)**. Adapun PKI, PSII, Murba menjadi partai oposisi dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo II.

24. **Jawaban: d**

Kabinet Wilopo merupakan koalisi antara PNI dan Masyumi. Kabinet Wilopo juga didukung oleh PSI dan PSII yang sebelumnya menjadi partai oposisi bersama PKI, Perti, Partai Buruh, Partai Murba, Permai, dan Partai Tani Indonesia. Dengan berpartisipasi PSI dan PSII dalam pemerintahan, aksi-aksi pemogokan oleh buruh dan partai oposisi yang sering terjadi pada masa pemerintahan Kabinet Sukiman menjadi terhenti dengan sendirinya.

25. **Jawaban: a**

Faktor utama yang menyebabkan jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo I adalah masalah pergantian pimpinan TNI AD yang dikenal sebagai peristiwa 27 Juni 1955. Calon pimpinan TNI yang diajukan Kabinet Ali ditolak oleh korps perwira, kelompok Zulkifli Lubis. Peristiwa ini menyebabkan parlemen mengajukan mosi tidak percaya terhadap menteri pertahanan. Akhirnya, pada 24 Juli 1955 Kabinet Ali mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno.

26. **Jawaban: e**

PNI merupakan salah satu partai politik terbesar pada masa Demokrasi Liberal. Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, PNI juga

berupaya didekati agar bersedia bergabung dalam kabinet. Akan tetapi, PNI menuntut hak untuk menunjuk sendiri orang-orang yang akan duduk dalam kabinet. Tuntutan ini tidak disetujui oleh Burhanuddin Harahap. Akhirnya, PNI memilih menjadi partai oposisi dalam pemerintahan.

27. **Jawaban: d**

Kabinet Sukiman merupakan kabinet dengan masa jabatan yang cukup singkat. Salah satu penyebab jatuhnya kabinet Sukiman adalah penandatanganan perjanjian *Mutual Security Act* (MSA) tanpa persetujuan parlemen. Penandatanganan yang dilakukan Menteri Luar Negeri, Ahmad Soebardjo dan Duta Besar Amerika Serikat, Merle Cochran dinilai telah melanggar politik luar negeri bebas aktif.

28. **Jawaban: c**

Kabinet Wilopo mulai bekerja sejak 30 Maret 1952. Berbagai permasalahan yang terjadi dalam Kabinet Wilopo sebagai berikut.

- 1) Krisis ekonomi karena merosotnya kegiatan ekspor dan impor yang semakin tidak terkendali.
- 2) Muncul gerakan separatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa.
- 3) Terjadi peristiwa 17 Oktober 1952, yaitu peristiwa perselisihan internal dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh angka 2), 3), dan 4).

29. **Jawaban: c**

Biro Perancang Negara merupakan lembaga yang terbentuk pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Biro Perancang Negara dibentuk dengan tujuan merencanakan pembangunan jangka pendek. Akan tetapi, Biro Perancang Negara tidak dapat bekerja optimal karena masa kerja kabinet yang terlalu singkat.

30. **Jawaban: b**

Badan Konstituante merupakan lembaga yang dibentuk pada pemilu 1955. Badan Konstituante bertugas merumuskan undang-undang dasar atau konstitusi baru. Kebutuhan tersebut perlu segera dipenuhi karena pada masa Demokrasi Liberal konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

31. **Jawaban: c**

Pada awal kemerdekaan pemerintah Republik Indonesia menghadapi satu masalah yaitu kekosongan kas negara. Pemerintah kemudian menerapkan kebijakan pinjaman nasional yang dicetuskan oleh Menteri Keuangan Ir. Surachman. Dari kebijakan tersebut pemerintah mendapat uang sejumlah Rp500.000.000,00.

32. **Jawaban: a**

Pemerintah mengambil beberapa kebijakan untuk mengatasi blokade ekonomi Belanda. Kebijakan tersebut yaitu membentuk Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPULN), membentuk *Indonesia Office* (Indoff) di Singapura, melaksanakan operasi POPDA dan APWI, melakukan diplomasi beras ke India, serta membentuk *Banking and Trading Company*. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh angka 1) 2), dan 3). Adapun kebijakan angka 4) dilakukan untuk mengatasi inflasi. Kebijakan angka 5) bertujuan merumuskan sistem ekonomi nasional.

33. **Jawaban: a**

Pada periode tahun 1950-an, bangsa Indonesia berusaha menciptakan sistem ekonomi baru yang akan menjadi landasan kehidupan ekonomi bangsa. Akan tetapi, untuk mewujudkan sistem ekonomi baru tersebut, bangsa Indonesia masih menemukan hambatan yaitu sistem ekonomi kolonial yang masih mengakar kuat. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia dan aktivitas perekonomian yang didominasi para pedagang Tionghoa.

34. **Jawaban: e**

Soemitro Djojohadikusumo identik dengan sistem ekonomi Gerakan Benteng. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan sistem ekonomi nasional dan bertujuan membangun kewirausahaan pribumi agar mampu membentengi perekonomian negara Indonesia. Pada praktiknya sistem ini cukup berhasil. Hal tersebut dibuktikan pada 1955, sekira 70% perdagangan impor dilakukan oleh pengusaha pribumi.

35. **Jawaban: b**

Gerakan Assaat memberikan perlindungan khusus bagi warga negara Indonesia asli dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian.

Dukungan dari pemerintah terhadap gerakan ini ditunjukkan dengan pemberian lisensi khusus bagi para pengusaha pribumi. Dalam perkembangannya, kebijakan pemerintah ini memunculkan reaksi negatif. Reaksi negatif tersebut yaitu muncul golongan yang membenci kalangan Tionghoa.

B. Uraian

1. Jawaban:

Pemberontakan APRA berkaitan erat dengan Sultan Hamid II. Sultan Hamid II merupakan tokoh yang diajukan Belanda untuk menjadi menteri pertahanan RIS. Akan tetapi, permintaan tersebut ditolak oleh pemerintah RIS dan jabatan menteri pertahanan diberikan kepada Sultan Hamengku Buwono IX. Keterlibatan Sultan Hamid II dalam pemberontakan APRA semakin menguat setelah munculnya rencana penculikan terhadap sejumlah menteri dalam kabinet RIS yang didalangi oleh Sultan Hamid II.

2. Jawaban:

Beberapa saat setelah pemerintah mendengar aksi penculikan dan pembunuhan atas petinggi TNI-AD, sejumlah perwira antikomunis melancarkan serangan balik di bawah pimpinan panglima Kostrad Mayjen Soeharto. Kostrad mengerahkan pasukan RPKAD untuk menumpas pemberontakan G 30 S/PKI pada 1 Oktober 1965. Pasukan RPKAD berhasil menduduki kembali gedung RRI pusat dan gedung Telkom yang sebelumnya dikuasai pemberontak G 30 S/PKI.

3. Jawaban:

Pada 8 April 1950 pemerintah memberi ultimatum kepada Andi Aziz. Dalam ultimatum tersebut Andi Aziz diminta melapor dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam waktu 4 × 24 jam di Jakarta. Pada saat bersamaan pemerintah RI mengirim pasukan untuk melakukan operasi militer di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kolonel Alexander Evert Kawilarang. Di bawah pimpinannya, pasukan APRIS berhasil memukul mundur pasukan KNIL ke luar Makassar.

4. Jawaban:

Republik Indonesia Serikat (RIS) merupakan bentuk negara yang disepakati dalam Konferensi Meja Bundar. Pembentukan RIS juga menandai berakhirnya konflik antara Indonesia-Belanda yang telah berlangsung sejak awal kemerdekaan. Meskipun demikian, Belanda tetap berusaha

menanamkan pengaruhnya dalam RIS. Salah satu upaya yang dilakukan Belanda dengan mendesak pemerintah RIS mengangkat Sultan Hamid II sebagai Menteri Pertahanan RIS. Selain itu, Belanda mendukung kelompok-kelompok yang ingin mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia.

5. Jawaban:

Marthen Indey merupakan salah satu tokoh yang menginginkan integrasi Papua menjadi bagian Indonesia. Keinginannya tersebut ditunjukkan dengan memimpin aksi protes yang didukung delegasi dua belas kepala suku di Papua. Aksi protes ini dilakukan untuk menolak rencana pemisahan Papua dari wilayah Indonesia. Marthen Indey juga membujuk anggota militer yang bukan orang Belanda untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda.

6. Jawaban:

Sistem parlementer merupakan sistem yang diterapkan pada masa Demokrasi Liberal. Pada sistem tersebut presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan. Kegiatan pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri. Adapun perdana menteri dan kabinet bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Dengan demikian, kabinet yang berkuasa harus memiliki dukungan parlemen.

7. Jawaban:

Masa Demokrasi Liberal di Indonesia diwarnai dengan penerapan sistem multipartai. Sistem ini ditandai dengan keberadaan berbagai partai dengan ideologi yang berlainan. Hal tersebut kemudian turut menjadi salah satu penyebab sering terjadinya pergantian kabinet. Partai-partai besar biasanya dominan dalam format kabinet karena sebuah kabinet harus mendapat dukungan mayoritas parlemen. Sebuah kabinet yang tidak didukung mayoritas parlemen harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.

8. Jawaban:

Inflasi yang terjadi pada awal kemerdekaan disebabkan oleh peredaran mata uang Jepang yang tidak terkendali. Kondisi tersebut tidak diiringi dengan ketersediaan barang di berbagai daerah sehingga mendorong terjadinya hiperinflasi. Selain itu, pemerintah Indonesia belum memiliki mata uang baru sebagai penggantinya. Oleh karena itu, pada 1 Oktober 1946 pemerintah

mengeluarkan uang kertas, yaitu *Oeang Repoeblik Indonesia* (ORI). Keberadaan ORI kemudian diikuti dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946 untuk mengatur kurs mata uang Jepang terhadap ORI.

9. **Jawaban:**

Sejak 1957 nasionalisasi perusahaan asing yang dilakukan pemerintah terbagi dalam dua tahap. *Pertama*, tahap pengambilalihan, penyitaan, dan penguasaan atau sering disebut "di bawah pengawasan". *Kedua*, pemerintah mulai mengambil keijakan yang pasti yakni perusahaan-perusahaan yang diambil alih kemudian dinasionalisasikan. Tahap ini dimulai pada 1958 dengan dikeluarkannya undang-undang tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia. Perusahaan-perusahaan

yang dinasionalisasi pada masa Demokrasi Liberal antara lain *De Javasche Bank* menjadi Bank Indonesia, *Korinklik Indische Lachvaart Mastchapij* (KNILM) menjadi Garuda Indonesia Airways.

10. **Jawaban:**

Ketidakstabilan politik pada masa Demokrasi Liberal ditandai dengan sering terjadinya pergantian kabinet. Kondisi tersebut kemudian juga berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Pada setiap kabinet tentu memiliki program kerja yang berkaitan dengan perekonomian. Akan tetapi, program kerja tersebut tidak mampu berjalan dengan optimal karena usia kabinet yang relatif singkat. Hal tersebut kemudian berdampak pada terpuruknya perekonomian Indonesia pada masa Demokrasi Liberal.



Dinamika Politik–Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965)

A. Dinamika Politik pada Masa Demokrasi Terpimpin

Uji Kompetensi 1

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: b**

Kepentingan negara dan kepentingan partai politik dalam pemerintahan harus dibedakan. Konsep ini diterapkan tokoh-tokoh bangsa pada masa Demokrasi Terpimpin. Saat menjadi anggota Kabinet Kerja, Subandrio dan J. Leimena mengundurkan diri dari partai politik. Dalam menjalankan Kabinet Kerja, Presiden Soekarno mengharuskan menteri-menterinya mengundurkan diri dari partai politik untuk memberi tekanan pada sifat nonpartai dari pemerintahan baru tersebut. Dengan begitu, seorang menteri mampu menjalankan pemerintahan secara efektif tanpa terikat kepentingan partai politik.

2. **Jawaban: b**

Gambar pada soal adalah peristiwa pembacaan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Peristiwa tersebut menandai dimulainya masa Demokrasi Terpimpin. Peristiwa tersebut mendapat tanggapan positif. Rakyat Indonesia pun menyambut baik pembacaan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Tanggapan tersebut muncul karena sudah lama rakyat mendambakan stabilitas nasional yang belum tercapai pada periode sebelumnya.

3. **Jawaban: c**

Pembacaan Dekret Presiden 5 Juli 1959 dilatarbelakangi faktor-faktor berikut.

- 1) Ketidakstabilan politik Indonesia sejak pelaksanaan pemilu 1955 hingga tahun 1959.
- 2) Hingga tahun 1959 Konstituante belum berhasil merumuskan undang-undang dasar untuk menggantikan UUD 1945.

- 3) Presiden Soekarno mendesak agar Konstituante memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh pasangan **A2), B2), dan B3)**.

4. **Jawaban: c**

Pada 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959 mengenai Syarat-Syarat Penyederhanaan Kepartaian. Berdasarkan peraturan tersebut pemerintah menyederhanakan jumlah partai politik hanya menjadi sembilan partai saja. Partai-partai yang diakui pemerintah antara lain IPKI, Partai Murba, Partai Katolik, PSII, PNI, NU, PKI, Perti, dan Partindo.

5. **Jawaban: b**

Presiden Soekarno mendapat dukungan dari tiga kekuatan besar pada masa Demokrasi Terpimpin. Ketiga kekuatan tersebut, yaitu komunis, agama, dan nasionalis. Ketiga kekuasaan tersebut menjadi kekuatan Presiden Soekarno dalam mempertahankan kekuasaan. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh angka **1), 3), dan 4)**.

6. **Jawaban: c**

Presiden membentuk MPRS berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959. Tindakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga tertinggi negara harus melalui pemilihan umum. Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh presiden dengan syarat setuju kepada manifesto politik.

7. **Jawaban: d**

Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 1958 merupakan sumber hukum yang mengatur mengenai pengambilalihan (nasionalisasi) perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Adapun nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia dilakukan sejak Desember 1958. Beberapa perusahaan Belanda yang dinasionalisasi antara lain perusahaan penerbangan komersial Belanda (KLM) dan *Nederlandsche Handels Maatschappij*.

8. **Jawaban: c**

Trikorra diumumkan Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 untuk menggerakkan rakyat dalam mendukung perjuangan pembebasan Irian Barat dari Belanda. Menyikapi hal tersebut, rakyat mendaftar menjadi relawan untuk bergabung dalam misi pembebasan Irian Barat. Kondisi tersebut menunjukkan rakyat Indonesia mendukung sepenuhnya pembebasan Irian Barat.

9. **Jawaban: d**

Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat diselenggarakan atas anjuran PBB. Pepera dilaksanakan pada 14 Juli 1969 sampai 4 Agustus 1969. Pelaksanaan Pepera diatur oleh Brigjen Sarwo Edhi Wibowo. Adapun perwakilan PBB Fernando Ortis Sanz ikut mengawasi jalannya pelaksanaan Pepera.

10. **Jawaban: b**

Pada awalnya PBB menghendaki agar pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) menggunakan metode *one man one vote* atau satu orang satu suara. Akan tetapi, pemerintah Indonesia menolak anjuran tersebut dan lebih memilih menggunakan metode *many man one vote* atau banyak orang satu suara. Metode tersebut diterapkan karena dianggap lebih sesuai dengan budaya demokrasi di Indonesia, yaitu musyawarah mufakat.

11. **Jawaban: c**

Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) merupakan konsekuensi yang harus dilakukan pemerintah Indonesia pasca-Persetujuan New York. Pada 1 Mei 1963 wilayah Irian Barat secara resmi diserahkan kepada pemerintah Indonesia oleh PBB melalui UNTEA. Selanjutnya, pemerintah Indonesia harus melaksanakan Pepera untuk memberi kesempatan kepada rakyat Irian Barat

menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hasil Pepera, akhirnya wilayah Irian Barat diakui sebagai wilayah Republik Indonesia.

12. **Jawaban: b**

Konfrontasi dengan Malaysia berawal dari ketidaksetujuan pemerintah Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia. Indonesia menganggap pembentukan Federasi Malaysia sebagai proyek neokolonialisme Inggris. Proyek ini membahayakan Indonesia dan negara-negara blok Nefo.

13. **Jawaban: d**

Pada 1961 Inggris membentuk Komisi Cobbold sebagai persiapan pembentukan Federasi Malaysia. Anggota Komisi Cobbold, yaitu Sir Anthony Abell, Sir David Natherson, Dato Wong Po Nee, dan Enche Gazali Shafie. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh kombinasi **X2), Y2), dan Y3)**. Adapun Ellsworth Bunker merupakan tokoh pengusul agar rakyat Irian Barat diberi kesempatan menentukan pendapatnya untuk ikut Indonesia atau memisahkan diri. Fernand Ortis Sanz merupakan perwakilan PBB yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pepera di Irian Barat. Diosdado Macapagal merupakan Presiden Filipina yang mencetuskan gagasan Maphilindo.

14. **Jawaban: b**

Pada 3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengumumkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) yang berisi sebagai berikut.

- 1) Perhebat ketahanan Revolusi Indonesia.
- 2) Bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari Neokolonialisme Inggris.

Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh pilihan **1) dan 3)**.

15. **Jawaban: e**

Keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB merupakan salah satu dinamika politik luar negeri pada masa Demokrasi Terpimpin. Peristiwa tersebut berkaitan erat dengan konfrontasi Indonesia–Malaysia. Akibat konfrontasi tersebut, pada 7 Januari 1965 Indonesia memutuskan keluar dari keanggotaan PBB. Keputusan ini kemudian disampaikan secara resmi oleh Menteri Luar Negeri Subandrio pada 20 Januari 1965. Keputusan keluar dari PBB ini diambil karena PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

1. **Jawaban:**

Istilah Demokrasi Terpimpin digunakan pada periode 1959–1965 karena pelaksanaan demokrasi pada saat itu berpusat pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Sistem Demokrasi Terpimpin berusaha mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil sebagai warisan masa Demokrasi Liberal. Corak politik yang muncul pada masa Demokrasi Terpimpin antara lain aktivitas partai politik yang dibatasi dan presiden cenderung memiliki kekuasaan mutlak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

2. **Jawaban:**

Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959 berisi ketentuan sebagai berikut.

- Menerima dan membela UUD 1945 dan Pancasila.
- Menggunakan cara-cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politiknya.
- Menerima bantuan luar negeri hanya seizin pemerintah.
- Partai politik setidaknya harus memiliki cabang di seperempat wilayah Indonesia.
- Presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai.
- Presiden berhak membubarkan partai yang terindikasi berusaha merongrong politik pemerintah dan mendukung usaha pemberontakan.

3. **Jawaban:**

Dalam penyelesaian masalah pembebasan Irian Barat dari Belanda, Ellsworth Bunker berperan sebagai penengah perundingan antara Indonesia dan Belanda. Selain itu, Ellsworth Bunker mengusulkan Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui suatu badan pemerintahan PBB, yaitu UNTEA. Ia juga mengusulkan rakyat Irian Barat diberi kesempatan menentukan pendapatnya antara berada dalam wilayah Republik Indonesia atau memisahkan diri.

4. **Jawaban:**

Pembentukan Federasi Malaysia yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin merupakan latar belakang konfrontasi Indonesia–Malaysia. Presiden Soekarno menganggap pembentukan Federasi Malaysia sebagai proyek neokolonialisme Inggris. Oleh karena itu, Presiden Soekarno menolak pembentukan Federasi Malaysia karena dianggap dapat membahayakan Indonesia dan negara-negara Nefo.

5. **Jawaban:**

Pada 7 Januari 1965 Indonesia memutuskan keluar dari keanggotaan PBB. PBB merupakan salah satu lembaga penting bagi bangsa-bangsa di dunia. PBB juga berperan sebagai forum konsultasi bagi hampir seluruh negara di dunia. Oleh karena itu, keputusan keluar dari keanggotaan PBB menyebabkan Indonesia kehilangan media yang dapat digunakan untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya di forum internasional.

B. Dinamika Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin

Uji Kompetensi 2

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: c**

Dalam sistem Ekonomi Terpimpin, pemerintah berusaha mengawasi proses produksi dan distribusi yang vital bagi perekonomian. Pemerintah juga menempatkan masalah kepemilikan aset nasional sebagai masalah strategis nasional. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengambil alih aset-aset negara yang dimiliki oleh perusahaan asing. Upaya tersebut

dilakukan dengan cara menasionalisasi perusahaan asing. Melalui cara tersebut, diharapkan pemerintah mampu memegang kendali atas aset-aset milik negara yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

2. **Jawaban: a**

Untuk mendukung program Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang dicanangkan oleh Presiden Soekarno, pemerintah berupaya memaksimalkan badan-badan usaha milik negara

(BUMN). Keberadaan BUMN diharapkan menjadi tonggak perekonomian Indonesia. Selain itu, pemerintah meningkatkan peranan koperasi. Salah satu koperasi yang dikembangkan adalah koperasi tani (koperta) sebagai landasan pokok pembangunan ekonomi Indonesia. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh pilihan **a**.

3. **Jawaban: d**

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1959 merupakan peraturan yang dikeluarkan untuk mendukung program Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang dicanangkan oleh Presiden Soekarno. Peraturan tersebut berisi ketentuan bahwa semua perusahaan milik pengusaha Tionghoa dialihkan ke koperasi. Pengalihan usaha ke koperasi dilakukan untuk menggantikan jalur distribusi yang semula dikuasai oleh pengusaha Tionghoa.

4. **Jawaban: c**

Pembentukan Badan Musyawarah Pengusaha Swasta Nasional (Bamunas) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1964. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa Bamunas bertugas membimbing dan menggerakkan pengusaha swasta nasional untuk menyelesaikan revolusi nasional.

5. **Jawaban: a**

Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin. Depernas dibentuk oleh Kabinet Kerja pada 15 Agustus 1959 berdasarkan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958. Depernas dibentuk untuk mempercepat pembangunan nasional.

6. **Jawaban: c**

Depernas berhasil menyusun rancangan dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Sementara Berencana Tahun 1961–1969. Pola Pembangunan Semesta Berencana terdiri atas *blueprint* tripola, yaitu pola proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan, dan pola pembiayaan pembangunan yang hendak dilaksanakan secara konsekuen dalam waktu 5–7 tahun. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh kombinasi **A2), A3), dan B1)**.

7. **Jawaban: e**

Pada 1959 terjadi kekacauan politik yang bersamaan dengan kekacauan ekonomi sehingga menimbulkan inflasi. Dalam rangka membendung inflasi, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959. Pemerintah mengeluarkan peraturan ini untuk mengurangi banyaknya uang beredar serta memperbaiki keuangan dan perekonomian negara.

8. **Jawaban: c**

Dalam rangka membendung inflasi pada masa Demokrasi Terpimpin, pemerintah melakukan beberapa upaya sebagai berikut.

- 1) Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959.
- 2) Membekukan semua simpanan pada bank-bank yang bertujuan mengurangi banyaknya uang yang beredar.
- 3) Menginstruksikan penghematan bagi instansi pemerintah serta memperketat pengawasan pelaksanaan anggaran belanja.

Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh angka **2), 3), dan 5)**.

9. **Jawaban: c**

Pelaksanaan Peraturan 26 Mei dalam Deklarasi Ekonomi ditunda disebabkan oleh faktor berikut.

- 1) PKI mengkritik Peraturan 26 Mei yang diterapkan dalam Deklarasi Ekonomi karena dianggap lebih menguntungkan kaum imperialis.
- 2) PKI berpendapat penerapan Peraturan 26 Mei akan menyebabkan kenaikan tarif listrik dan angkutan umum.
- 3) Pemerintah sedang berkonsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia.

Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh kombinasi **X2), Y1), dan Y2)**.

10. **Jawaban: a**

Tokoh pada gambar soal adalah Jusuf Muda Dalam. Ia merupakan Menteri Urusan Bank Sentral yang ditunjuk Presiden Soekarno untuk mengelola Dana Revolusi. Untuk menghimpun dan menggunakan Dana Revolusi, Jusuf Muda Dalam memanfaatkan devisa kredit sebagai *deffered payment*.

B. Uraian

1. Jawaban:

Sistem Ekonomi Terpimpin mulai diterapkan sejak Presiden Soekarno membacakan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dalam Sistem Ekonomi Terpimpin peran pemerintah dalam kebijakan ekonomi semakin besar. Selain itu, pemerintah meningkatkan peranan koperasi, termasuk koperasi-koperasi tani (koperta) sebagai landasan pokok membangun ekonomi. Dalam sistem ekonomi ini, perusahaan swasta juga ditetapkan oleh pemerintah sebagai perusahaan yang mengelola bidang usaha yang tidak bersifat esensial.

2. Jawaban:

Dalam rangka mengambil alih penguasaan ekonomi oleh negara dari tangan pengusaha asing, pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan asing, terutama milik para pengusaha Belanda. Pemerintah menargetkan mampu menasionalisasi 80% aset perusahaan Belanda. Akan tetapi, dalam praktiknya pemerintah hanya mampu menasionalisasi sekira 20% karena para pemilik perusahaan sudah terlebih dahulu menarik modalnya dari Indonesia.

3. Jawaban:

Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai berikut.

- Menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan pembangunan.
- Mengawasi dan menilai laporan pelaksanaan pembangunan.
- Menyiapkan dan menilai hasil kerja mendataris untuk MPRS.

4. Jawaban:

Pada dasarnya Deklarasi Ekonomi memperhatikan berbagai prioritas perekonomian seperti mendorong usaha swasta, memperbesar produksi perolehan devisa, serta memberikan insentif kepada pihak pengusaha swasta yang berhasil menaikkan nilai ekspor dan impor. Akan tetapi, upaya tersebut mengalami kegagalan karena pemerintah gagal memperoleh pinjaman dana dari *International Monetary Fund* (IMF).

5. Jawaban:

Kebijakan Dana Revolusi diperoleh dari devisa kredit jangka panjang (*deffered payment*). Hasil pengumpulan Dana Revolusi digunakan untuk membiayai proyek-proyek mandataris presiden. Keberadaan proyek-proyek ini tentu mengorbankan kondisi ekonomi dalam negeri. Akibatnya, utang-utang negara semakin meningkat, dan kegiatan ekspor semakin menurun. Selain itu, tingkat inflasi menunjukkan kenaikan yang semakin tidak terkendali.

Penilaian Harian

A. Pilihan Ganda

1. Jawaban: a

Pada awal Juli 1959 Presiden Soekarno melakukan pertemuan dengan Ketua DPR Sartono, Perdana Menteri Djuanda, Ruslan Abdulgani, dan Muh. Yamin. Pertemuan tersebut menyepakati untuk memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi negara, tanpa persetujuan Konstituante. Pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan pembacaan Dekret Presiden 5 Juli 1959.

2. Jawaban: b

Dekret Presiden 5 Juli 1959 berisi tiga permasalahan pokok berikut.

- Pembubaran Konstituante.
- Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945.
- Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang terdiri atas anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh angka 1), 3), dan 4).

3. **Jawaban: e**

Kabinet Kerja merupakan kabinet yang dibentuk sebagai pengganti Kabinet Djuanda. Dalam Kabinet Kerja, tidak satu pun menteri berasal dari ketua umum partai politik. Untuk memberi tekanan pada sifat nonpartai dalam pemerintahan baru tersebut, beberapa menteri seperti Subandrio dan J. Leimena menyatakan keluar dari partai mereka. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaruh kepentingan partai politik dalam kabinet pada masa ini semakin berkurang.

4. **Jawaban: a**

Nasakom merupakan singkatan dari Nasionalis, Agama, dan Komunis. Bagi Presiden Soekarno, Nasakom merupakan cerminan paham berbagai golongan dalam masyarakat. Presiden Soekarno yakin bahwa dengan menerima dan melaksanakan Nasakom, persatuan Indonesia akan terwujud. Ajaran Nasakom mulai disebarkan kepada masyarakat. Pelaksanaan ajaran Nasakom sama dengan upaya memperkuat kedudukan presiden karena jika menolak ajaran Nasakom sama saja dengan menolak presiden.

5. **Jawaban: a**

Pada masa Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno memperkenalkan ajaran Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional (Resopim). Tujuan ajaran ini adalah memperkuat kedudukan Presiden Soekarno dalam pemerintahan. Ajaran Resopim diumumkan pada 17 Agustus 1961. Inti ajaran ini adalah seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, dijiwai oleh sosialisme, dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yang disebut Panglima Besar Revolusi (PBR), yaitu Presiden Soekarno. Dampak sosialisasi Resopim adalah kedudukan lembaga tinggi dan tertinggi negara ditetapkan di bawah presiden. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh pilihan a.

6. **Jawaban: a**

Setelah pembacaan Dekret Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menunjukkan kekuatan besarnya. Presiden mengangkat anggota MPRS yang terdiri atas anggota DPR dan DPAS. Kebijakan ini tentu saja menyimpang dari ketentuan UUD 1945 yang menyatakan bahwa posisi presiden di bawah lembaga permusyawaratan rakyat dan sejajar dengan lembaga perwakilan rakyat serta lembaga tinggi negara.

Adapun pada masa Demokrasi Terpimpin, kedudukan presiden berada di atas lembaga-lembaga tersebut.

7. **Jawaban: b**

Banyak penyimpangan terhadap UUD 1945 yang dilakukan Presiden Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin. Salah satunya adalah pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu tahun 1955 melalui Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1960. Tindakan tersebut menyimpang dari UUD 1945 karena DPR adalah lembaga yang terbentuk dari hasil pemilu dan menjadi representasi suara rakyat.

8. **Jawaban: d**

Konfrontasi politik pemerintah Indonesia terhadap Belanda dalam penyelesaian masalah Irian Barat dilakukan dengan cara berikut.

- 1) Pada 1956 Indonesia membatalkan hasil Konferensi Meja Bundar secara sepihak yang dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956.
- 2) Kabinet Ali Sastroamidjojo membentuk pemerintahan sementara Irian Barat pada 17 Agustus 1956.
- 3) Kabinet Burhanuddin Harahap membubarkan Uni Indonesia–Belanda secara sepihak.
- 4) Pada 4 Januari 1958 pemerintah membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB).

Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh angka 2) dan 4).

9. **Jawaban: d**

Peristiwa pada gambar adalah pengumuman Tiga Komando Rakyat (TriKora) oleh Presiden Soekarno di Yogyakarta pada 19 Desember 1961. Adapun isi TriKora sebagai berikut.

- 1) Gagalakan pembentukan "Negara Boneka Papua" buatan Belanda.
- 2) Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia.
- 3) Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Peristiwa tersebut dilakukan untuk menggerakkan rakyat Indonesia sebagai pendukung usaha pengembalian Irian Barat. Peristiwa tersebut menjadi puncak konfrontasi antara Indonesia dan Belanda.

10. **Jawaban: e**

Dalam usulan yang diajukan Ellsworth Bunker, wilayah Irian Barat akan diserahkan kepada Indonesia dengan perantara PBB, yaitu *United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA) dalam jangka waktu dua tahun. Ia juga mengusulkan supaya rakyat Irian Barat diberi kesempatan menentukan pendapatnya supaya tetap berada dalam wilayah Republik Indonesia atau memisahkan diri. Pemerintah Indonesia menyatakan sanggup menerima usulan tersebut. Tindakan tersebut dilakukan karena Belanda telah menunda penyelesaian masalah Irian Barat.

11. **Jawaban: d**

Isi Persetujuan New York antara lain selambat-lambatnya tanggal 1 Oktober 1962 Belanda menyerahkan Irian Barat kepada *United Nation Temporary Executive Authority* (UNTEA); angkatan perang Belanda berangsur-angsur dipulangkan, antara Irian Barat dan daerah di Indonesia berlaku lalu lintas bebas, serta penyerahan kekuasaan di Irian Barat kepada Indonesia dilakukan selambat-lambatnya pada 1 Mei 1963. Jadi, pilihan yang tepat ditunjukkan oleh pernyataan angka 2) dan 4).

12. **Jawaban: d**

Sebagai reaksi terhadap pembentukan Federasi Malaysia, Presiden Soekarno mencetuskan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) pada 3 Mei 1964. Dwikora berisi perhebat ketahanan Revolusi Indonesia dan bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari Nkolim Inggris. Untuk menindaklanjuti pelaksanaan Dwikora, Presiden Soekarno membentuk Komando Operasi Tertinggi dan Komando Mandala Siaga. Kedua pasukan tersebut bertugas menyelenggarakan operasi militer dalam rangka mempertahankan kedaulatan wilayah Indonesia.

13. **Jawaban: d**

Politik mercusuar merupakan politik untuk mencari kemegahan/keindahan dalam pergaulan antarbangsa di dunia. Politik tersebut diwujudkan dengan mendirikan bangunan-bangunan megah yang menghabiskan biaya miliaran rupiah. Bangunan-bangunan hasil politik mercusuar antara lain Monumen Nasional, masjid Istiqlal, stadion Gelora Bung Karno, jembatan Semanggi,

gedung PMI Jakarta, patung Selamat Datang, Hotel Indonesia, dan pusat perbelanjaan Sarinah. Jadi, jawaban yang tepat terdapat pada pilihan d.

14. **Jawaban: e**

Keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB berkaitan erat dengan konfrontasi Indonesia–Malaysia. PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada 7 Januari 1965. Kebijakan PBB tersebut langsung direspons oleh Presiden Soekarno dengan menyatakan Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB disampaikan melalui surat resmi oleh Menteri Luar Negeri, Subandrio pada 20 Januari 1965 kepada Sekretaris Jenderal PBB, U Thant.

15. **Jawaban: d**

Salah satu upaya pemerintah mewujudkan sistem ekonomi nasional adalah menasionalisasi aset-aset perusahaan Belanda di Indonesia. Dalam perencanaannya, pemerintah menargetkan mampu menasionalisasi 80% aset perusahaan-perusahaan Belanda. Dalam praktiknya, pemerintah hanya mampu menasionalisasi sekira 20%. Ketidakmampuan ini disebabkan para pemilik perusahaan sudah terlebih dahulu menarik modalnya dari Indonesia. Dengan demikian, kebijakan nasionalisasi perusahaan Belanda mengalami kegagalan.

16. **Jawaban: e**

Pemerintah berupaya meningkatkan peranan koperasi untuk mendukung Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang dicanangkan oleh Presiden Soekarno. Salah satu koperasi yang dikembangkan adalah koperasi tani (koperta). Koperta berfungsi sebagai landasan pokok pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya memperbaiki ekonomi rakyat. Dengan demikian, peran koperta sama dengan perusahaan negara sebagai alat dalam sistem Ekonomi Terpimpin.

17. **Jawaban: d**

Karakteristik sistem Ekonomi Terpimpin sebagai berikut.

- 1) Peran pemerintah dalam kebijakan ekonomi semakin besar.
- 2) Pemerintah meningkatkan peranan koperasi, termasuk koperasi-koperasi tani (koperta) sebagai landasan pokok membangun ekonomi, khususnya untuk memperbaiki ekonomi rakyat.

- 3) Perusahaan swasta juga ditetapkan oleh pemerintah sebagai perusahaan yang mengelola bidang usaha yang tidak bersifat esensial.

Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh angka 2), 4), dan 5).

18. **Jawaban: b**

Tokoh pada gambar soal adalah Muhammad Yamin. Pada masa Demokrasi Terpimpin Muhammad Yamin berperan sebagai pemimpin Dewan Perancang Nasional (Depernas). Depernas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958. Depernas dibentuk untuk mempercepat pembangunan nasional.

19. **Jawaban: c**

Pada 15 Agustus 1959 Kabinet Kerja membentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas). Depernas dibentuk untuk mempercepat pembangunan nasional. Adapun tugas Depernas sebagai berikut.

- 1) Mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional.
- 2) Menilai penyelenggaraan pembangunan.

Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh angka 1) dan 4). Adapun pernyataan angka 2) dan 3) merupakan tugas dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

20. **Jawaban: d**

Dewan Perancang Nasional (Depernas) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958 dan dipimpin Muhammad Yamin. Depernas bertugas mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional serta menilai penyelenggaraan pembangunan. Salah satu keberhasilan Depernas adalah menyusun program kerja berupa pola pembangunan nasional yang disebut Pola Pembangunan Semesta dan Berencana.

21. **Jawaban: a**

Pada 24 Agustus 1959 pemerintah menetapkan kebijakan devaluasi mata uang rupiah. Bentuk kebijakan devaluasi pada masa Demokrasi Terpimpin sebagai berikut.

- 1) Mata uang pecahan bernilai Rp500,00 berubah menjadi Rp50,00.
- 2) Mata uang pecahan bernilai Rp1.000,00 berubah menjadi Rp100,00.

- 3) Mata uang pecahan Rp100,00 ke bawah tidak didevaluasi.

Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh pilihan a.

22. **Jawaban: b**

Pada 28 Maret 1963 Presiden Soekarno meresmikan Deklarasi Ekonomi dengan tujuan berikut.

- 1) Menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme.
- 2) Mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.

23. **Jawaban: b**

Deklarasi Ekonomi (Dekon) merupakan strategi dasar ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan Ekonomi Terpimpin. Deklarasi Ekonomi pada dasarnya memperhatikan berbagai prioritas perekonomian sebagai berikut.

- 1) Mendorong usaha swasta.
- 2) Memperbesar perolehan devisa.
- 3) Memberikan insentif kepada pengusaha swasta yang berhasil menaikkan nilai ekspor dan impor.

Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh kombinasi X1), X2), dan Y2).

24. **Jawaban: d**

Pelaksanaan proyek mercusuar (mandataris) pada masa Demokrasi Terpimpin menyebabkan pembengkakan anggaran belanja negara. BUMN yang awalnya diharapkan menjadi penopang ekonomi negara justru mengalami stagnasi. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 018 Tahun 1964 dan Keputusan Presiden Nomor 360 Tahun 1964 yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai perhimpunan dan penggunaan Dana Revolusi.

25. **Jawaban: b**

Dana Revolusi diperoleh dari devisa kredit jangka panjang (*deffered payment*). Jusuf Muda Dalam selaku Menteri Negara Bank Sentral melakukan pungutan terhadap perusahaan atau perseorangan yang mendapat fasilitas kredit antara 250 juta hingga 1 miliar rupiah. Perusahaan atau perseorangan tersebut diharuskan membayar dengan valuta asing sesuai jumlah yang telah ditetapkan. Hasil pengumpulan Dana Revolusi digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang bersifat prestise dengan mengorbankan kondisi ekonomi dalam negeri.

B. Uraian

1. **Jawaban:**

Pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam Konsep Presiden 1957 sebagai berikut.

- a. Pemberlakuan sistem Demokrasi Terpimpin yang didukung oleh kekuatan politik yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Langkah ini dilakukan untuk memperbarui struktur politik bangsa Indonesia.
- b. Pembentukan Kabinet Gotong Royong berdasarkan pertimbangan kekuatan masyarakat. Kabinet tersebut terdiri atas wakil-wakil partai politik dan kekuatan politik baru yang disebut golongan karya.

2. **Jawaban:**

Pada masa Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno mencetuskan ideologi Nasakom. Keberadaan ideologi Nasakom tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh PKI untuk meyakinkan Soekarno bahwa PKI mendukung kebijakan pemerintah. Selain itu, melalui ideologi ini PKI berusaha mencari dukungan politik dari masyarakat. Beberapa strategi yang diterapkan PKI antara lain mengutip slogan-slogan Nasakom. PKI juga mengutip berbagai pidato Presiden Soekarno agar masyarakat seolah-olah sejalan dengan gagasan PKI. Berbagai upaya PKI tersebut berhasil meraih simpati, Presiden Soekarno memberi porsi kepada PKI dalam kabinet.

3. **Jawaban:**

Politik mercusuar merupakan politik untuk membangun kemegahan/keindahan dalam pergaulan antarbangsa di dunia. Politik mercusuar dijalankan Presiden Soekarno karena menganggap Indonesia sebagai mercusuar yang mampu menerangi jalan negara-negara Nefo. Pelaksanaan politik mercusuar dilakukan dengan cara membuat bangunan-bangunan megah dan fenomenal seperti stadion Gelora Bung Karno, patung Selamat Datang, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, Monumen Nasional, dan masjid Istiqlal.

4. **Jawaban:**

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 dengan tujuan mengurangi banyaknya uang beredar serta memperbaiki keuangan dan perekonomian negara. Dampak kebijakan ini adalah pemerintah membekukan semua simpanan pada bank-bank untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar. Pemerintah juga menginstruksikan penghematan bagi instansi pemerintah dan memperketat pengawasan terhadap semua pelaksanaan anggaran belanja.

5. **Jawaban:**

Pada masa Demokrasi Terpimpin pemerintah harus mengatasi kondisi perekonomian yang belum stabil. Berbagai kebijakan yang telah diambil pemerintah pada masa ini antara lain nasionalisasi perusahaan Belanda, membentuk Dewan Perancang Nasional, menekan laju inflasi, devaluasi mata uang rupiah, deklarasi ekonomi, serta pengumpulan dana revolusi. Pada praktiknya, berbagai kebijakan tersebut menemui banyak hambatan seperti pergolakan politik dalam negeri serta konfrontasi dengan Belanda dan Malaysia. Akibatnya, banyak kebijakan ekonomi pemerintah yang mengalami kegagalan.



Indonesia pada Masa Orde Baru

A. Masa Transisi 1966–1967

Uji Kompetensi 1

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: e**

Krisis politik dan ekonomi pada masa transisi 1966–1967 berkaitan erat dengan peristiwa G 30 S/PKI. Krisis ekonomi pada masa itu ditandai dengan tingginya tingkat inflasi dan kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok. Bahkan, pemerintah menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap uang luar negeri atau emas. Jadi, jawaban yang tepat adalah pilihan **e**. Pilihan **a**, **b**, **c**, dan **d** merupakan indikator krisis politik.

2. **Jawaban: c**

Peristiwa G 30 S/PKI yang terjadi pada akhir tahun 1965 memperburuk kehidupan bangsa Indonesia. Pasca-peristiwa tersebut kondisi politik di Indonesia memanas, bahkan sejak awal tahun 1966 kondisi perekonomian Indonesia menurun. Kondisi inilah yang mendorong rakyat yang dimotori mahasiswa menyampaikan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura).

3. **Jawaban: d**

Gerakan mahasiswa pada masa transisi menunjukkan adanya kepedulian mahasiswa terhadap nasib bangsa. Mahasiswa pada masa itu mampu memotori dan memotivasi masyarakat untuk menuntut pemerintah mengadakan perubahan. Gerakan yang dilakukan rakyat dengan dimotori mahasiswa bertujuan memulihkan kondisi negara pasca peristiwa G 30 S/PKI.

4. **Jawaban: c**

Lahirnya Supersemar berawal dari kedatangan tiga perwira tinggi Angkatan Darat, yaitu Mayjen Basuki Rahmat, Brigjen M. Jusuf, dan

Brigjen Amir Machmud menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor. Di Istana Bogor, ketiga perwira tersebut meyakinkan kepada Presiden Soekarno bahwa ABRI, khususnya Angkatan Darat selalu siaga mengatasi keadaan. Setelah pertemuan tersebut, muncul surat perintah sebelah Maret (Supersemar) yang dimandatkan kepada Letjen Soeharto. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh kombinasi **X2**, **X3**, dan **Y2**).

5. **Jawaban: b**

Diterbitkannya Supersemar memberikan kewenangan yang luas kepada Soeharto. Tindakan pertama Soeharto sebagai pengemban Supersemar adalah membubarkan dan melarang kegiatan PKI dan ormas-ormasnya. Selanjutnya, Letjen Soeharto mengangkat lima menteri koordinator *ad interim* menjadi Presidium Kabinet.

6. **Jawaban: a**

Dualisme kepemimpinan nasional mulai tampak saat MPRS melalui Ketetapan Nomor XIII/MPRS/1966 memberikan tugas kepada pengemban mandat Supersemar untuk membentuk Kabinet Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat). Dalam Kabinet Ampera yang diresmikan pada 28 Juli 1966, Presiden Soekarno menjadi pemimpin kabinet, sedangkan Letjen Soeharto berkedudukan sebagai kepala pelaksana pemerintahan.

7. **Jawaban: e**

Pidato Presiden Soekarno dihadapan MPRS dikenal dengan sebutan pidato Nawaksara. Pidato tersebut tersebut ditolak oleh MPRS karena hanya sedikit menyinggung tentang

peristiwa G 30 S/PKI. Oleh karena itu, dalam sidang umum pada 20 Juni hingga 5 Juli 1966, melalui Ketetapan Nomor V/MPRS/1966, MPRS meminta Presiden Soekarno melengkapi isi pidato Nawaksara.

8. **Jawaban: b**

Masa transisi pascaperistiwa G 30 S/PKI telah menyebabkan situasi politik Indonesia tidak kondusif. Tuntutan untuk mengadili dan membubarkan PKI justru ditolak oleh Presiden Soekarno. Presiden ingin tetap mewujudkan persatuan Nasakom. Apabila PKI dibubarkan, cita-cita tersebut tidak akan pernah terwujud. Oleh karena menolak membubarkan PKI, popularitas Presiden Soekarno di masyarakat semakin menurun.

9. **Jawaban: d**

Sidang Istimewa MPRS tanggal 7–12 Maret 1967 menghasilkan Ketetapan Nomor XXXIII/MPRS/1967. Melalui ketetapan tersebut, MPRS menarik mandat Presiden Soekarno atas segala kekuasaannya dalam pemerintahan di Indonesia. MPRS kemudian mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden menggantikan Presiden Soekarno.

10. **Jawaban: e**

Dualisme kepemimpinan nasional pada awalnya muncul karena keluarnya Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966. Ketetapan tersebut melegalkan kedudukan Supersemar yang kemudian memberi kuasa kepada Letjen Soeharto. Selain itu, MPRS juga mengeluarkan Ketetapan MPRS Nomor XIII/MPRS/1966 yang memberi mandat kepada Soeharto untuk membentuk Kabinet Ampera. Selanjutnya, MPRS kembali mengeluarkan Ketetapan MPRS Nomor XIV/MPRS/1966 yang menyatakan bahwa jika presiden berhalangan, kedudukannya dapat digantikan oleh pemegang mandat Supersemar.

B. Uraian

1. **Jawaban:**

Peran mahasiswa pada masa transisi kekuasaan 1966–1967 berkaitan erat dengan mahasiswa Angkatan '66. Angkatan '66 merupakan angkatan mahasiswa yang menjadi penggerak pada masa transisi. Kelompok mahasiswa ini telah mem-

bangkitkan kesadaran gerakan mahasiswa secara nasional. Tokoh-tokoh mahasiswa pada masa itu seperti Cosmas Batubara, Sofyan Wanandi, Yusuf Wanandi, dan Akbar Tanjung. Angkatan '66 mampu mengangkat isu komunis sebagai bahaya laten negara. Gerakan ini juga berhasil membangun kepercayaan masyarakat untuk mendukung mahasiswa menentang komunisme.

2. **Jawaban:**

Presiden Soekarno bereaksi keras terhadap gerakan-gerakan mahasiswa yang dimotori KAMI. Presiden Soekarno menganggap aksi demonstrasi dapat menurunkan wibawa presiden. Oleh karena itu, pada 25 Februari 1966 Presiden Soekarno membubarkan KAMI. Dalam perkembangannya, pembubaran KAMI sama sekali tidak berhasil menghentikan gerakan mahasiswa.

3. **Jawaban:**

Pada awal tahun 1966 Indonesia mengalami krisis ekonomi sehingga pemerintah harus menaikkan harga bensin yang semula hanya Rp4,00 menjadi Rp25,00. Akibatnya, harga barang-barang kebutuhan pokok mengalami kenaikan sehingga kehidupan rakyat semakin berat. Keadaan ini diperparah dengan kebijakan devaluasi. Kebijakan devaluasi yang ditetapkan pemerintah pada tahun 1966 dilakukan dengan cara menarik pecahan uang Rp10.000,00 dan Rp5.000,00 dari peredaran serta nilainya dipotong 10%.

4. **Jawaban:**

Tindakan pertama yang dilakukan Soeharto untuk menjalankan tugasnya adalah membubarkan dan melarang kegiatan PKI dan ormas-ormasnya. Selain itu, Soeharto mengangkat lima menteri koordinator *ad interim* yang menjadi Presidium Kabinet. Kelima tokoh yang terpilih untuk menjadi menteri koordinator yaitu Sultan Hamengku Buwono IX, Adam Malik, Roeslan Abdulgani, K.H. Idham Chalid, dan Dr. J. Leimena.

5. **Jawaban:**

Pidato pertama pertanggungjawaban Presiden Soekarno di hadapan MPRS dilakukan pada Juni 1966. Pidato yang dikenal dengan Nawaksara tersebut ditolak oleh MPRS karena tidak banyak menyinggung peristiwa G 30 S/PKI. Pada 10 Januari 1967 Presiden Soekarno menyampaikan

kan kembali pidato yang dinamakan "Pelengkap Nawaksara" (Pelnawaksara). Dalam pidato tersebut, Presiden Soekarno menolak untuk bertanggung jawab atas peristiwa G 30 S/PKI,

kemunduran ekonomi, dan kemerosotan moral bangsa secara sendirian. Oleh karena itu, MPRS kembali menolak pidato tersebut.

B. Stabilitas Politik dan Rehabilitasi Ekonomi

Uji Kompetensi 2

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: b**

Politik "bebas" berarti Indonesia tidak akan terlibat dalam pertikaian antara blok Barat dan blok Timur. Sementara itu, "aktif" merupakan gambaran atas komitmen Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam menjaga perdamaian dunia. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno politik luar negeri Indonesia cenderung memihak pada blok Timur yang umumnya terdiri atas negara-negara komunis. Oleh karena itu, pada awal pemerintahan Orde Baru, pemerintah ingin meluruskan kembali politik luar negeri Indonesia.

2. **Jawaban: c**

Sejak kembali menjadi anggota PBB, Indonesia telah berusaha menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Salah satunya yaitu dengan cara mengirim Kontingen Garuda. Kontingen Garuda merupakan pasukan TNI/ABRI yang dikirim untuk bergabung dengan pasukan perdamaian PBB.

3. **Jawaban: a**

Pada pemilu 1977 pemerintah Orde Baru mulai menerapkan kebijakan fusi partai. Dalam kebijakan ini pemerintah menyederhanakan jumlah partai dengan cara penggabungan berdasarkan ideologi. Adapun Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan gabungan dari partai yang berlatar belakang Islam seperti NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh kombinasi **A1)**, **A2)**, dan **B1)**. Adapun **A3)**, **B2)**, dan **B3)** merupakan partai yang digabungkan menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

4. **Jawaban: d**

Salah satu landasan konstitusional pelaksanaan pemilu 1987 adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan undang-undang tersebut, semua partai

politik dan Golkar harus memiliki asas sama, yaitu Pancasila. Partai yang menolak asas tersebut berarti harus membubarkan diri. Oleh karena itu, penerapan undang-undang tersebut menyebabkan tidak adanya pluralisme politik.

5. **Jawaban: c**

Stabilitas nasional merupakan tujuan utama yang hendak dicapai pemerintah Orde Baru pada awal kekuasaannya. Salah satu cara yang ditempuh dalam mencapai stabilitas tersebut adalah melakukan reorganisasi dalam tubuh ABRI. Upaya ini dilakukan untuk menyelesaikan konflik internal yang terjadi di tubuh ABRI pada masa Demokrasi Terpimpin. Penyelesaian konflik ini dilakukan dengan mereorganisasi ABRI melalui penyelenggaraan keamanan dan pertahanan terpusat.

6. **Jawaban: e**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan salah satu produk rezim Orde Baru. Undang-undang tersebut mempermudah izin bagi investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Pengesahan undang-undang tersebut merupakan hasil pemikiran staf pribadi Presiden Soeharto yang berperan sebagai penasihat di bidang ekonomi.

7. **Jawaban: b**

Pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan Revolusi Hijau untuk mengembangkan sektor pertanian di Indonesia. Untuk melancarkan program Revolusi Hijau, pemerintah mengoptimalkan peran koperasi tani (Koperta) di tingkat desa. Sejak 1978 nama Koperta diganti menjadi Koperasi Unit Desa (KUD). KUD terdapat di hampir setiap kecamatan di seluruh Indonesia. Melalui koperasi yang keberadaannya hingga di tingkat desa ini, pemerintah berupaya membantu proses pemasaran produk-produk pertanian.

8. **Jawaban: c**

Dalam melaksanakan dwifungsi ABRI, pemerintah tidak hanya memasukkan ABRI menjadi salah satu fraksi di DPR. Akan tetapi, pemerintah juga memberi peluang bagi ABRI untuk menempati jabatan strategis dalam pemerintahan. Hal tersebut ditunjukkan dengan tokoh-tokoh militer yang menempati jabatan gubernur DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan. Dapat disimpulkan, penerapan dwifungsi ABRI mengurangi peran kalangan sipil untuk menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan.

9. **Jawaban: a**

Pada awal pemerintahannya, Presiden Soeharto dan pemerintah Orde Baru memiliki tugas berat, yaitu membenahi perekonomian Indonesia yang sedang terpuruk. Pada waktu itu laju inflasi sangat tinggi, bahkan mencapai 650% setahun. Dengan berbagai kebijakan yang diterapkan, pemerintah berhasil mengatasi masalah tingginya laju inflasi tersebut.

10. **Jawaban: b**

Aspek yang terkandung dalam Trilogi Pembangunan sebagai berikut.

- 1) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 - 2) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
 - 3) Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
- Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh angka 1), 2), dan 4).

B. Uraian

1. **Jawaban:**

Pembentukan ASEAN merupakan kebijakan pemerintah Orde Baru yang berkaitan dengan politik luar negeri bebas aktif. Melalui pembentukan ASEAN pemerintah Indonesia berusaha turut aktif dalam kerja sama antarnegara di kawasan Asia Tenggara. Pembentukan ASEAN juga menunjukkan sikap Indonesia yang menolak untuk memihak pada salah satu blok pada masa Perang Dingin.

2. **Jawaban:**

Pemerintah Orde Baru melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan untuk memberantas buta huruf dan pemeratakan pendidikan. Dalam mengatasi masalah tersebut, pemerintah Orde Baru menetapkan program wajib belajar sembilan tahun. Program tersebut diikuti dengan pembangunan SD Inpres di seluruh pelosok tanah air. Selanjutnya, pemerintah juga mencanangkan program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA). Program tersebut menyediakan orang tua asuh bagi anak tidak mampu dengan tujuan menjamin fokus anak agar mencapai standar pendidikan dasar sembilan tahun.

3. **Jawaban:**

Pada awal Orde Baru Indonesia menjalin kerja sama dengan IMF. Kerja sama ini tidak lepas dari usaha pemerintah Orde Baru mengembalikan kepercayaan negara-negara asing. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan para investor asing bersedia menanamkan modal di Indonesia.

4. **Jawaban:**

Setelah pemerintah Orde Baru berkuasa, pemerintah berencana mengadakan pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1968. Akan tetapi, MPRS menunda pelaksanaan pemilu karena sudah terbentuk pemerintahan baru. Pemilu akhirnya diadakan pada tahun keempat periode Orde Baru, yaitu pada 5 Juli 1971.

5. **Jawaban:**

Keluarga Berencana (KB) merupakan kebijakan dalam bidang kesehatan yang bertujuan mengurangi ledakan penduduk. Pemerintah menerapkan sistem jemput bola untuk memperlancar pelaksanaan program KB hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Selain itu, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan pemberian tunjangan anak kepada pegawai negeri sipil (PNS).

C. Integrasi Timor Timur

Uji Kompetensi 3

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: e**

Secara historis, Indonesia dan Timor Timur memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada masa kolonialisme bangsa-bangsa Barat. Indonesia mengalami kolonialisme bangsa-bangsa Barat di bawah pendudukan Belanda, Inggris, dan Portugis. Sementara itu, wilayah Timor Timur hanya dikuasai oleh bangsa Portugis.

2. **Jawaban: c**

Revolusi Bunga merupakan momentum yang mengubah arah perjuangan kemerdekaan rakyat Timor Timur. Peristiwa tersebut didorong oleh perubahan kebijakan pemerintah Portugis yang ingin menghapus status koloni di wilayah jajahan Portugis. Penghapusan status koloni tersebut kemudian mendorong lahirnya beberapa organisasi politik di wilayah Timor Timur.

3. **Jawaban: a**

Keterangan pada soal merujuk pada partai *Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente* (Fretilin). Fretilin merupakan partai politik yang dipimpin oleh Francisco Xavier do Amaral dan Jose Ramos Horta. Fretilin menghendaki kemerdekaan penuh bagi rakyat Timor Timur.

4. **Jawaban: b**

Revolusi Bunga mendorong dekolonisasi wilayah koloni Portugis. Pemerintah baru hasil revolusi berpendapat bahwa daerah koloni yang sedang dilanda konflik hanya akan membebani perekonomian negara. Oleh karena itu, Portugis melepaskan daerah-daerah tersebut (dekolonisasi). Salah satu koloni yang mengalami dekolonisasi adalah Timor Timur.

5. **Jawaban: e**

Pertemuan antara pemerintah Portugis dan Indonesia terkait wilayah Timor Timur terjadi pada 16 Oktober 1974. Pada pertemuan ini Portugis diwakili oleh Menteri Seberang Lautan Portugis, Dr. Antonio de Almeida Santos, sedangkan Indonesia diwakili oleh Presiden Soeharto. Dalam pertemuan itu Presiden Soeharto menegaskan bahwa Indonesia tidak mempunyai

ambisi teritorial terhadap Timor Timur. Selain itu, Indonesia mendukung kebijakan dekolonisasi yang dikeluarkan pemerintah Portugis terhadap tanah jajahannya.

6. **Jawaban: b**

Operasi Komodo merupakan operasi militer ABRI yang pertama dilakukan di Timor Timur. Operasi ini dilakukan karena gerakan pasukan Fretilin di daerah perbatasan Indonesia. Tindakan proaktif ABRI ini bertujuan melindungi rakyat Indonesia dari ancaman Fretilin.

7. **Jawaban: c**

Organisasi politik di Timor Timur terbagi menjadi tiga golongan. Golongan pertama menginginkan agar Timor Timur tetap menjadi koloni Portugis. Golongan ini diwakili oleh partai *Uniao Democratica Timorese* (UDT). Golongan kedua menghendaki integrasi Timor Timur dengan Indonesia. Golongan ini diwakili oleh partai *Associacao Populer Democratica Timorese* (Apodeti), *Klibur Oan Timur Aswain* (Kota), dan *Trabalhista*. Adapun golongan ketiga menghendaki kemerdekaan Timor Timur yang diwakili oleh partai *Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente* (Fretilin). Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh X1), X3), dan Y2).

8. **Jawaban: c**

Politik luar negeri Amerika Serikat pada masa Perang Dingin difokuskan untuk membendung pengaruh penyebaran komunisme di berbagai kawasan di Asia Tenggara. Oleh karena itu, Amerika Serikat mendukung penuh operasi Seroja yang dilakukan ABRI di Timor Timur. Dukungan tersebut diberikan karena Amerika Serikat khawatir apabila Fretilin yang berhaluan komunis dapat berkuasa di Timor Timur.

9. **Jawaban: b**

Pemerintah menerapkan beberapa kebijakan untuk merehabilitasi Timor Timur. Dalam bidang kesehatan, pemerintah menambah jumlah rumah sakit dan puskesmas. Pada tahun 1980 pemerintah mendirikan Sekolah Perawat Kesehatan dan Sekolah Bidan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Timor Timur.

10. **Jawaban: c**

Kebijakan pemerintah Indonesia untuk merehabilitasi Timor Timur dalam bidang pendidikan antara lain membangun gedung sekolah dan mendirikan Universitas Timor Timur. Pemerintah juga mendatangkan guru dari provinsi lain untuk mengembangkan pendidikan dan mengurangi angka buta huruf di Timor Timur.

B. Uraian

1. **Jawaban:**

Pendudukan Portugis di wilayah Timor Timur terjadi sejak abad XVII. Pada awalnya Portugis menduduki wilayah Kepulauan Maluku. Seiring kedatangan VOC dan adanya perlawanan rakyat Maluku, Portugis mengalihkan kegiatannya di Pulau Timor. Pulau Timor kemudian dibagi menjadi dua wilayah kekuasaan. Pulau Timor sebelah timur menjadi wilayah kekuasaan Portugis dan disebut Timor Portugis. Adapun Pulau Timor sebelah barat berada di bawah kekuasaan Belanda (VOC) dan disebut Timor Barat. Sejak saat itu, Portugis membangun Timor Timur sebagai salah satu daerah koloninya.

2. **Jawaban:**

Revolusi Bunga di Portugis pada tahun 1974 menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan dekolonisasi di beberapa koloni, termasuk Timor Timur. Akibatnya, berbagai organisasi politik seperti UDT, Fretilin, Apodeti, Kota, dan Tralabhist berkembang di wilayah Timor Timur. Setiap organisasi politik tersebut mempunyai visi yang berbeda mengenai nasib Timor Timur. Fretilin menginginkan kemerdekaan penuh bagi Timor Timur. UDT tetap menghendaki Timor Timur menjadi bagian Portugis. Adapun Apodeti menginginkan integrasi Timor Timur ke Indonesia.

3. **Jawaban:**

Integrasi Timor Timur ke wilayah Indonesia sesuai dengan kebijakan pemerintah Orde Baru untuk mewujudkan stabilitas nasional. Untuk mewujudkan stabilitas nasional, pemerintah Orde Baru juga harus menjaga stabilitas regional. Bagi pemerintah Orde Baru, dekolonisasi Timor Timur yang diwarnai dengan konflik dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas nasional. Oleh karena itu, pemerintah Orde Baru mengambil jalan untuk mengintegrasikan Timor Portugis ke wilayah Indonesia.

Jawaban:

Operasi militer pemerintah Indonesia melalui ABRI berkaitan erat dengan keberadaan partai Fretilin. Fretilin merupakan partai berhaluan komunis yang menghendaki kemerdekaan Timor Timur. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran akan masuknya pengaruh komunis ke wilayah Indonesia. Oleh karena itu, dengan bantuan Amerika Serikat pemerintah Indonesia melakukan operasi militer ke wilayah Timor Timur.

5. **Jawaban:**

Pembentukan Provinsi Timor Timur diawali pengajuan petisi oleh Kepala Pemerintahan Sementara Timor Timur. Petisi tersebut berisi pengajuan integrasi Timor Timur ke wilayah Indonesia. Berdasarkan petisi tersebut, pemerintah Portugis menginginkan integrasi Timor Timur ke Indonesia tanpa melalui referendum. Selanjutnya, pada 17 Juli 1976 pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan Timor Timur sebagai provinsi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976.

D. Dampak Kebijakan Masa Orde Baru

Uji Kompetensi 4

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: e**

Pada masa Orde Baru pemerintahan yang dijalankan cenderung bersifat sentralistik. Hal tersebut dapat dilihat dari segala penetapan

kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Dengan sistem tersebut, pemerintah daerah tidak memiliki peluang untuk memajukan daerahnya. Kondisi tersebut kemudian menyebabkan kemajuan pemerintahan di daerah terhambat.

2. **Jawaban: b**

Pada masa Orde Baru, pelaksanaan pemilu dianggap tidak mencerminkan prinsip demokrasi. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya intervensi pemerintah kepada rakyat dalam menentukan pilihan politiknya. Sebagai contoh, pemerintah mewajibkan anggota pegawai negeri sipil, TNI/Polri untuk mendukung Golkar dalam pemilu. Oleh karena itu, kemenangan Golkar dalam setiap pemilu pada masa Orde Baru menandai proses demokrasi belum berjalan dengan baik.

3. **Jawaban: b**

Pada masa Orde Baru pemerintah cenderung bersifat represif terhadap media pers yang kritis terhadap pemerintah. Media pers yang mengutarakan kritik terhadap pemerintah akan langsung dilarang terbit pada masa Orde Baru. Hal ini pernah dirasakan oleh media pers seperti *Tempo*, *Indonesia Raya*, dan *Sinar Harapan*. Jadi, jawaban yang tepat adalah kombinasi **X1**, **X2**, dan **Y2**).

4. **Jawaban: d**

Rekrutmen politik merupakan proses pengisian jabatan politik di dalam penyelenggaraan pemerintah negara, baik untuk lembaga eksekutif (pemerintah pusat dan pemerintah daerah), legislatif (MPR, DPR, dan DPRD), maupun lembaga yudikatif (Mahkamah Agung). Semua proses tersebut diatur berdasarkan kedekatan dengan presiden. Kondisi tersebut kemudian mendorong tumbuh suburnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

5. **Jawaban: b**

Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, presiden menjadi pusat kekuasaan dari seluruh proses politik di Indonesia. Oleh karena itu, pada masa Orde Baru presiden memiliki peranan besar. Lembaga kepresidenan menjadi pengontrol utama lembaga negara lainnya baik yang bersifat suprastruktur (DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA) maupun yang bersifat infrastruktur (LSM dan partai politik).

6. **Jawaban: a**

Pada tahun 1984 Indonesia berhasil mencapai swasembada beras. Pencapaian ini berhasil mengubah status Indonesia dari negara pengimpor beras menjadi negara yang dapat memenuhi kebutuhan beras sendiri. Keberhasilan ini juga menyebabkan Indonesia mendapat penghargaan

dari *Food and Agriculture Organization/FAO* (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985.

7. **Jawaban: c**

Dalam bidang pendidikan, pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK). Mahasiswa yang biasanya aktif dalam mengontrol pemerintahan, dialihkan dengan kegiatan kuliah yang sangat padat. Oleh karena itu, gerakan mahasiswa tidak dapat berkembang.

8. **Jawaban: d**

Salah satu kesalahan pemerintah Orde Baru adalah pembangunan yang tidak merata di setiap daerah Indonesia. Pemerintah Orde Baru terlalu memusatkan segala bentuk pembangunan di Pulau Jawa. Oleh karena itu, daerah-daerah seperti Aceh, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara kurang menikmati pembangunan. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh angka **2**, **3**, dan **5**).

9. **Jawaban: c**

Keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam membangun sektor industri dapat dilihat dari peningkatan pendapatan nasional. Pada awal tahun 1980 *Gross National Product* (GNP) Indonesia sekira \$600 dan meningkat hingga \$1300 per kapita pada awal dekade 1990-an

10. **Jawaban: e**

Pemerintahan Orde Baru berusaha melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Salah satu usaha pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut adalah menerapkan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib di setiap jenjang pendidikan. Penerapan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib mampu memupuk rasa nasionalisme bangsa Indonesia.

B. Uraian

1. **Jawaban:**

Pembangunan ekonomi yang diselenggarakan pemerintah Orde Baru mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan ini ditandai dengan penurunan angka kemiskinan, penurunan angka kematian bayi, dan peningkatan partisipasi pendidikan. Akan tetapi, kondisi tersebut tidak merata dirasakan di seluruh wilayah Indonesia.

2. **Jawaban:**

Prinsip demokrasi dipraktikkan demi menjunjung tinggi kepentingan rakyat. Akan tetapi, pada masa Orde Baru prinsip tersebut diabaikan. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan pemilu yang hanya didominasi oleh kemenangan satu partai. Bahkan, pemerintah cenderung mengintervensi hak politik rakyat dengan mengarahkan pegawai negeri untuk mendukung Golkar dalam pemilu.

3. **Jawaban:**

Setelah peristiwa G 30 S/PKI, warga keturunan Tionghoa harus menanggung beban. Pada tahun 1967 warga keturunan Tionghoa dianjurkan mengganti namanya dengan nama Indonesia untuk memperkecil perbedaan antara WNI keturunan Tionghoa dan WNI asli. Untuk mengikis sikap eksklusivisme, pemerintah melarang penggunaan simbol-simbol Tionghoa, baik berupa surat kabar, penggunaan bahasa, maupun tradisi dan budaya Tionghoa di muka umum.

4. **Jawaban:**

Pada masa Orde Baru, pengelolaan BUMN dilakukan oleh perwira militer senior ataupun para elite politik yang berpengaruh dalam pemerintahan. BUMN dijadikan sebagai alat untuk memperkaya para elite manajemennya dan menjadi "sapi perahan" bagi para elite pemerintahan. Dapat disimpulkan, pengelolaan BUMN pada masa Orde Baru tidak dilakukan secara profesional.

5. **Jawaban:**

Pers pada masa Orde Baru tidak dapat berkembang karena adanya sikap represif dari pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan adanya pencabutan SIT dan SIUPP bagi media pers yang mengkritik pemerintah. Oleh karena itu, pada masa Orde Baru sering ditemukan media-media pers yang dibredel oleh pemerintah seperti *Tempo*, *Sinar Harapan*, dan *Indonesia Raya*.

Penilaian Harian

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: a**

Ketetapan MPRS Nomor V/MPRS/1966 berkaitan dengan penolakan MPRS akan pidato Nawaksara yang disampaikan Soekarno. MPRS menolak pidato Nawaksara yang tidak banyak menyinggung peristiwa G 30 S/PKI. Oleh karena itu, dalam sidang umum pada tanggal 20 Juni–5 Juli 1966, melalui Ketetapan MPRS Nomor V/MPRS/1966, MPRS meminta Presiden Soekarno untuk melengkapi isi pidato Nawaksara.

2. **Jawaban: d**

Salah satu isi Tritura adalah pembersihan kabinet dari unsur-unsur G 30 S/PKI. Oleh karena itu, pemerintah pada masa itu membentuk Kabinet Ampera untuk menjalankan pemerintahan sementara menggantikan Kabinet Dwikora yang disempurnakan. Tugas pokok Kabinet Ampera adalah menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sekaligus mewujudkan isi Tritura pada aspek perombakan kabinet.

3. **Jawaban: e**

Setelah resmi menjabat sebagai pengemban mandat Supersemar, Letjen Soeharto mengangkat lima menteri koordinator *ad interim* yang bertugas menjadi Presidium Kabinet. Kelima tokoh tersebut yaitu Sultan Hamengku Buwono IX, Adam Malik, Roeslan Abdulgani, K.H. Idham Chalid, dan J. Leimena. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh angka 3), 4), dan 5).

4. **Jawaban: c**

Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) pada tahun 1966 erat dengan Tritura. Gerakan mahasiswa pada masa ini dikenal dengan nama Angkatan '66. Gerakan ini menjadi awal kebangkitan gerakan mahasiswa secara nasional. Angkatan '66 mengangkat isu komunis sebagai bahaya laten negara. Gerakan ini berhasil membangun kepercayaan masyarakat untuk mendukung mahasiswa menentang komunisme.

5. **Jawaban: a**
Pada masa pemerintahan Soekarno, hubungan Indonesia–Malaysia sempat memanas. Ketika pemerintahan Soekarno digantikan oleh Soeharto, hubungan Indonesia–Malaysia mulai dinormalisasi. Normalisasi hubungan kedua negara tersebut ditandai dengan pertemuan Menlu Indonesia, Adam Malik dengan Menlu Malaysia, Tun Abdul Razak di Bangkok pada tanggal 29 Mei–1 Juni 1966. Menindaklanjuti normalisasi hubungan kedua negara, Indonesia mengirim tenaga pendidik dan melakukan pertukaran pelajar dengan Malaysia.
6. **Jawaban: b**
Masa transisi 1966–1967 turut menandai turunnya popularitas Presiden Soekarno dalam masyarakat. Popularitas tersebut menurun karena Presiden Soekarno menolak tuntutan yang diajukan gerakan mahasiswa. Salah satunya tuntutan untuk membubarkan PKI.
7. **Jawaban: e**
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 merupakan dasar hukum pelaksanaan pemilu 1977. Melalui undang-undang tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan fusi partai pada sembilan partai peserta pemilu 1971. Kebijakan fusi tersebut menyederhanakan sembilan partai peserta pemilu 1971 menjadi tiga partai. Selanjutnya, pemilu 1977 hanya diikuti oleh tiga partai politik.
8. **Jawaban: c**
Pada masa Orde Baru ABRI mulai diberi peran untuk terlibat dalam politik melalui jatah 20% dalam DPR. Selain itu, Golkar menjadi partai pendukung pemerintah. Baik ABRI maupun Golkar sama-sama mendukung seluruh kebijakan Soeharto. Oleh karena itu, fungsi DPR sebagai alat kontrol pemerintahan tidak berlaku.
9. **Jawaban: a**
Salah satu masalah perekonomian Indonesia pada awal masa Orde Baru adalah penanggulangan masalah utang piutang. Untuk mengatasi masalah tersebut, Presiden Soeharto mengirim tim negosiasi ke beberapa negara seperti Prancis (*Paris Club*) dan Inggris (*London Club*). Diplomasi ekonomi tersebut bertujuan menegosiasi ulang jadwal pembayaran utang luar negeri Indonesia yang sudah jatuh tempo.
10. **Jawaban: d**
Presiden Soeharto membentuk tim penasihat ekonomi yang terdiri atas pakar ekonomi dari Universitas Indonesia (UI). Pakar ekonomi tersebut merupakan lulusan *University of California* di Berkeley, Amerika Serikat. Adapun tokoh-tokoh tersebut yaitu, Widjodjo Nitisastro, Emil Salim, Mohammad Sadli, Ali Wardhana, dan Soebroto. Jadi pilihan yang tepat ditunjukkan oleh kombinasi X2), Y1), dan Y2).
11. **Jawaban: a**
Masuknya investor di Indonesia pada masa Orde Baru merupakan salah satu kebijakan yang dirumuskan oleh para penasihat ekonomi Presiden Soeharto. Kebijakan tersebut kemudian diaplikasikan melalui keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968. Kedua undang-undang tersebut dikeluarkan untuk mempermudah penanaman modal asing dan modal dalam negeri di Indonesia.
12. **Jawaban: c**
Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu warisan pemerintahan Orde Baru yang masih dijalankan hingga saat ini. Program tersebut merupakan salah satu cara yang ditempuh pemerintah pada masa Orde Baru untuk mengatasi ledakan jumlah penduduk.
13. **Jawaban: b**
Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan unit usaha yang dulunya bernama Koperasi Tani (Koperta). Melalui koperasi yang keberadaannya hingga di tingkat desa ini, pemerintah berupaya membantu proses pemasaran produk-produk pertanian.
14. **Jawaban: b**
Badan Urusan Tenaga Kerja Sukarela Indonesia (BUTSI) merupakan lembaga yang dibentuk di perdesaan. Lembaga tersebut untuk menyalurkan tenaga kerja sukarela yang bertugas sebagai tenaga pelopor pembangunan dan pembaruan berbagai bidang di desa-desa. Hal tersebut sesuai dengan upaya pemerintah menyelenggarakan pembangunan di perdesaan yang difokuskan pada penyediaan tenaga kerja terdidik.
15. **Jawaban: c**
Daerah asal program transmigrasi diambil dari daerah-daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi. Daerah tersebut antara lain

Pulau Jawa, Bali, dan Madura. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh angka II, III, dan IV. Adapun angka I dan V, VI, dan VII merupakan daerah tujuan transmigrasi.

16. **Jawaban: a**

Salah satu ciri pemerintahan Orde Baru adalah sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik. Pemerintahan sentralistik ditandai dengan penetapan kebijakan pada pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya diberi peluang sangat kecil untuk mengelola dan mengatur pemerintahan di daerah. Dampak dari kebijakan tersebut setiap pembangunan yang dijalankan pemerintah Orde Baru menjadi tidak merata. Hal tersebut dapat dilihat dari kesenjangan pembangunan yang khususnya terjadi di wilayah Indonesia Timur.

17. **Jawaban: c**

Perang sipil di Timor Timur berawal dari wacana dekolonisasi wilayah jajahan Portugis. Beberapa fakta yang terjadi pada permulaan konflik sebagai berikut.

- 1) Para simpatisan Apodeti dan Fretilin terlibat konflik bersenjata.
- 2) Kelompok Timor Timur pro-integrasi menyatakan Deklarasi Balibo pada 30 November 1975.
- 3) Fretilin memproklamasikan kemerdekaan Timor Timur dan berdirinya sebuah Republik Demokrasi Timor Timur di Dili pada 28 November 1975.

Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh angka 1), 4), dan 5).

18. **Jawaban: c**

Kebijakan dekolonisasi Portugis terhadap wilayah Timor Timur mendorong lahirnya beberapa organisasi politik. Organisasi-organisasi politik kemudian mendorong terjadinya gejolak politik di Timor Timur. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan pandangan setiap organisasi politik partai terkait dengan kemerdekaan.

19. **Jawaban: a**

Kata kunci untuk menjawab soal terletak pada kalimat terakhir dalam artikel. Tekanan pemerintah terhadap keberadaan tim pemberantasan korupsi menunjukkan ketidakseriusan dalam penanganan kasus korupsi. Sementara itu, praktik korupsi yang dilakukan pemerintah Orde Baru tumbuh subur hingga tingkatan pemerintahan yang terendah.

20. **Jawaban: c**

Pengangguran merupakan masalah sosial yang ditemui di setiap periode pemerintahan. Pada masa Orde Baru, pemerintah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan menyalurkan tenaga terdidik untuk menjadi sukarelawan. Penyaluran tersebut diselenggarakan melalui program Badan Urusan Tenaga Kerja Sukarela Indonesia (BUTSI).

B. Uraian

1. **Jawaban:**

Supersemar merupakan surat perintah Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto untuk mengamankan situasi politik dan keamanan yang kacau setelah peristiwa G 30 S/PKI 1965. Dalam perkembangannya, kedudukan Soeharto semakin kuat ketika Supersemar dikukuhkan kedudukannya melalui Ketetapan Nomor IX/MPRS/1966. Sejak itulah, kekuasaan Soekarno mulai melemah dan berujung pada pengangkatan Soeharto sebagai presiden. Pengangkatan Soeharto sebagai presiden sekaligus menandakan lahirnya Orde Baru.

2. **Jawaban:**

Pemilu merupakan salah satu indikator pelaksanaan demokrasi di suatu negara. Pemilu 1971 merupakan pemilu pertama yang terlaksana pada masa Orde Baru. Pemilu 1971 yang diikuti oleh sembilan partai dan satu golongan ini dilaksanakan pada 5 Juli 1971 untuk memilih anggota DPR. Pemilu 1971 berbeda dengan pemilu 1977 karena adanya kebijakan fusi partai. Melalui kebijakan tersebut, partai peserta pemilu 1977 disederhanakan menjadi dua partai dan satu golongan.

3. **Jawaban:**

Integrasi Timor Timur berawal dari kebijakan dekolonisasi yang dilakukan Portugis terhadap wilayah Timor Timur. Kebijakan tersebut menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat Timor Timur. Reaksi masyarakat Timor Timur dapat terlihat melalui tiga partai pada saat itu yaitu UDT, Apodeti, dan Fretilin. UDT menginginkan agar Timor Timur tetap bertahan menjadi bagian Portugis. Apodeti ingin agar Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia. Fretilin ingin agar Timor Timur merdeka. Setiap kelompok berusaha mempertahankan wilayah politiknya sehingga menyebabkan kerusuhan di Timor Timur.

4. **Jawaban:**

Orde Baru lahir atas prakarsa gerakan mahasiswa yang menyuarakan aspirasi rakyat atas rezim Soekarno. Dalam perkembangannya, pemerintah Orde Baru juga semakin bersikap represif terhadap gerakan mahasiswa. Hal tersebut semakin terlihat setelah peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari 1974 (Malari) yang dilakukan mahasiswa. Pemerintah kemudian semakin ketat mengawasi gerakan mahasiswa. Aksi-aksi demonstrasi dibatasi karena dapat mengganggu ketertiban dan stabilitas keamanan.

Aktivitas mahasiswa di kampus juga dibatasi melalui kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK).

5. **Jawaban:**

Salah satu cara yang ditempuh pemerintah Orde Baru dalam menjaga kekuasaan memasukkan ABRI sebagai fraksi di DPR. Keberadaan ABRI di DPR menjadi salah satu pendukung pemerintah selain Golkar. Oleh karena keberadaan keduanya, setiap kebijakan yang diambil pemerintah selalu didukung penuh. Kondisi tersebut kemudian juga menjadi penyebab tidak adanya suksesi kepemimpinan nasional pada masa Orde Baru.

Penilaian Akhir Semester 1

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: b**

Pada 7 November 1945 pergerakan PKI kembali muncul di bawah pimpinan Moh. Jusuf. Kelompok kiri (sosialis-komunis) merupakan kelompok yang berperan penting dalam menghidupkan PKI. Kembalinya pergerakan PKI tidak terlepas dari adanya Maklumat Pemerintah yang ditandatangani oleh Moh. Hatta pada 3 November 1945. Berdasarkan maklumat tersebut, masyarakat Indonesia dibebaskan mendirikan partai politik.

2. **Jawaban: b**

Setelah kembali terbentuk pada 7 November 1945, pergerakan PKI sangat cepat dan terorganisasi. Tokoh PKI yang cukup berpengaruh pada masa itu, antara lain Muso, D. N. Aidit, M. H. Lukman, Suripno, Nyoto, dan Sudisman. Sementara itu, Kartosuwiryo dan Amir Fatah merupakan tokoh dalam pemberontakan DI/TII. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh angka 1), 2), dan 4).

3. **Jawaban: b**

Sejak awal pembentukannya, PKI berusaha menerapkan ideologi komunis di Indonesia. Keinginan PKI tersebut dinilai dapat mengganggu stabilitas politik dan pertahanan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia menolak paham komunis berkembang di Indonesia.

4. **Jawaban: d**

Pemberontakan yang dilakukan DI/TII pada awalnya bertujuan melawan Belanda. Dalam perkembangannya, DI/TII melakukan pemberontakan yang mengganggu integrasi bangsa Indonesia. Pemberontakan DI/TII dilatarbelakangi oleh hasil Perjanjian Renville yang sangat merugikan bangsa Indonesia.

5. **Jawaban: c**

Nasionalisme, Agama, dan Komunisme (Nasakom) merupakan konsep politik yang dicetuskan Presiden Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin. Komponen Nasakom diambil dari tiga partai besar yang mendukung Presiden Soekarno, yaitu PNI (nasionalisme), NU (agama), dan PKI (komunisme). Nasakom memberikan celah bagi PKI untuk mengembangkan pergerakan dan ideologinya di Indonesia.

6. **Jawaban: b**

Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan beberapa pejuang dalam pelaksanaan pemerintahan RIS. Sebagai negara federal yang dibentuk melalui KMB, RIS merupakan sebuah negara yang rapuh. Kondisi tersebut dibuktikan dengan masih ikut campurnya pemerintah Belanda dalam tatanan pemerintahan RIS.

7. **Jawaban: d**

Terjadinya pemberontakan Andi Aziz tidak terlepas dari keputusan pemerintah RIS mengirimkan 900 pasukan TNI untuk bergabung dengan APRIS di Makassar. Bergabungnya pasukan TNI dengan APRIS menimbulkan kecurigaan Andi Aziz dan mantan anggota KNIL. Mereka khawatir pemerintahan RIS menganaktirikan keberadaan mantan anggota KNIL di Makassar.

8. **Jawaban: d**

Pemerintah RIS berusaha memadamkan pemberontakan RMS menggunakan cara damai. Cara ini ditempuh melalui perundingan dengan mengirim tokoh asli Maluku, yaitu J. Leimena, Putuhena, Pelaupessy, dan Rehattu ke Ambon untuk melakukan kompromi dengan RMS. Dengan demikian, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh pilihan d.

9. **Jawaban: b**

Tokoh pada gambar soal merupakan pejuang integrasi asal Papua yang bernama Frans Kasiepo. Pada 1961 Frans Kasiepo membentuk Partai Irian Sebagian Indonesia (ISI) yang menuntut integrasi *Nederlands Nieuwe Guinea* ke dalam wilayah Republik Indonesia. Tuntutan tersebut ditunjukkan dengan membantu perjuangan pembebasan Irian Barat. Upaya Frans Kasiepo tersebut akhirnya membuahkan hasil, Irian Barat menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. **Jawaban: a**

Pemberontakan PRRI dilatarbelakangi oleh kecemburuan pemerintah di daerah terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu, PRRI dibentuk sebagai ungkapan protes terhadap pemerintahan pusat. Gerakan ini bermaksud mengingatkan bahwa pemerintah pusat mempunyai daerah-daerah yang harus diperhatikan dan dikembangkan demi kemajuan negara Indonesia.

11. **Jawaban: a**

Silas Papare merupakan salah satu wakil delegasi Irian Barat dalam perundingan New York untuk menyelesaikan masalah Irian Barat. Dalam perundingan tersebut Silas Papare menginginkan Irian Barat bersatu dengan wilayah NKRI.

12. **Jawaban: c**

Pada 14 November 1945 terbentuk kabinet baru dengan Sutan Sjahrir sebagai perdana menteri. Kabinet Sjahrir I hanya menjalankan tugasnya selama tiga bulan. Pada 23 Februari 1945 Sutan Sjahrir menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Jatuhnya Kabinet Sjahrir I terjadi karena kabinet ini cenderung tidak memiliki mayoritas suara di parlemen sehingga mudah dijatuhkan.

13. **Jawaban: a**

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1950 ditolak banyak partai politik. Sebagian besar partai dalam parlemen menginginkan pencabutan peraturan tersebut karena Kabinet Natsir dianggap tidak demokratis dalam menentukan pilihan secara bertingkat. Akhirnya, pada 21 Maret 1951 Kabinet Natsir mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno.

14. **Jawaban: b**

Partai politik, organisasi, dan perorangan diperkenankan mengikuti pemilu yang diselenggarakan pada 1955. Tiga partai politik yang meraih perolehan suara terbanyak dalam pemilu 1955 secara berurutan yaitu, PNI, Masyumi, dan NU. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh pilihan **b**.

15. **Jawaban: b**

Sistem Ekonomi Ali-Baba dilaksanakan dengan tujuan menciptakan kerja sama antara pengusaha pribumi (Ali) dengan pengusaha nonpribumi (Baba). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah mewajibkan pengusaha nonpribumi di Indonesia untuk memberikan pelatihan dan tanggung jawab kepada tenaga kerja pribumi.

16. **Jawaban: b**

Pada masa Demokrasi Liberal pemerintah menerapkan kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi nasional. Beberapa kebijakan tersebut antara lain kebijakan Gerakan Benteng yang diprakarsai oleh Soemitro Djojohadikusumo; kebijakan Gunting Syafruddin yang dicetuskan oleh Syafruddin Prawiranegara; nasionalisasi *De Javasche Bank*, pembentukan Biro Perancang Negara, dan pemberlakuan Sistem Ekonomi Ali-Baba oleh Iskaq Tjokroadisurjo.

17. **Jawaban: c**

Berbagai upaya dilakukan Indonesia untuk memperkuat posisinya di Irian Barat, salah satunya dilakukan dengan konfrontasi politik. Pemerintah Indonesia melalui Kabinet Ali Sastroamidjojo membentuk pemerintahan sementara di Irian Barat. Langkah tersebut bertujuan untuk mendeklarasikan pembentukan Provinsi Irian Barat sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

18. **Jawaban: c**

Pembacaan Dekret Presiden 5 Juli 1959 disambut baik oleh masyarakat karena dianggap dapat menstabilkan kondisi politik di Indonesia. Dampak pembacaan Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah Kabinet Djuanda menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno.

19. **Jawaban: e**
Inflasi yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin berdampak pada merosotnya perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai cara untuk menstabilkan perekonomian yaitu membentuk Dewan Perancang Nasional, menghapus Undang-Undang Nomor 2 tahun 1959, mendeklarasikan konsep Deklarasi Ekonomi, menghimpun Dana Revolusi, dan mendevaluasi mata uang rupiah.
20. **Jawaban: b**
Untuk mengatasi masalah ekonomi masa Demokrasi Terpimpin, pada 15 Agustus 1959 pemerintah membentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas). Tugas Depernas adalah mempersiapkan undang-undang pembangunan nasional agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Ketua Depernas dijabat oleh Muh. Yamin. Ia berperan sebagai pencetus usaha-usaha dalam penyelenggaraan pembangunan.
21. **Jawaban: a**
Pemerintah Indonesia berusaha merebut Irian Barat dari kekuasaan Belanda melalui konfrontasi militer. Pada awalnya Indonesia berusaha membeli senjata ke Amerika Serikat. Cara lainnya ditempuh dengan menggerakkan rakyat melalui Tri Komando Rakyat (Trikorra) yang digagas oleh Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961.
22. **Jawaban: b**
Tujuan awal penerapan Dana Revolusi adalah mengatasi permasalahan keuangan negara. Akan tetapi, penerapan kebijakan tersebut justru menyebabkan permasalahan baru. Indonesia mengalami inflasi yang semakin tinggi dan tidak bisa dikendalikan. Pada 1959 tingkat inflasi mencapai 19,42% dan terus melonjak sampai 635,35% pada 1966.
23. **Jawaban: c**
Gerakan mahasiswa pada 1966 yang diwujudkan melalui aksi demonstrasi mencerminkan bentuk ketidaksetujuan kelompok mahasiswa terhadap pemerintahan Soekarno. Presiden Soekarno dianggap memberi celah terhadap pergerakan komunis. Oleh karena kondisi tersebut, mahasiswa angkatan '66 berusaha menentang komunisme yang tidak sejalan dengan Pancasila.
24. **Jawaban: d**
Pascapengukuhan Supersemar pada Juni 1966, terdapat ketetapan MPRS yang mengikutinya. Ketetapan tersebut meresmikan kabinet baru yaitu Kabinet Ampera. Akan tetapi, ketetapan tersebut menimbulkan dualisme kepemimpinan. Presiden Soekarno bertindak sebagai pemimpin kabinet, sedangkan Letjen Soeharto menjadi kepala pemerintahannya.
25. **Jawaban: b**
Kebijakan fusi politik atau penggabungan partai politik yang diterapkan pada masa kepemimpinan Soeharto bertujuan menjaga stabilitas pemerintahan. Selain itu, penggabungan partai politik diharapkan dapat menghindarkan konflik antarpolitical politik. Banyaknya partai politik di Indonesia menyebabkan berbagai konflik dalam pemerintahan.
26. **Jawaban: a**
Sebelum penyelenggaraan pemilu 1987, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang tersebut menjadi dasar bagi partai PPP mengganti logonya. Berdasarkan undang-undang tersebut, partai politik di Indonesia diharuskan memiliki tujuan yang sama yaitu Pancasila. Gambar Kakbah dianggap tidak relevan dengan ideologi Pancasila dan diganti dengan gambar bintang.
27. **Jawaban: a**
Presiden Soeharto berkeinginan untuk menciptakan hubungan yang baik antara militer dan sipil dengan memasukkan ABRI dalam salah satu fraksi di DPR. Berdasarkan kebijakan tersebut, tugas ABRI menjadi bertambah. Selain menjaga pertahanan dan keamanan negara, ABRI memiliki fungsi sosial dan politik sebagai warga negara.
28. **Jawaban: e**
Kemerosotan perekonomian yang terjadi sejak masa Orde Lama memicu Presiden Soeharto untuk segera memperbaikinya. Beberapa kebijakan Presiden Soeharto untuk menyeimbangkan pengeluaran negara dan menstabilkan harga kebutuhan dalam negeri yaitu penjadwalkan ulang pembayaran utang negara yang sudah jatuh tempo, serta pemberlakuan undang-undang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh angka 3) dan 4).

29. **Jawaban: b**

Posyandu yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru pada 1984 memiliki lima program utama. Program tersebut yaitu kesehatan ibu dan anak (KIA), keluarga berencana (KB), program gizi seimbang, penanggulangan diare, dan imunisasi. Posyandu merupakan usaha untuk memperbaiki kesehatan masyarakat sampai tingkat desa.

30. **Jawaban: c**

ABRI berperan aktif dalam membantu konflik yang terjadi antara Timor Timur dan pasukan Fretilin. Bantuan tersebut berupa bantuan militer yang bertujuan membebaskan rakyat Timor Timur dari Fretilin. Fretilin yang berpaham komunis dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas politik Indonesia.

B. Uraian

1. **Jawaban:**

Pemberontakan PKI pertama kali terjadi di Madiun pada 1948. Akan tetapi, pemberontakan tersebut mengalami kegagalan. PKI kemudian memberontak kembali pada 30 September 1965 yang mengakibatkan keutuhan negara Indonesia terancam. Pemberontakan 30 September 1965 dilandasi oleh doktrin nasionalisme, agama, dan komunisme (Nasakom) yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Melalui doktrin ini, PKI memiliki celah untuk menyebarkan paham komunisme di Indonesia.

2. **Jawaban:**

Peter Dale Scott dan Geoffrey Robinson merupakan dua akademisi yang mengungkapkan bahwa agen intelijen Amerika, yaitu *Central Intelligence Agency* (CIA) merupakan dalang dari peristiwa G 30 S/PKI. Keterlibatan CIA tidak lepas dari kekhawatiran Amerika Serikat terhadap perkembangan komunisme di Indonesia. CIA bekerja sama dengan militer memprovokasi PKI agar melakukan kudeta terhadap pemerintahan Soekarno.

3. **Jawaban:**

Andi Aziz melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia karena mantan anggota pasukan KNIL beranggapan bahwa pemerintah akan menggeser kekuatan pasukan KNIL dengan pasukan TNI. Pemberontakan yang dilakukan kelompok Andi Aziz juga muncul akibat per-

tentangan pendapat mengenai penggabungan Negara Indonesia Timur (NIT) ke dalam negara Republik Indonesia.

4. **Jawaban :**

Ahmad Yani merupakan salah satu tokoh yang ikut menumpas berbagai pemberontakan. Ia aktif dalam penumpasan gerakan DI/TII di Jawa Barat dengan membentuk pasukan khusus yang disebut *The Banteng Raiders*. Peran Ahmad Yani dalam mempertahankan integrasi bangsa Indonesia tampak pada operasi penumpasan PRRI yang berhasil merebut kembali Padang dan Bukittinggi. Ahmad Yani gugur dalam peristiwa G 30 S/PKI. Untuk menghormati jasanya, ia dinobatkan sebagai pahlawan revolusi.

5. **Jawaban:**

Pemilu 1955 merupakan pesta demokrasi pertama Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pemilu 1955 dikatakan demokratis karena tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Selain itu, pejabat yang menyalonkan diri sebagai anggota parlemen dalam pemilu 1955 mengundurkan diri dari jabatan politiknya.

6. **Jawaban:**

Karya sastra Indonesia mulai berkembang setelah muncul beberapa sastrawan lokal seperti Sitor Situmorang dan Pramoedya Ananta Toer. Sastrawan Indonesia sering mengangkat berbagai permasalahan bangsa sebagai sumber ide mereka untuk berkreasi. Pada 1950 Indonesia menyelenggarakan Konferensi Kebudayaan Nasional yang menghasilkan Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN). Pada 1953 BMKN memberikan penghargaan kepada budayawan dan sastrawan Indonesia untuk memotivasi agar terus berkarya.

7. **Jawaban:**

Perundingan New York berisi perjanjian antara Indonesia, Belanda, dan PBB terkait masalah Irian Barat. Isi perundingan tersebut antara lain Belanda menyerahkan Irian Barat kepada *United Nation Temporary Executive Authority* (UNTEA) selambat-lambatnya tanggal 1 Oktober 1962, putra-putri daerah Irian Barat dilibatkan dalam pemerintahan sementara PBB, angkatan perang Belanda harus segera kembali ke Belanda, dan pasukan Indonesia yang sudah berada di Irian Barat tetap tinggal di Irian Barat di bawah pemerintah sementara PBB.

8. **Jawaban:**

Kebijakan ekonomi pemerintah Orde Baru mampu menstabilkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Bahkan, pada 1984 Indonesia berhasil mencapai swasembada beras. Pencapaian ini berhasil mengubah status Indonesia dari negara pengimpor beras menjadi negara yang dapat memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada). Kebijakan ekonomi pada masa itu juga meningkatkan pendapatan nasional.

9. **Jawaban:**

Pengukuhan Supersemar pada Juni 1966 diikuti dengan keluarnya Ketetapan MPRS Nomor XIII/MPRS/1966. Ketetapan tersebut diikuti dengan peresmian kabinet baru yaitu Kabinet Ampera. Akan tetapi, ketetapan tersebut menimbulkan dualisme kepemimpinan. Presiden Soekarno bertindak sebagai pemimpin kabinet, sedangkan Letjen Soeharto menjadi kepala pemerintahannya.

Letjen Soeharto tetap harus melaporkan jalannya pemerintahan kepada Presiden Soekarno. Dualisme kepemimpinan tersebut terjadi karena terdapat dua kekuatan pemimpin.

10. **Jawaban:**

Kebijakan dekolonisasi Portugis di Timor Timur menyebabkan munculnya organisasi-organisasi politik yang memiliki visi berbeda-beda. Fretilin menginginkan kemerdekaan penuh bagi Timor Timur, UDT menghendaki Timor Timur tetap berada di bawah kekuasaan Portugis, sedangkan Apodeti menghendaki Timor Timur bergabung dengan Indonesia. Pada awalnya Fretilin bersekutu dengan UDT untuk melawan Apodeti. Akan tetapi, dalam perkembangannya, UDT mengalami konflik dengan Fretilin. Akhirnya, UDT bersatu dengan Apodeti, Kota, dan Trabalhista melawan Fretilin yang berhaluan komunis.

Remedial Semester 1

A. Pilihlah jawaban yang tepat!

1. Pemberontakan PKI di Madiun pada 1948 menjadi ancaman dari dalam negeri yang harus dihadapi pemerintah Indonesia. Pemberontakan tersebut diawali dengan . . .
 - a. penolakan Angkatan Darat terhadap ide pembentukan Angkatan Kelima
 - b. pertempuran antara pasukan pro-PKI dan pro-republik di Surakarta
 - c. perbedaan pendapat antara pemerintah dan para pemimpin PKI
 - d. kekacauan keamanan di perbatasan Jawa Tengah–Jawa Timur
 - e. kerusuhan antikomunis di daerah Keresidenan Surakarta
2. Pada 1948 Presiden Soekarno menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk memilih Muso dengan PKI-nya atau Soekarno–Hatta. Tindakan Presiden Soekarno tersebut dilakukan dengan tujuan . . .
 - a. membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia
 - b. melarang ajaran komunis dan PKI berkembang di Indonesia
 - c. menyingkirkan Amir Syarifuddin dari jabatan perdana menteri
 - d. menghancurkan pemerintah Republik Soviet yang dibentuk Muso
 - e. meminta dukungan rakyat agar turut menumpas pemberontakan PKI di Madiun
3. Pada 1965 PKI sering mengadakan latihan di Lubang Buaya. Latihan tersebut disamakan PKI sebagai . . .
 - a. latihan perang oleh Angkatan Udara
 - b. latihan baris-berbaris pasukan Cakrabirawa
 - c. latihan militer untuk kelompok petani dan buruh
 - d. upaya pemberontakan terhadap Angkatan Darat
 - e. sukarelawan untuk konfrontasi dengan Malaysia
4. Salah satu teori mengenai peristiwa G 30 S/PKI 1965 adalah keterlibatan CIA dalam upaya mengukudeta pemerintahan Presiden Soekarno. Dalam teori tersebut, keterlibatan CIA dipicu oleh . . .
 - a. kedekatan pemerintahan Presiden Soekarno dengan blok Timur
 - b. kedekatan para perwira Angkatan Darat dengan Presiden Soekarno
 - c. kedudukan PKI sebagai partai utama dalam pemerintahan Presiden Soekarno
 - d. anggapan bahwa pemerintahan Presiden Soekarno membahayakan kepentingan Inggris di Malaysia
 - e. kebijakan Presiden Soekarno menimbulkan konfrontasi dengan berbagai negara
5. Pemberontakan APRA disebut juga Peristiwa 23 Januari 1950. Peristiwa yang terjadi pada 23 Januari 1950 tersebut adalah . . .
 - a. perebutan kekuasaan sipil di Bandung
 - b. penjarahan permukiman warga di Bandung
 - c. penyerangan pasukan APRA terhadap Kota Bandung
 - d. pendeklarasian organisasi Ratu Adil di Bandung
 - e. pemberontakan bekas perwira KNIL di Bandung
6. Pembentukan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dilatarbelakangi oleh . . .
 - a. kecemburuan daerah terhadap pemerintah pusat
 - b. pergerakan kelompok separatis di sejumlah daerah
 - c. keikutsertaan KNIL dalam struktur Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat

- d. keinginan kelompok separatis untuk memisahkan diri
 - e. kesenjangan dalam kehidupan sosial di Sumatra Barat
7. Pada 10 Februari 1958 Letkol Ahmad Husein mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah. Salah satu isi ultimatum tersebut adalah . . .
- a. pasukan militer di Sumatra Barat akan memproklamasikan berdirinya PRRI
 - b. Kabinet Djuanda harus menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno dalam waktu 5×24 jam
 - c. pemerintah harus melakukan perlawanan terhadap Belanda dan NICA
 - d. pasukan TNI di seluruh Indonesia harus membentuk dewan-dewan militer
 - e. pemerintah harus menindak tegas tokoh-tokoh pro-PKI
8. Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) dideklarasikan pada 2 Maret 1957. Gerakan Permesta menginginkan adanya . . .
- a. perhatian pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah
 - b. kebebasan untuk mengatur pemerintahan sendiri
 - c. penerapan kebijakan yang lunak dan terbuka
 - d. pelaksanaan pemerintahan yang demokratis
 - e. kebijakan yang sesuai keinginan rakyat
9. Perhatikan tokoh-tokoh berikut!
- 1) Sultan Hamid II
 - 2) Anak Agung Gde Agung
 - 3) T. Mansur
 - 4) R.T. Adil Puradiredja
 - 5) R.T. Djumhana
- Tokoh BFO yang memilih bekerja sama dengan Republik Indonesia ditunjukkan oleh angka . . .
- a. 1), 2), dan 3)
 - b. 1), 2), dan 4)
 - c. 2), 3), dan 4)
 - d. 2), 4), dan 5)
 - e. 3), 4), dan 5)
10. Frans Kaisiepo pernah menolak menjadi anggota delegasi Papua dalam Konferensi Meja Bundar (KMB). Penolakan tersebut mengakibatkan Frans Kaisiepo menerima hukuman, yaitu . . .
- a. diasingkan di daerah Digul
 - b. dipekerjakan di daerah terpencil
 - c. dipindahtugaskan ke Yogyakarta
 - d. dihukum penjara dua tahun di Biak
 - e. dinonaktifkan dari anggota Partai ISI
11. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia telah mengalami dua kali perubahan pemerintahan, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Perubahan sistem pemerintahan tersebut ditandai dengan . . .
- a. penetapan Maklumat X pada 16 Oktober 1945
 - b. pembentukan kabinet pertama pada 14 November 1945
 - c. pembubaran Republik Indonesia Serikat pada 17 Agustus 1950
 - d. pengajuan Maklumat KNIP Nomor 5 tanggal 11 November 1945
 - e. perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Yogyakarta pada 14 Januari 1946
12. Rencana pembentukan PNI sebagai partai tunggal negara dibatalkan pada 31 Agustus 1945. Sebagai gantinya, Badan Pekerja KNIP mengusulkan kepada pemerintah agar . . .
- a. memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik
 - b. membebaskan rakyat menyuarakan aspirasinya melalui demonstrasi
 - c. mengadakan pemilu untuk memilih anggota badan Konstituante
 - d. melakukan perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer
 - e. mendirikan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
13. Sistem multipartai diterapkan pada masa Demokrasi Liberal. Dampak negatif penerapan sistem tersebut adalah . . .
- a. setiap partai berusaha saling menjatuhkan saat kampanye menjelang pelaksanaan pemilu 1955
 - b. keputusan yang dihasilkan parlemen hanya mengakomodasi kepentingan beberapa partai
 - c. terjadi persaingan antarfraksi di parlemen untuk saling menjatuhkan
 - d. parlemen hanya dikuasai empat partai besar pemenang pemilu 1955
 - e. parlemen terbagi menjadi beberapa faksi yang saling bertentangan

14. Perhatikan partai-partai berikut!

- 1) Partai Nasional Indonesia
- 2) Nahdatul Ulama
- 3) Masyumi
- 4) Partai Komunis Indonesia
- 5) Partai Sosialis Indonesia

Partai yang mendominasi parlemen pada masa Demokrasi Liberal ditunjukkan oleh angka

- a. 1) dan 2)
- b. 1) dan 3)
- c. 2) dan 3)
- d. 3) dan 4)
- e. 4) dan 5)

15. Perdana Menteri Wilopo menerapkan sistem *zaken kabinet* dalam kabinetnya. Sistem ini bertujuan agar

- a. parlemen tidak bisa memaksakan pendapatnya dalam program kerja kabinet
- b. kabinet mampu mengakomodasi permasalahan yang muncul di seluruh Indonesia
- c. program kerja kabinet sejalan dengan kebijakan yang direncanakan parlemen dan presiden
- d. menteri dalam kabinet tidak menyalahgunakan jabatan untuk memenuhi kepentingan pribadi
- e. menteri mampu bekerja profesional dan menyelesaikan permasalahan tanpa adanya kepentingan golongan

16. Empat partai politik yang mendapat suara terbanyak dalam pemilu 1955 ditunjukkan oleh pilihan

a.	– PNI – PKI – PSII – Masyumi
b.	– Masyumi – PSI – PNI – PKI
c.	– PNI – PKI – PSII – Masyumi
d.	– PNI – Masyumi – NU – PKI
e.	– PNI – PKI – Murba – PSII

17. *Indonesia Office* (Indof) bertugas menembus blokade ekonomi Belanda. Tugas lain Indof adalah

- a. mempromosikan produk-produk Indonesia di pasar internasional
- b. memperjuangkan kepentingan politik Indonesia di luar negeri
- c. menjalin kerja sama politik dengan negara-negara maju
- d. mengadakan hubungan dagang dengan negara lain
- e. mencari dana pinjaman luar negeri untuk Indonesia

18. Iskaq Tjokroadisurjo menggagas kebijakan sistem ekonomi Ali-Baba pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Tujuan kebijakan tersebut adalah

- a. menentukan perubahan struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional
- b. menciptakan kerja sama antara pengusaha pribumi dan pengusaha nonpribumi
- c. menghapus pengangguran di Indonesia
- d. mengurangi angka kelaparan dan kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia
- e. menanggulangi defisit anggaran pengeluaran negara sebesar Rp5,1 miliar

19. Perhatikan indikator berikut!

- 1) Kebijakan ini dikeluarkan Biro Perancang Negara.
- 2) Dilaksanakan pada 1956–1961.
- 3) Disetujui DPR pada 11 November 1958.

Indikator di atas merujuk pada kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Liberal, yaitu

- a. Gerakan Benteng
- b. sistem ekonomi Ali-Baba
- c. Gunting Sjafruddin
- d. Biro Perancang Negara
- e. Rencana Pembangunan Lima Tahun

20. Perang Korea pada awal 1950 tidak hanya berpengaruh bagi masyarakat Korea. Pengaruh Perang Korea bagi perekonomian Indonesia pada masa Demokrasi Liberal adalah

- a. peningkatan jumlah investor asing
- b. peningkatan pendapatan ekspor
- c. pemutusan kerja sama bilateral
- d. penurunan nilai tukar rupiah
- e. penurunan harga komoditas

21. Perhatikan tabel berikut!

No.	A	B
1)	Djuanda	J. Leimena
2)	Subandrio	Muh. Yamin
3)	Ruslan Abdulgani	A. H. Nasution

Tokoh yang membantu Presiden Soekarno dalam memimpin Kabinet Kerja pada masa Demokrasi Terpimpin ditunjukkan oleh kombinasi

- A1), A2), dan B1)
- A1), A2), dan B2)
- A2), A3), dan B1)
- A2), B1), dan B2)
- A3), B2), dan B3)

22. Presiden Soekarno menerapkan gagasan Nasakom sebagai cita-cita politik bangsa pada masa Demokrasi Terpimpin. Langkah Presiden Soekarno tersebut dilandasi oleh

- anggapan bahwa Pancasila sudah tidak relevan lagi
- rencana penggantian sistem pemerintahan Indonesia
- keyakinan bahwa persatuan Indonesia akan terwujud
- keinginan untuk menjadikan PKI sebagai partai penguasa
- persamaan antara kelompok nasionalis, agama, dan komunis

23. Pada 24 Juni 1960 Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955. Pembubaran tersebut dilakukan Presiden Soekarno karena

- DPR menolak penerapan ajaran Resopim
- DPR menolak RAPBN tahun 1960
- DPR menyangkal gagasan Nasakom
- anggota DPR didominasi oleh kader PKI
- anggota DPR berasal dari partai oposisi pemerintah

24. Salah satu kebijakan Presiden Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin adalah pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Salah satu tugas DPAS adalah

- memberi jawaban atas pertanyaan presiden
- menyalurkan aspirasi masyarakat Indonesia
- menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara
- mengevaluasi kinerja menteri selama satu tahun
- mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

25. Perhatikan beberapa indikator berikut!

- Pemerintahan sementara PBB menggunakan tenaga Indonesia.
- Angkatan perang Belanda secara berangsur-angsur dikembalikan.
- Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui UNTEA.
- Pemerintah Irian Barat harus diserahkan kepada Republik Indonesia.
- Pelaksanaan penyerahan Irian Barat akan selesai dalam waktu dua tahun.

Indikator yang merujuk pada isi rencana Ellsworth Bunker terkait masalah Irian Barat ditunjukkan oleh angka

- 1), 2), dan 3)
- 1), 2), dan 4)
- 2), 3), dan 4)
- 2), 3), dan 5)
- 3), 4), dan 5)

26. Perhatikan peristiwa pelaksanaan Pepera di Irian Barat pada gambar berikut!



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka (1950–1964), Citra Lamtoro Gung Persada, 1985

Salah satu keputusan yang disetujui dari peristiwa pada gambar adalah

- Irian Barat menjadi bagian dari Kerajaan Belanda
- Irian Barat memilih mendirikan pemerintahan baru
- Irian Barat menjadi bagian dari Republik Indonesia
- Indonesia menetapkan Irian Barat sebagai daerah otonomi
- Indonesia kehilangan kekuasaan di wilayah Irian Barat

27. Politik mercusuar merupakan salah satu kebijakan politik Presiden Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin. Kebijakan tersebut dijalankan pemerintah dengan cara

- a. membuat bangunan-bangunan megah dan fenomenal
- b. mengirim delegasi dalam *Asian Games* tahun 1962
- c. menjalankan konsep politik luar negeri bebas aktif
- d. menjadi tuan rumah KTT Gerakan Non-Blok 1961
- e. menentang ide pembentukan Federasi Malaysia

28. Pasangan yang tepat antara bentuk kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin dan tujuannya terdapat pada pilihan . . .

	Kebijakan	Tujuan
a.	Membentuk Depernas	Mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan.
b.	Membentuk Bappenas	Menciptakan ekonomi sosialis yang bersifat nasional.
c.	Devaluasi mata uang	Meningkatkan nilai mata uang rupiah.
d.	Menekan laju inflasi	Menanggulangi defisit anggaran APBN.
e.	Deklarasi Ekonomi	Menumbuhkan jiwa wirausaha muda Indonesia.

29. Perhatikan tabel berikut!

No.	X	Y
1)	DPA	MPR
2)	DPD	MPRS
3)	DPR	MPPR

Deklarasi Ekonomi dibentuk oleh Panitia Tiga Belas yang terdiri atas beberapa anggota yang ditunjukkan oleh kombinasi . . .

- a. X1), X2), dan Y1)
- b. X1), X3), dan Y3)
- c. X2), X3), dan Y1)
- d. X2), Y1), dan Y2)
- e. X3), Y2), dan Y3)

30. Perhatikan wacana berikut!

Salah satu kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah pada masa Demokrasi Terpimpin adalah Dana Revolusi. Dalam perkembangannya, kebijakan Dana Revolusi yang dikelola pemerintah justru menyebabkan

inflasi meningkat. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan Dana Revolusi untuk proyek mandataris presiden yang bersifat prestise politik.

Berdasarkan wacana tersebut dapat disimpulkan bahwa . . .

- a. utang-utang negara semakin meningkat karena kebijakan Dana Revolusi
- b. kebijakan Dana Revolusi sangat menguntungkan bagi pengusaha swasta
- c. pemerintah memegang peran penting dalam pengalokasian Dana Revolusi
- d. kebijakan Dana Revolusi bermanfaat untuk meningkatkan prestise pemerintah
- e. lonjakan tingkat inflasi tidak akan terjadi jika tidak ada kebijakan Dana Revolusi

31. Salah satu peristiwa yang menandai masa transisi 1966–1967 adalah keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Dampak dari keluarnya Supersemar adalah . . .

- a. berkembangnya paham liberalisme
- b. adanya perpecahan di lembaga legislatif
- c. munculnya dualisme kepemimpinan nasional
- d. berkembangnya pengaruh asing dalam pemerintahan
- e. adanya ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah

32. Pada 1967 MPRS mengadakan sidang istimewa. Agenda dalam sidang tersebut adalah . . .

- a. memberikan jabatan presiden kepada Letnan Jenderal Soeharto
- b. mengembalikan jabatan presiden kepada Soekarno
- c. mengamankan situasi pemerintahan
- d. membentuk pemerintahan sementara
- e. melegalkan kedudukan Supersemar

33. Salah satu usaha menciptakan stabilitas politik pemerintah Orde Baru adalah fusi partai politik. Kebijakan ini dilakukan untuk . . .

- a. mengurangi partisipasi organisasi politik
- b. menyamakan pandangan organisasi
- c. menyederhanakan sistem pemilu
- d. menerapkan ideologi Pancasila
- e. menekan tindak kekerasan

34. Dalam pelaksanaannya, konsep dwifungsi ABRI menjadi alat legitimasi kekuasaan Orde Baru. Adapun konsep awal dwifungsi ABRI bertujuan untuk
- menyeimbangkan peran sosial dan militer dalam diri anggota ABRI
 - mengembalikan peran sosial anggota militer dalam masyarakat
 - mengakomodasi keterlibatan langsung militer dalam pemerintahan
 - menjalin hubungan harmonis antara sipil dan militer
 - meningkatkan kerja sama antara sipil dan militer
35. Jose Ramos Horta merupakan salah satu tokoh partai di Timor Timur. Keinginan Jose Ramos Horta adalah
- pembentukan pemerintahan komunis
 - kemerdekaan Timor Timur seutuhnya
 - penyatuan Timor Timur dengan Portugis
 - Timor Timur bergabung dengan Indonesia
 - integrasi seluruh Pulau Timor yang merdeka
36. Pemerintah Orde Baru selalu menindak tegas media yang menentang pemerintahan. Salah satu indikator yang menunjukkan kondisi tersebut adalah
- pembentukan fraksi ABRI dalam DPR
 - pembentukan Badan Intelijen Negara (BIN)
 - penyelenggaraan pemilu selama periode tertentu
 - pemberedelan media pers yang kritis terhadap pemerintah
 - penyelenggaraan rencana pembangunan lima tahun (repelita)
37. Pada masa Orde Baru pemerintah melaksanakan pembangunan infrastruktur. Tujuan pembangunan infrastruktur adalah
- meningkatkan pendapatan asli daerah
 - memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri
 - mengendalikan peredaran uang dalam masyarakat
 - meningkatkan pendapatan ekspor dari sektor pertanian
 - meningkatkan dan memperlancar kegiatan perekonomian
38. Angka partisipasi pendidikan dasar pada masa Orde Baru mengalami peningkatan. Kondisi ini merupakan salah satu keberhasilan kebijakan pembangunan pendidikan yaitu
- penetapan program wajib belajar sembilan tahun
 - penetapan anggaran pendidikan sekira 20% dari APBN
 - pengadaan sekolah gratis hingga jenjang perguruan tinggi
 - pengiriman tenaga pendidik ke negara-negara tetangga
 - pembentukan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
39. Pemerintah Orde Baru berusaha menciptakan stabilitas ekonomi dengan cara menjalin kerja sama dengan IMF. Kerja sama ini dilakukan dengan tujuan
- melancarkan kegiatan perdagangan internasional
 - memperoleh bantuan dana untuk pembangunan nasional
 - menjalin kerja sama ekonomi dengan negara anggota IMF
 - memperoleh bantuan finansial untuk melunasi utang negara
 - menarik investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia
40. Pemilu 1997 merupakan pemilu terakhir pada masa Orde Baru. Penyelenggaraan pemilu 1997 belum menjadi momentum terjadinya suksesi kepemimpinan nasional. Indikator yang membuktikan pernyataan tersebut adalah
- pemilihan presiden dilakukan oleh MPR
 - pemilu tidak berlangsung secara terbuka
 - Soeharto kembali terpilih sebagai presiden
 - pemilu 1997 tidak melibatkan rakyat secara langsung
 - antusiasme rakyat mengikuti pemilu mengalami penurunan

B. Kerjakan soal-soal berikut!

- Menjelang pemberontakan G 30 S/PKI, kondisi politik, ekonomi, dan sosial Indonesia mulai tidak stabil. Deskripsikan ketidakstabilan tersebut!

2. Ketidakseimbangan pembangunan antara pusat dan daerah menjadi salah satu pemicu munculnya pemberontakan di Indonesia. Jelaskan pernyataan tersebut!
3. Ahmad Yani dikenal sebagai salah satu pejuang integrasi bangsa Indonesia. Jelaskan peranan Ahmad Yani dalam memperjuangkan integrasi pada masa revolusi kemerdekaan!
4. Bagaimana peran partai politik pada masa Demokrasi Liberal?
5. Dalam neraca perekonomian, pada 1952 pemerintah Indonesia mengalami defisit keuangan. Apa penyebab defisit di Indonesia pada saat itu?
6. Pada masa Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno memperkenalkan ajaran Resopim. Jelaskan inti ajaran Resopim dan dampak pelaksanaannya!
7. Salah satu program yang dikeluarkan oleh Dewan Perancang Nasional pada 1961 adalah Program Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Dalam perkembangannya, program tersebut mengalami kegagalan. Mengapa demikian?
8. Dalam merumuskan kebijakan ekonomi masa Orde Baru, Presiden Soeharto dibantu oleh tim penasihat ekonomi yang terdiri atas para ekonom Universitas Indonesia. Jelaskan hasil pemikiran para ekonom Universitas Indonesia untuk menciptakan stabilitas ekonomi!
9. Indoktrinasi Pancasila pada masa Orde Baru berkaitan erat dengan Eka Prasetya Pancakarsa. Jelaskan usaha pemerintah Orde Baru melaksanakan Eka Prasetya Pancakarsa!
10. Pembangunan dalam bidang ekonomi pada masa Orde Baru masih rapuh. Buatlah ulasan singkat yang mendukung pernyataan tersebut!

Kunci Jawaban dan Pembahasan Remedial Semester 1

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: b**

Pemberontakan PKI di Madiun pada 1948 berawal dari pertempuran terbuka antara kekuatan bersenjata pro-PKI dan pasukan pro-pemerintah Republik Indonesia yang terjadi sejak awal September 1948 di Surakarta. Pasukan pemerintah berhasil memukul mundur pasukan pro-PKI. Pasukan pro-PKI kemudian mengungsi ke Madiun. Di Madiun inilah PKI mematangkan rencananya untuk mengadakan pemberontakan.

2. **Jawaban: e**

Puncak gerakan PKI terjadi pada 18 September 1948 yang ditandai dengan berdirinya Front Nasional. Selain itu, Muso menyerang pemerintah dengan menyatakan bahwa Soekarno–Hatta telah bekerja sama dengan Belanda dan Inggris. Menghadapi masalah tersebut, pada 19 September 1948 Presiden Soekarno melalui siaran radio menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memilih Muso dengan PKI-nya atau Soekarno–Hatta. Tindakan tersebut dilakukan untuk meminta dukungan rakyat agar turut berperan aktif menumpas pemberontakan PKI di Madiun.

3. **Jawaban: e**

Pada September 1965 PKI mengadakan latihan kemiliteran bagi para anggota dan pengikutnya di Lubang Buaya. Latihan tersebut disamakan sebagai latihan sukarelawan dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia. Dalam latihan itu, PKI memanfaatkan fasilitas milik AURI.

4. **Jawaban: a**

Central Intelligence Agency (CIA) merupakan organisasi intelijen pemerintah Amerika Serikat. Peter Dale Scott dan Geoffrey Robinson mengungkapkan bahwa CIA terlibat dalam peristiwa G 30 S/PKI. Keterlibatan tersebut didorong oleh upaya Amerika Serikat membendung pengaruh komunisme di wilayah Indonesia. Sementara itu, pemerintahan Presiden Soekarno justru condong ke arah negara-negara blok Timur seperti Uni Soviet dan Tiongkok. Oleh karena itu, CIA bekerja sama dengan internal Angkatan Darat untuk memprovokasi PKI agar melakukan kudeta.

5. **Jawaban: c**

Pada 23 Januari 1950 pasukan APRA menyerang Kota Bandung. Pasukan APRA berhasil merebut sejumlah tempat penting di Bandung. Dalam serangan ini pasukan APRA melakukan pembantaian dan pembunuhan terhadap setiap anggota TNI yang ditemuinya. Markas Divisi Siliwangi di Bandung juga berhasil dikuasai. Oleh karena terjadi pada 23 Januari 1950, peristiwa penyerangan ini dikenal dengan nama peristiwa 23 Januari 1950.

6. **Jawaban: a**

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, pemerintah pusat melakukan pembangunan besar-besaran. Akan tetapi, pemerintah seperti mengabaikan daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Kondisi inilah yang melatarbelakangi pembentukan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatra Barat.

7. **Jawaban: b**

Pada 10 Februari 1958 Letkol Ahmad Husein mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah. Isi ultimatum tersebut sebagai berikut.

- 1) Mendesak Kabinet Djuanda supaya mengundurkan diri dan mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno.
- 2) Mendesak pejabat presiden, Mr. Sartono untuk membentuk kabinet baru yang bebas dari pengaruh PKI (komunis).
- 3) Mendesak kabinet baru tersebut diberi mandat sepenuhnya untuk bekerja hingga pelaksanaan pemilihan umum.
- 4) Mendesak Presiden Soekarno membatasi kekuasaannya dan mematuhi konstitusi.
- 5) Jika tuntutan tersebut di atas tidak dipenuhi dalam waktu 5×24 jam, Dewan Perjuangan akan mengambil kebijakan sendiri.

Jadi, jawaban yang tepat terdapat pada pilihan **b**.

8. **Jawaban: a**

Permesta dideklarasikan oleh Letkol Ventje Sumual, pemimpin sipil dan militer wilayah Indonesia Timur. Gerakan Permesta menghendaki pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap pemerintah daerah. Keinginan inilah yang melatarbelakangi pemberontakan Permesta di Sulawesi. Latar belakang ini sama dengan latar belakang munculnya PRRI di Sumatra Barat.

9. **Jawaban: d**

Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO) merupakan forum komunikasi negara-negara federal yang terbentuk atas inisiatif H.J. van Mook pada 1948. Dalam BFO terdapat dua kubu, yaitu kubu pro-Belanda dan kubu pro-Indonesia. Kubu pro-Indonesia memilih bekerja sama dengan Republik Indonesia untuk membentuk Negara Indonesia Serikat. Kubu ini dipelopori oleh Ide Anak Agung Gde Agung (Negara Indonesia Timur) serta R.T. Adil Puradiredja dan R.T. Djumhana (Negara Pasundan). Sementara itu, kubu pro-Belanda ingin mempertahankan kerja sama BFO dengan Belanda. Kubu ini dipimpin oleh Sultan Hamid II (Pontianak) dan T. Mansur (Sumatra Timur). Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan angka **2), 4), dan 5)**.

10. **Jawaban: b**

Frans Kaisiepo merupakan salah satu tokoh dari Papua yang memperjuangkan integrasi Papua ke wilayah NKRI. Dalam kariernya, ia pernah ditawarkan Belanda untuk menjadi anggota delegasi *Nederlands Nieuwe Guinea* dalam Konferensi Meja Bundar (KMB). Akan tetapi, tawaran tersebut ditolak oleh Frans Kaisiepo. Akibat penolakan tersebut, Frans Kaisiepo diasingkan dan dipekerjakan oleh Belanda di daerah terpencil.

11. **Jawaban: b**

Sistem presidensial diberlakukan di Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Tidak sampai satu tahun setelah kemerdekaan, sistem pemerintahan presidensial digantikan oleh sistem parlementer. Pemberlakuan sistem parlementer ditandai dengan pembentukan kabinet parlementer pertama pada 14 November 1945 dengan Sutan Sjahrir sebagai perdana menteri. Pelaksanaan sistem parlementer pertama ini masih menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

12. **Jawaban: a**

Keputusan Presiden Soekarno menetapkan PNI sebagai partai negara (*staatspartij*) mendapat kritik dan penolakan dari berbagai pihak karena menimbulkan kesan adanya partai tunggal. Penolakan tersebut disampaikan pada 31 Agustus 1945 dan ditindaklanjuti dengan membatalkan PNI sebagai partai tunggal. Menghadapi kondisi tersebut, Badan Pekerja KNIP mengusulkan kepada pemerintah melalui Presiden Soekarno agar memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk mendirikan partai politik.

13. **Jawaban: c**

Salah satu corak politik pada masa Demokrasi Liberal adalah sistem multipartai. Parlemen yang terbentuk pun terdiri atas beberapa partai. Sistem ini berdampak negatif karena memicu persaingan antarfraksi partai politik di parlemen untuk saling menjatuhkan. Apabila sebuah fraksi dalam parlemen tidak setuju dengan kebijakan fraksi pendukung pemerintahan, fraksi tersebut akan berusaha menjatuhkan.

14. **Jawaban: b**

Meskipun menganut sistem multipartai, struktur parlemen pada masa Demokrasi Liberal hanya didominasi dua partai besar, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dipimpin Soekarno dan Masyumi yang dipimpin Moh. Natsir. Partai-partai lain dalam parlemen berlomba untuk berkoalisi dengan PNI dan Masyumi. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh angka 1) dan 3).

15. **Jawaban: e**

Salah satu aspek menarik dari Kabinet Wilopo adalah penerapan sistem *zaken kabinet*, yaitu kabinet yang menteri-menterinya terdiri atas ahli di bidangnya. Dengan sistem ini, Wilopo berharap kabinet mampu bekerja profesional dan menyelesaikan permasalahan bangsa tanpa adanya kepentingan golongan atau kelompok.

16. **Jawaban: d**

Pemilu 1955 diikuti partai politik, organisasi, dan perorangan. Empat partai politik yang meraih perolehan suara terbanyak dalam pemilu 1955 sebagai berikut.

- 1) PNI
- 2) Masyumi
- 3) NU
- 4) PKI

Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh pilihan d.

17. **Jawaban: b**

Indonesia Office (Indof) adalah perwakilan resmi Indonesia di Singapura yang didirikan pada 1947. Indof bertugas memperjuangkan kepentingan politik Indonesia di luar negeri, menembus blokade ekonomi Belanda, dan melakukan perdagangan barter. Badan ini dipimpin oleh Oetoyo Ramelan dibantu beberapa staf yaitu Soerjono Daroesman, Zairin Zain, Thararudin Ahmad, Soeroso, dan Tamtono. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh pilihan b.

18. **Jawaban: b**

Iskaq Tjokroadisurjo merupakan pencetus gagasan ekonomi Ali-Baba. Tujuan kebijakan ini adalah menciptakan kerja sama antara pengusaha pribumi (Ali) dan pengusaha nonpribumi (Baba). Kebijakan ini mendorong berkembangnya pengusaha swasta nasional pribumi dalam usaha merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.

19. **Jawaban: e**

Indikator pada soal merupakan keterangan yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT). Pada 1957 sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Pembiayaan RPLT diperkirakan mencapai Rp12,5 miliar. Sementara itu, gerakan Benteng dicetuskan Sumitro Djojohadikusumo. Sistem ekonomi Ali-Baba merupakan kebijakan ekonomi yang dicetuskan Iskaq Tjokroadisurjo. Gunting Sjafruddin merupakan kebijakan ekonomi yang digagas oleh Sjafruddin Prawiranegara. Biro Perancang Negara merupakan badan yang dibentuk untuk menyusun rencana pembangunan ekonomi pada masa Demokrasi Liberal. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh pilihan e.

20. **Jawaban: b**

Perang Korea pada awal tahun 1950-an justru menguntungkan bagi perekonomian Indonesia. Keadaan itu ditunjukkan dengan tingginya harga komoditas sehingga meningkatkan pendapatan ekspor.

21. **Jawaban: a**

Setelah pembacaan Dekret Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno membubarkan Kabinet Karya digantikan Kabinet Kerja. Kabinet Kerja dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Dalam memimpin Kabinet Kerja, Presiden Soekarno dibantu tiga tokoh, yaitu Djuanda bertindak sebagai menteri pertama dengan dua wakilnya, yaitu J. Leimena dan Subandrio. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh kombinasi A1), A2), dan B1).

22. **Jawaban: c**

Bagi Presiden Soekarno, konsep Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom) merupakan cerminan paham berbagai golongan dalam masyarakat. Presiden Soekarno yakin bahwa dengan menerima dan melaksanakan Nasakom, persatuan Indonesia akan terwujud. Ajaran Nasakom mulai disebarkan kepada masyarakat. Penerapan ajaran Nasakom sama saja dengan upaya untuk memperkuat kedudukan presiden karena jika menolak ajaran Nasakom sama saja dengan menolak presiden.

23. **Jawaban: b**

Pada masa Demokrasi Terpimpin beberapa fraksi dalam DPR tidak seluruhnya mendukung pemerintahan Presiden Soekarno. Akibatnya, terjadi konflik antara Presiden Soekarno dan DPR. Konflik tersebut semakin memuncak ketika DPR menolak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno pun menjadikan masalah ini sebagai dalih untuk membubarkan DPR. Akhirnya, pada 24 Juni 1960 Presiden Soekarno secara resmi membubarkan DPR hasil pemilu 1955.

24. **Jawaban: e**

Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dibentuk Presiden Soekarno berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1959. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. Dalam pelaksanaannya, DPAS berada di bawah presiden karena presiden menjadi ketua DPAS.

25. **Jawaban: e**

Isi rencana Ellsworth Bunker sebagai berikut.

- 1) Pemerintah Irian Barat harus diserahkan kepada Republik Indonesia.
- 2) Rakyat Irian Barat diberi kesempatan menentukan pendapatnya agar tetap berada dalam wilayah Republik Indonesia atau memisahkan diri.
- 3) Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui suatu badan pemerintahan PBB, yaitu *United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA).
- 4) Pelaksanaan penyerahan Irian Barat akan selesai dalam waktu dua tahun.

Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh angka 3), 4), dan 5).

26. **Jawaban: c**

Gambar pada soal adalah pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat. Perwakilan PBB yang menghadiri dan ikut mengawasi proses berlangsungnya Pepera membawa hasil Pepera dalam Sidang Umum ke-24 PBB pada November 1969. Dewan Musyawarah Pepera dengan suara bulat memutuskan bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dari Republik Indonesia. Sidang Umum PBB tanggal 19 November 1969 pun menyetujui hasil Pepera tersebut.

27. **Jawaban: a**

Politik mercusuar merupakan politik untuk membangun kemegahan/keindahan dalam pergaulan antarbangsa di dunia. Pelaksanaan politik mercusuar dilakukan dengan cara membuat bangunan-bangunan megah dan fenomenal seperti stadion Gelora Bung Karno, Jembatan Semanggi, dan Monumen Nasional.

28. **Jawaban: c**

Pasangan yang tepat antara kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin dengan tujuan pembentukannya sebagai berikut.

No.	Kebijakan	Tujuan
1)	Membentuk Depernas	Mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional berencana.
2)	Membentuk Bappenas	Menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan.
3)	Devaluasi mata uang	Meningkatkan nilai mata uang rupiah.
4)	Menekan laju inflasi	Mengurangi jumlah uang beredar.
5)	Deklarasi Ekonomi	Menciptakan ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.

Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh pilihan c.

29. **Jawaban: b**

Pemerintah membentuk Panitia Tiga Belas dalam rangka upaya memperbaiki ekonomi. Panitia tersebut terdiri atas ahli ekonomi, ahli politik, anggota Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR), anggota DPR, dan anggota DPA. Panitia tersebut menghasilkan konsep yang disebut Deklarasi Ekonomi (Dekon) sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan Ekonomi Terpimpin. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh kombinasi X1), X3), dan Y3).

30. **Jawaban: d**

Wacana pada soal terkait dengan kebijakan Dana Revolusi. Kebijakan Dana Revolusi berhasil menarik dana dari perusahaan atau perorangan yang mendapat fasilitas kredit dalam jumlah tertentu. Akan tetapi, dana tersebut justru digunakan pemerintah untuk membiayai proyek mandataris presiden. Kondisi ekonomi dalam negeri pun dikorbankan akibat proyek-proyek tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemerintah memegang peran penting

dalam pengalokasian Dana Revolusi. Pengalokasian Dana Revolusi yang kurang tepat justru berdampak pada meningkatnya laju inflasi.

31. **Jawaban: c**

Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dikeluarkan Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966. Supersemar berisi instruksi kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk memulihkan keadaan dan menjaga keamanan. Akan tetapi, dalam perkembangannya Supersemar menyebabkan munculnya dualisme kepemimpinan di Indonesia.

32. **Jawaban: a**

Setelah MPRS menolak isi pertanggungjawaban Presiden Soekarno, DPR-GR segera mengeluarkan memorandum untuk meminta MPRS mengadakan sidang istimewa. Sesuai isi memorandum DPR-GR, sidang istimewa MPRS diagendakan untuk mencabut jabatan presiden dari Soekarno dan menyerahkannya kepada Soeharto selaku pemegang mandat Supersemar.

33. **Jawaban: d**

Upaya penyederhanaan partai politik pada awalnya mendapat penolakan dari partai-partai yang digabung. Akan tetapi, akhirnya partai-partai tersebut mengikuti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru. Kebijakan penyederhanaan partai ini dilanjutkan dengan upaya menyamakan ideologi partai, yaitu menerapkan ideologi Pancasila.

34. **Jawaban: a**

Peran anggota ABRI dalam bidang militer harus seimbang dengan peran mereka sebagai warga negara dalam bidang sosial dan politik. Pemikiran inilah yang melahirkan konsep dwifungsi ABRI. Oleh karena itu, pada masa ini tidak jarang anggota militer yang menjadi pejabat sipil, seperti kepala daerah atau anggota DPR/MPR.

35. **Jawaban: b**

Jose Ramos Horta merupakan pemimpin *Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente* (Fretilin). Fretilin merupakan salah satu partai politik yang memperjuangkan kemerdekaan rakyat Timor Timur. Bersama Francisco Xavier do Amaral, Jose Ramos Horta memimpin Fretilin memperjuangkan kemerdekaan penuh bagi rakyat Timor Timur. Perjuangan Fretilin dilakukan dengan cara mengangkat senjata.

36. **Jawaban: d**

Stabilitas keamanan merupakan tujuan yang hendak dicapai pemerintah Orde Baru. Hal tersebut kemudian diimplementasikan dalam berbagai kebijakan yang cenderung bersifat represif, seperti pemberedelan media pers yang kritis terhadap pemerintah. Media-media pers yang kritis terhadap pemerintah akan dicabut SIT dan SIUPP-nya sehingga dilarang terbit.

37. **Jawaban: e**

Pemerintah Orde Baru melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan ekonomi diikuti dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan sarana transportasi. Pembangunan sarana infrastruktur ini dilakukan untuk meningkatkan dan memperlancar kegiatan perekonomian.

38. **Jawaban: a**

Salah satu program pendidikan pada masa Orde Baru adalah kebijakan wajib belajar sembilan tahun. Hal ini dilakukan dengan penyelenggaraan pendidikan selama enam tahun di sekolah dasar dan tiga tahun di sekolah menengah pertama. Kebijakan ini mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan dasar.

39. **Jawaban: e**

Pada awal Orde Baru, Indonesia menjalin kerja sama dengan IMF. Kerja sama ini tidak lepas dari usaha pemerintah Orde Baru mengembalikan kepercayaan negara-negara asing. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan para investor asing bersedia menanamkan modal di Indonesia. Dalam perkembangannya, pemerintah Indonesia sangat bergantung dengan bantuan IMF.

40. **Jawaban: c**

Suksesi pemerintahan setelah pemilu 1997 tidak terlaksana karena dalam pemilu 1997 Golkar memperoleh kemenangan. Hasil pemilu 1997 menjadikan Soeharto kembali terpilih sebagai presiden Indonesia periode 1998–2003. Adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di tubuh pemerintahan mulai memunculkan rasa ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Kondisi tersebut memicu terjadinya krisis politik di Indonesia pada periode akhir kekuasaan Orde Baru.

B. Uraian

1. Jawaban:

Menjelang pemberontakan G 30 S/PKI, kondisi Indonesia diwarnai tindakan sepihak yang dilancarkan PKI dan pendukungnya. PKI mendorong para petani dan buruh untuk mengambil alih tanah dari para tuan tanah. Aksi sepihak ini terjadi di Bali, Jawa, dan Sumatra Utara. Konflik juga terjadi dalam kehidupan seni. Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang berafiliasi dengan PKI mengintimidasi para seniman dan budayawan yang tidak mendukung ajaran Nasakom.

2. Jawaban:

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, pemerintah pusat melakukan pembangunan besar-besaran. Akan tetapi, pemerintah seolah mengabaikan pembangunan di daerah. Beberapa tokoh menganggap pemerintah mengabaikan kehidupan masyarakat di daerah-daerah terutama di luar Pulau Jawa. Oleh karena itu, muncul pemberontakan yang bertujuan mengingatkan bahwa pemerintah pusat mempunyai daerah-daerah yang harus diperhatikan dan dikembangkan demi kemajuan dan keutuhan negara. Beberapa pemberontakan yang terjadi dengan latar belakang demikian adalah pemberontakan PRRI dan Permesta.

3. Jawaban:

Pada masa revolusi kemerdekaan, Ahmad Yani mendapat tugas menumpas pemberontakan DI/TII di Jawa Barat. Tugas ini diwujudkan dengan membentuk pasukan khusus yang disebut *Banteng Raiders*. Pasukan ini berhasil menjalankan tugasnya dengan baik sehingga pemberontakan DI/TII berhasil dipadamkan.

4. Jawaban:

Demokrasi Liberal memberi kesempatan luas kepada partai-partai politik untuk tumbuh dan berkembang. Partai politik dapat menempatkan wakilnya dalam kabinet. Selanjutnya, partai itu disebut partai pemerintah. Partai yang tidak memiliki wakil di pemerintahan disebut partai oposisi. Partai oposisi inilah yang selalu menjatuhkan kabinet yang sedang memerintah. Pada sistem Demokrasi Liberal, partai-partai besar memiliki partisipasi yang besar pula dalam pemerintahan. Partisipasi ini terjadi karena kabinet

yang bertanggung jawab kepada parlemen merupakan kekuatan berdasarkan pemberlakuan UUDS 1950.

5. Jawaban:

Beberapa penyebab terjadinya defisit perekonomian di Indonesia pada 1952 sebagai berikut.

- Tidak terdapat kontinuitas dalam penerimaan karena penerimaan hanya bergantung pada pajak-pajak tidak langsung.
- Current expenditures* (pengeluaran yang sedang berjalan) meningkat akibat perluasan program pemerintah, meluasnya birokrasi, dan pekerjaan-pekerjaan yang tidak efisien.

6. Jawaban:

Resopim merupakan singkatan dari Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional. Ajaran Resopim diumumkan Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1961. Inti ajaran Resopim adalah seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, dijiwai oleh sosialisme, dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yang disebut Panglima Besar Revolusi (PBR), yaitu Presiden Soekarno. Sementara itu, dampak pelaksanaan Resopim adalah kedudukan lembaga tinggi dan tertinggi negara ditetapkan di bawah presiden.

7. Jawaban:

Program Pembangunan Nasional Semesta Berencana disusun oleh Muhammad Yamin yang disesuaikan dengan Manipol-USDEK. Program ini diresmikan Presiden Soekarno pada 1 Januari 1961. Akan tetapi, program tersebut gagal karena beberapa faktor, salah satunya adalah aspek persiapan seperti survei lapangan yang kurang. Selain itu, pemerintah justru mengeluarkan banyak dana dalam upaya merebut kembali Irian Barat dan kampanye militer dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia.

8. Jawaban:

Dari hasil pemikiran para ekonom UI, dirumuskan tiga usaha yang harus dilakukan pemerintah Orde Baru untuk mewujudkan stabilitas ekonomi Indonesia. Ketiga usaha tersebut yaitu mengembalikan kepercayaan luar negeri dengan menjadwalkan pelunasan utang luar negeri, mengendalikan inflasi melalui program impor besar-besaran, dan mengundang investor, baik asing maupun lokal untuk menanam modal di Indonesia.

9. Jawaban:

Untuk melaksanakan Eka Prasetya Pancakarsa pemerintah Indonesia melaksanakan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Pelaksanaan penataran P4 dikoordinasi oleh Badan Pembinaan Pendidikan dan Pelaksana P4 (BP7). Semua pelajar sekolah menengah, PNS, dan pegawai BUMN wajib mengikuti penataran P4.

10. Jawaban:

Perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru memang mengalami peningkatan. Akan tetapi, secara fundamental pembangunan yang dilakukan tidak merata. Rapuhnya perekonomian negara berawal dari distribusi hasil pembangunan dan pemanfaatan dana pembangunan yang tidak dibarengi kontrol efektif dari pemerintah. Selain itu, pada masa ini pembangunan perekonomian hanya dikuasai oleh golongan tertentu sehingga menimbulkan kesenjangan. Kondisi inilah yang menyebabkan perekonomian Indonesia masih rapuh.



Indonesia pada Masa Reformasi

A. Masa Akhir Orde Baru

Uji Kompetensi 1

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: e**

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Orde Baru semakin berkurang karena terjadinya ketidakstabilan kondisi ekonomi, politik, dan hukum di Indonesia. Kondisi tersebut semakin memburuk akibat politik pemerintah Orde Baru tidak transparan dan diwarnai praktik KKN. Puncaknya, pada 1997–1998 terjadi krisis ekonomi yang kemudian meluas menjadi krisis multidimensional hingga meruntuhkan pemerintahan Orde Baru.

2. **Jawaban: a**

Pada 1997 perekonomian dunia mengalami ketidakstabilan. Kondisi tersebut mengakibatkan menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada 1998, nilai tukar rupiah merosot hingga Rp 17.000,00/US\$.

3. **Jawaban: e**

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada 1997 berkembang menjadi krisis multidimensional karena berdampak pada kondisi sosial dan politik Indonesia. Krisis multidimensional pada 1997 merupakan suatu kondisi saat Indonesia sedang berada pada masa genting akibat ketidakstabilan situasi ekonomi yang kemudian merembet pada ketidakstabilan politik, hukum, dan kepercayaan masyarakat. Terjadinya inflasi, aksi protes masyarakat, ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah, hingga maraknya pelanggaran HAM menandai terjadinya krisis multidimensional.

4. **Jawaban: e**

Krisis ekonomi 1997 merupakan salah satu penyebab runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Ketergantungan Indonesia pada modal asing menyebabkan utang luar negeri semakin membengkak. Pengaruh globalisasi, dominasi kekuatan pasar, lemahnya fundamental ekonomi perusahaan, dan lemahnya kepercayaan dalam negeri merupakan faktor-faktor penyebab keterpurukan ekonomi pada masa Orde Baru. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh pernyataan angka 3), 4), dan 5).

5. **Jawaban: b**

Pemilu 1997 yang dilanjutkan dengan sidang umum MPR pada Maret 1998 memilih kembali secara aklamasi Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia untuk ketujuh kalinya. Terpilihnya Presiden Soeharto mendapat penolakan keras dari mahasiswa. Hingga akhirnya mahasiswa menuntut Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya.

6. **Jawaban: c**

Selain menuntut Presiden Soeharto turun dari kursi kepemimpinan Indonesia, beberapa tuntutan reformasi yang diajukan mahasiswa sebagai berikut.

- 1) Suksesi kepemimpinan nasional.
- 2) Amandemen UUD 1945.
- 3) Pemberantasan KKN.
- 4) Penghapusan dwifungsi ABRI.
- 5) Penegakan supremasi hukum.
- 6) Pelaksanaan otonomi daerah.

Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh pilihan c.

7. **Jawaban: b**

Salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang sering terjadi di Indonesia adalah memberikan pendapat secara bebas. Hak mengemukakan pendapat dimuat dalam UUD 1925 Pasal 28 E ayat (3) yang berisi "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Pembubaran demonstrasi Universitas Trisakti oleh aparat keamanan saat melakukan demonstrasi merupakan pelanggaran HAM karena telah menghalangi mahasiswa dalam mengemukakan pendapat di depan umum.

8. **Jawaban: b**

Pada 21 Mei 1998 Presiden Soeharto membacakan pidato pengunduran dirinya. Selanjutnya, B.J. Habibie dilantik sebagai presiden menggantikan Soeharto. Pidato pengunduran diri Presiden Soeharto di Istana Merdeka, Jakarta menandai berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh pilihan c.

9. **Jawaban: e**

Dalam Kabinet Pembangunan VII, Presiden Soeharto menempatkan putrinya Siti Hardiyanti Rukmana sebagai Menteri Sosial. Selain itu, Presiden Soeharto menempatkan orang terdekatnya Bob Hasan sebagai menteri perdagangan dan perindustrian. Penunjukan menteri-menteri tersebut menunjukkan adanya praktik nepotisme di tubuh pemerintahan. Kondisi ini memunculkan rasa ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dan memicu terjadinya krisis politik pada periode akhir kekuasaan Orde Baru.

10. **Jawaban: b**

Kesadaran masyarakat untuk melakukan perbaikan melahirkan agenda reformasi dalam berbagai bidang. Dalam bidang politik, agenda reformasi dilakukan dengan memberikan batasan terhadap pemegang jabatan presiden, pelaksanaan pemilu yang demokratis, dan pemilihan anggota legislatif secara langsung melalui pemilu. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh angka 1), 2), dan 4).

B. Uraian

1. **Jawaban:**

Akibat krisis moneter di Thailand, mata uang rupiah mengalami kemerosotan hingga 9%. Kondisi rupiah yang semakin melemah

menyebabkan terjadinya krisis bahan makanan sehari-hari sehingga masyarakat sulit memperoleh makanan pokok. Selain krisis bahan makanan, pelemahan rupiah berdampak pada kebangkrutan perusahaan-perusahaan di Indonesia yang diiringi dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran. Ketergantungan Indonesia pada aliran modal asing juga menyebabkan utang luar negeri semakin membengkak.

2. **Jawaban:**

Krisis ekonomi 1997 berkembang menjadi krisis multidimensional. Penyebabnya adalah harga bahan-bahan pokok melonjak, bangkrutnya perusahaan yang diiringi pemutusan hubungan kerja, serta kenaikan harga BBM. Kondisi tersebut menimbulkan kekacauan dan kemarahan rakyat. Dalam situasi krisis yang semakin mendalam, gangguan sosial tidak terelakkan. Pada awal 1998 di beberapa kota terjadi kerusuhan antiTionghoa, kelompok etnik yang dianggap mendominasi perekonomian Indonesia. Selain itu, sikap Presiden Soeharto yang memasukkan orang-orang terdekatnya dalam pemerintahan menimbulkan tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah menurun.

3. **Jawaban:**

Pada masa Orde Baru kekuasaan kehakiman sering dimanfaatkan para penguasa. Selain itu, hukum dijadikan sebagai pembenaran atas kebijaksanaan penguasa. Adanya penyimpangan dalam bidang hukum pada masa Orde Baru membuat masyarakat menghendaki reformasi di bidang hukum untuk meluruskan masalah pada posisi yang sebenarnya.

4. **Jawaban:**

Krisis multidimensional menjadi penyebab utama yang menjatuhkan Presiden Soeharto dari kekuasaannya. Kondisi Indonesia yang sedang tidak stabil akibat krisis multidimensional mendorong mahasiswa untuk melakukan gerakan reformasi. Pada awalnya gerakan reformasi yang dilakukan mahasiswa untuk menuntut perbaikan ekonomi. Akan tetapi, setelah terpilihnya Soeharto sebagai presiden untuk ketujuh kalinya, mahasiswa menuntut pergantian pemimpin. Pada 18 Mei 1998 mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR/MPR. Pada hari itu pimpinan DPR/MPR Harmoko meminta Soeharto untuk mundur dari jabatannya. Soeharto yang menyadari posisinya semakin lemah akhirnya memutuskan

untuk mengundurkan diri dari jabatan presiden pada 21 Mei 1998. Pengunduran diri Soeharto sebagai presiden pada 21 Mei 1998 menandai roda reformasi mulai bergulir.

5. **Jawaban:**

Pada 5 Mei 1998 mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada melakukan demonstrasi di bundaran kampus UGM. Mahasiswa menyampaikan protes

atas terpuruknya kondisi perekonomian dan merosotnya kepercayaan publik pada pemerintah. Tak hanya mahasiswa UGM, mahasiswa dari Universitas Sanata Dharma hingga IAIN juga ikut bergerak. Bentrok antara mahasiswa dan aparat keamanan tidak dapat dihindarkan. Bentrokan tersebut mengakibatkan Moses Gatotkaca mahasiswa Universitas Sanata Dharma tertembak dan meninggal dunia.

B. Pemerintahan pada Masa Reformasi

Uji Kompetensi 2

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: c**

Krisis ekonomi masih mewarnai pemerintahan B.J. Habibie. Oleh karena itu, pemerintah berusaha keras mengatasi kondisi tersebut, salah satunya dengan memisahkan bank sentral menjadi lembaga independen. Kebijakan tersebut merupakan salah satu program pemulihan ekonomi yang sejalan dengan penjadwalan kembali utang luar negeri Indonesia.

2. **Jawaban: a**

Pada sidang umum MPR 1999 Presiden B.J. Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawaban. Sebagian besar anggota MPR yang dipilih pada pemilu 1999 menolak pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie. Setelah penolakan itu, Habibie membatalkan pencalonannya sebagai kandidat presiden.

3. **Jawaban: a**

Pemilu 1999 merupakan wujud nyata pelaksanaan demokrasi pada masa pemerintahan Presiden Habibie. Pemilu 1999 diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Pada pemilu ini terdapat 141 parpol yang mendaftar, tetapi hanya 48 parpol yang lolos verifikasi. Pada pemilu ini pemerintah memberi kesempatan kepada lembaga-lembaga independen, baik dalam negeri maupun luar negeri untuk memantau jalannya pemilu. Pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999 untuk memilih anggota legislatif. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh pernyataan angka 1), 2), dan 3).

4. **Jawaban: d**

Kabinet Reformasi Pembangunan dalam rangka mewujudkan cita-cita reformasi menetapkan beberapa kebijakan seperti penerapan sistem multipartai dalam pemilu, demokratisasi pers, kebebasan berkumpul dan berbicara, pengakuan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi.

5. **Jawaban: c**

MPR hasil pemilu 1999 menolak pidato pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie. Penolakan tersebut menyebabkan MPR mengendalikan pemilihan presiden dan wakil presiden. Akhirnya, MPR memilih Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia. Pemilihan tersebut tidak dapat dilepaskan dari dukungan kekuatan Poros Tengah.

6. **Jawaban: a**

Pada masa pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid menetapkan beberapa kebijakan seperti pemisahan Polri dari ABRI, pengakuan agama Konghucu, dan kebebasan pers. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh angka 1) dan 2).

7. **Jawaban: a**

Swasembada beras pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri terjadi karena kondisi perekonomian Indonesia membaik dan didukung kebijakan larangan impor beras pada tahun 2003 melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2002. Dengan pelarangan impor beras ini, Bulog berusaha memanfaatkan produksi petani karena pada saat itu di beberapa daerah sedang berlangsung panen raya. Akibatnya, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras.

8. **Jawaban: c**

Gambar pada soal menunjukkan gedung KPK. Presiden Megawati Soekarnoputri berusaha mewujudkan agenda reformasi pemberantasan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Untuk membersihkan Indonesia dari korupsi, Presiden Megawati Soekarnoputri membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 27 Desember 2002 dan membentuk pengadilan khusus untuk kasus korupsi (pengadilan tipikor).

9. **Jawaban: d**

Tiap-tiap pemerintahan pada masa reformasi memiliki beberapa kebijakan dan peristiwa penting yang berbeda.

- 1) Pemerintahan B.J. Habibie diwarnai dengan kebijakan dan peristiwa antara lain kebebasan pers, pelaksanaan pemilu 1999, dan referendum Timor Timur.
- 2) Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid diwarnai dengan kebijakan dan peristiwa antara lain pengakuan agama Konghucu, pemisahan Polri dan TNI, serta kebebasan pers
- 3) Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri diwarnai dengan kebijakan dan peristiwa antara lain pendirian KPK dan pelaksanaan pemilu 2004.
- 4) Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diwarnai dengan kebijakan dan peristiwa antara lain pemerintah berhasil mengadakan perjanjian Helsinki dengan organisasi GAM.
- 5) Pemerintahan Presiden Joko Widodo diwarnai dengan kebijakan antara lain membagikan KIS, KIP, dan KKS.

Jadi, jawaban yang tepat terdapat pada pilihan **d**.

10. **Jawaban: e**

Dalam menjalankan pemerintahannya, Presiden Joko Widodo mengusung program Nawacita dan revolusi mental. Dalam revolusi mental, struktur organisasi harus ramping dan tidak boleh ada orang dalam pemerintahan yang memiliki fungsi ganda. Jadi, jawaban yang tepat adalah pilihan **e**.

B. Uraian

1. **Jawaban:**

Presiden B.J. Habibie menyusun Kabinet Reformasi Pembangunan untuk melaksanakan agenda reformasi terkait bidang politik. Presiden Habibie meletakkan dasar-dasar demokrasi bagi Indonesia. Ia memerintahkan untuk membebas-

kan tahanan politik Orde Baru; menjamin kebebasan berkumpul, berpendapat; serta membentuk partai politik. Pada masa pemerintahan Presiden Habibie, tercatat 141 parpol yang mendaftar untuk mengikuti pemilu 1999.

2. **Jawaban:**

Disintegrasi Timor Timur ternyata mendapat perhatian dari dunia internasional, salah satunya dari PBB. Dalam proses penyelesaian masalah Timor Timur, PBB membentuk *United Nations Mission for East Timor* (UNAMET) untuk mengawasi jalannya referendum di Timor Timur. Setelah Timor Timur resmi memisahkan diri dari Indonesia, PBB mengirim pasukan multinasional untuk mencegah terjadinya krisis kemanusiaan sebelum dibentuk pemerintahan transisi. Pada 25 Oktober 1999 PBB membentuk *The United Nations Transition Administration in Timor-Leste* (UNTAET). UNTAET berperan sebagai pemerintahan sementara di Timor Timur sampai terbentuk pemerintahan baru.

3. **Jawaban:**

Hubungan Presiden Abdurrahman Wahid dengan koalisi Poros Tengah dan DPR tidak berjalan baik. Ia pernah mengumumkan pemberlakuan dekret yang berisi pembubaran DPR/MPR, mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat, serta membekukan partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap pelaksanaan Sidang Istimewa MPR. Dekret yang dikeluarkan Presiden Abdurrahman Wahid tidak diakui DPR/MPR, dan berakhir dengan pemakzulan presiden. Peristiwa pemakzulan tersebut merupakan dampak dari puncak ketegangan antara pejabat eksekutif dan pejabat legislatif di Indonesia pada masa tersebut.

4. **Jawaban:**

Perjanjian Helsinki merupakan perjanjian yang dibuat antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang memberikan kemerdekaan secara *de facto* kepada Aceh. Di dalam perjanjian tersebut, masyarakat Aceh dapat membuat partai, penerapan hukum syariat, bahkan melakukan perdagangan internasional sendiri. Luas wilayah Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956. Selain itu, pemilihan lokal diselenggarakan di bawah undang-undang baru tentang penyelenggaraan pemerintahan Aceh. Perjanjian Helsinki ini ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin dan pimpinan GAM, Malik Mahmud, serta disaksikan oleh mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari.

5. **Jawaban:**
Di bidang kelautan Presiden Joko Widodo menginstruksikan perlakuan keras terhadap pencuri ikan ilegal di wilayah perairan Indonesia. Selain meminta diadakan razia, Presiden Joko

Widodo berharap kapal-kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia ditindak tegas agar tidak mengulangi perbuatannya. Salah satu bentuk usaha pemerintah untuk memberi efek jera pada kapal-kapal asing adalah menenggelamkan kapal-kapal tersebut.

Penilaian Harian

A. Pilihlah jawaban yang tepat!

1. **Jawaban: c**
Krisis multidimensional menandai masa akhir Orde Baru. Akibat krisis multidimensional kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Orde Baru semakin menurun. Kondisi ini terjadi karena rakyat menganggap pemerintah Orde Baru sebagai akar semua permasalahan yang muncul pada masa itu.
2. **Jawaban: d**
Langkah Presiden Soeharto meminta bantuan *International Monetary Fund* (IMF) tidak mampu mengatasi krisis moneter. IMF bersedia mengucurkan dana moneter kepada Indonesia dengan syarat pemerintah mencabut bantuan dana untuk subsidi bahan pokok, listrik, dan BBM.
3. **Jawaban: a**
Pada situasi krisis yang semakin genting, gangguan sosial tidak dapat dihindari. Terjadinya kerusuhan di beberapa daerah disebabkan oleh kesenjangan sosial dalam masyarakat. Aksi kerusuhan tersebut merupakan kejadian di luar dugaan karena dilakukan sesama rakyat Indonesia yang sebelumnya terkenal dengan keramahan dan kesantunannya.
4. **Jawaban: c**
Pengendalian putusan hakim merupakan salah satu bukti krisis hukum di Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru hakim sering dijadikan sebagai alat pembenaran atas tindakan dan kebijakan pemerintah atau sering terjadi rekayasa dalam proses peradilan, apabila peradilan tersebut menyangkut diri penguasa, kerabat, atau pejabat negara.
5. **Jawaban: c**
Akibat kondisi perekonomian yang semakin tidak stabil, pemerintah memutuskan mencabut subsidi BBM. Kebijakan ini mengakibatkan kenaikan

harga BBM bersubsidi dan tarif dasar listrik pada 4 Mei 1998 yang diikuti kenaikan biaya angkutan dan bahan kebutuhan pokok lainnya.

6. **Jawaban: d**
Peristiwa Kudatuli terjadi akibat adanya pertikaian internal di dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Saat itu pendukung Soerjadi yang merupakan Ketua Umum PDI hasil kongres Medan menyerang markas PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta yang dikuasai oleh kader pro-Megawati. Megawati merupakan ketua umum PDI hasil kongres Surabaya.
7. **Jawaban: b**
Mahasiswa di Jakarta menjadi pelopor aksi demonstrasi menuntut reformasi pada 1998. Aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta berasal dari dua universitas terkemuka, yaitu Universitas Indonesia dan Universitas Trisakti. Jarak yang dekat antara mahasiswa dan pusat pemerintahan memungkinkan aspirasi mereka didengar.
8. **Jawaban: c**
Pimpinan DPR/MPR Harmoko mendukung mahasiswa dengan menyampaikan sejumlah tuntutan reformasi pada Presiden Soeharto. Tuntutan reformasi tersebut dapat disimpulkan menjadi tiga hal. *Pertama*, perlunya melaksanakan reformasi total. *Kedua*, menyampaikan keinginan rakyat agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. *Ketiga*, mendesak pelaksanaan Sidang Istimewa MPR. Jadi, jawaban yang tepat adalah pilihan **c**.
9. **Jawaban: b**
Purnawan Basundoro, seorang sejarawan Universitas Airlangga menyebutkan bahwa terdapat keterkaitan antara gerakan mahasiswa di satu daerah dengan daerah lain. Sebagai contoh gerakan mahasiswa Surabaya yang dipengaruhi oleh gerakan mahasiswa di Yogyakarta dan Jakarta. Gerakan ini terjadi pada 1998 karena

memiliki misi sama, yakni menuntut mundurnya Presiden Soeharto serta perubahan dalam berbagai bidang.

10. **Jawaban: e**

Presiden Soeharto berusaha memperbaiki kinerja pemerintah dengan melakukan perombakan kabinet. Akan tetapi, Ginanjar Kartasasmita menyampaikan sepucuk surat yang ditandatangani oleh empat belas menteri anggota Kabinet Pembangunan VII. Keempat belas menteri tersebut meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya dan meolok bergabung dengan kabinet baru hasil perombakan.

11. **Jawaban: a**

Gejolak Timor Timur untuk memisahkan diri dari Indonesia dimulai sejak akhir masa Orde Baru. Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, Timor Timur resmi lepas dari Republik Indonesia. *United Nations Mission for East Timor* (UNAMET) dibentuk PBB untuk mengawasi jalannya referendum di Timor Timur. Setelah Timor Timur resmi lepas dari Indonesia, PBB membentuk *United Nations Transtional Administration in Timor-Leste* (UNTAET). UNTAET bertugas sebagai pemerintahan sementara di Timor Timur sampai terbentuknya pemerintahan baru.

12. **Jawaban: d**

Pada masa pemerintahan presiden B.J. Habibie, pemerintah mengeluarkan kebijakan pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan upaya Presiden Habibie untuk mengatasi kesenjangan pembangunan yang terjadi antara pusat dan daerah. Dengan otonomi daerah, Presiden B.J. Habibie berharap adanya desentralisasi pembangunan yang mampu membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi.

13. **Jawaban: e**

Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan kebijakan untuk memisahkan Polri dari ABRI. Kebijakan ini bertujuan agar ABRI tidak menjadi entitas tunggal. Selain itu, kebijakan ini dilakukan agar kepolisian lebih fokus sebagai pelayan masyarakat dalam bidang keamanan.

14. **Jawaban: a**

Pada 1979 pemerintah mengeluarkan instruksi yang menyatakan Konghucu bukan kepercayaan dan pemerintah tidak mengakuinya sebagai

agama resmi. Akan tetapi, pada 17 Januari 2000 Presiden Abdurrahman Wahid menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 mengenai pemulihan hak-hak sipil penganut agama Konghucu. Dengan adanya keputusan tersebut, pemerintah sudah mengakui kembali bahwa Konghucu sebagai salah satu agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

15. **Jawaban: d**

Presiden Abdurrahman Wahid meneruskan kebijakan Presiden B.J. Habibie dalam bidang pers. Kebijakan tersebut terlihat dengan adanya penghapusan Departemen Penerangan yang dianggap menjadi penghalang bagi kebebasan berekspresi dan berpendapat. Kebijakan tersebut mendorong pers mengalami perkembangan pesat.

16. **Jawaban: b**

Presiden Megawati dan Hamzah Haz mengawali tugasnya dengan membentuk Kabinet Gotong Royong. Kabinet Gotong Royong dilantik pada 10 Agustus 2001. Kabinet ini disebut *zaken kabinet* karena 2/3 menterinya diisi oleh tokoh profesional di bidangnya.

17. **Jawaban: a**

Agenda Kabinet Gotong Royong sebagai berikut.

- 1) Menghapus korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- 2) Menyusun langkah-langkah untuk menyelamatkan dan mengakhiri krisis yang berkepanjangan.
- 3) Meneruskan pembangunan politik untuk menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.
- 4) Menunjukkan kemampuan untuk mempertahankan supremasi hukum dan menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif.
- 5) Menjaga pertahanan dan keamanan hak-hak asasi manusia menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat.

Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh pilihan 1), 2), dan 3).

18. **Jawaban: c**

Untuk meredam konflik di Aceh salah satu upaya Presiden Megawati Soekarnoputri adalah melakukan kunjungan kerja pada tanggal 8 September 2001. Dalam kesempatan itu Presiden Megawati Soekarnoputri menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Aceh.

19. **Jawaban: e**

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati

supremasi hukum belum begitu terjamin dengan baik. Perilaku KKN di pengadilan terutama penyuapan sering terjadi dan tawaran tersebut sangat menggiurkan hakim. Untuk menghindari kasus korupsi di lingkungan hakim pemerintah melakukan kebijakan reformasi di bidang hukum, salah satunya penataan dan reformasi hakim serta diikuti dengan peningkatan kesejahteraan hakim.

20. **Jawaban: a**

Untuk memperbaiki kondisi masyarakat kurang mampu Presiden Megawati mengadakan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM dengan dana Rp4,4 triliun. Dana ini dialokasikan untuk mendukung kegiatan penyediaan beras murah, penyediaan air bersih, pelayanan kesehatan, pendidikan, dana bergulir, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, pengadaan kontrasepsi, dan penanggulangan kemiskinan. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan pilihan **a**.

21. **Jawaban: b**

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla berusaha mengatasi masalah disintegrasi bangsa melalui pendekatan dengan pihak terkait. Sebagai contoh, pemerintah berusaha menyelesaikan konflik Aceh dengan cara damai, adil, dan bermartabat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berusaha melakukan perbincangan damai dengan tokoh-tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia. Pembicaraan damai ini diakhiri dengan penandatanganan memorandum kesepahaman pada 15 Agustus 2005.

22. **Jawaban: e**

Untuk mempercepat pemberantasan pembalakan liar, pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Indonesia. Aktivitas pembalakan liar menyebabkan beberapa masalah lingkungan seperti, polusi, banjir, hingga longsor. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mempertahankan fungsi hutan agar tidak memberi dampak negatif pada masyarakat.

23. **Jawaban: b**

Kenaikan harga minyak dunia menyebabkan pemerintah menaikkan harga BBM pada 1 Juni 2008. Pemerintah berusaha mengurangi beban masyarakat akibat kenaikan BBM dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada keluarga kurang mampu.

24. **Jawaban: c**

Pada 100 hari pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono menerima banyak kritik. Perekonomian di Indonesia dirasa belum membaik dan tidak mengalami perkembangan. Masalah ketahanan pangan dan energi nasional juga mulai mengancam Indonesia.

25. **Jawaban: a**

Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono terus berkembang. Kondisi ini tecermin dari indeks harga saham yang terus membaik, daya saing Indonesia dan nilai ekspor di tingkat dunia tinggi, serta investasi dan cadangan devisa terus membaik.

26. **Jawaban: b**

Pada masa pemerintahan SBY-Boediono kondisi ekonomi terus tumbuh dan berkembang dengan fundamental semakin kuat. Kondisi ini tecermin dari indeks harga saham gabungan Indonesia yang terus membaik. Bahkan, angka kemiskinan dan pengangguran terus ditekan di tengah gejolak perekonomian dunia, salah satunya dengan cara melakukan upaya pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah, termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

27. **Jawaban: a**

Sasaran revolusi mental yang diusung Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai berikut.

- 1) Mengubah *mind set*, yaitu cara berpikir dan cara pandang dalam melakukan *public service*.
- 2) Struktur organisasi harus ramping dan tidak boleh ada orang dalam pemerintahan yang memiliki fungsi ganda.
- 3) Kultur dan budaya kerja harus disiplin, tanggung jawab, mengedepankan jiwa kebersamaan, dan gotong royong.

Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh pilihan **a**.

28. **Jawaban: c**

Pada akhir 2014 pemerintah mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan penyesuaian harga BBM. *Pertama*, pemerintah menghapus subsidi untuk BBM jenis premium. *Kedua*, pemerintah memberlakukan subsidi tetap Rp1.000 per liter untuk solar. Pemerintah berpendapat pencabutan subsidi BBM dialihkan untuk memperbaiki sektor produktif.

29. **Jawaban: b**

Pemerintahan Joko Widodo berusaha menguasai sumber daya alam agar dikelola secara mandiri. Sebagai contoh, PT Pertamina akhirnya memiliki kendali penuh atas pertambangan minyak bumi di blok Mahakam mulai 2018 setelah sekira tiga puluh tahun berada di bawah kendali perusahaan asing. Langkah tersebut merupakan keberhasilan pemerintah dalam mengeksplorasi sumber daya alam Indonesia demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

30. **Jawaban: d**

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, Presiden Joko Widodo membangun berbagai infrastruktur seperti jalan tol, jembatan, bendungan, pelabuhan, hingga bandara di berbagai wilayah Indonesia. Langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

B. Uraian

1. **Jawaban:**

Pelantikan Soeharto sebagai presiden untuk ketujuh kalinya mendapat penolakan dari mahasiswa dan hampir sebagian besar masyarakat Indonesia. Penolakan tersebut dilatar belakangi oleh berbagai penyimpangan yang telah dilakukan pemerintah dalam bidang politik. Adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di dalam pemerintahan memunculkan rasa ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Dalam Kabinet Pembangunan VII Presiden Soeharto menempatkan orang terdekatnya sebagai menteri. Kondisi tersebut memicu terjadinya krisis politik di Indonesia pada periode akhir kekuasaan Orde Baru.

2. **Jawaban:**

Reformasi yang berarti perubahan secara drastis untuk melakukan perbaikan dalam tatanan masyarakat atau negara terjadi pasca-Orde Baru. Bagi mahasiswa, cendekiawan, dan masyarakat awam penentang Orde Baru, cita-cita reformasi berarti terbukanya kesempatan bagi pelaksanaan demokrasi yang sehat; terbebasnya bangsa dari praktik korupsi, kolusi; nepotisme; terwujudnya *rule of law*; terciptanya *good governance*; dan berfungsinya *clean government*. Dengan demikian, reformasi adalah sebuah era yang senantiasa harus diperjuangkan dan dipelihara.

3. **Jawaban:**

Aksi mahasiswa Universitas Trisakti merupakan salah satu aksi demonstrasi besar yang mengakibatkan munculnya korban jiwa. Pada awalnya demonstrasi dilakukan di dalam area kampus sesuai anjuran aparat. Akan tetapi, dalam perkembangannya mahasiswa menuntut untuk berdemo di depan gedung DPR/MPR agar aspirasi mereka disampaikan kepada pemerintah. Pada perkembangannya demonstrasi mahasiswa ini semakin tidak terkendali sehingga aparat mengamankan mahasiswa menggunakan peluru tajam hingga menyebabkan empat mahasiswa menjadi korban.

4. **Jawaban:**

Pada Juli 1997 terjadi dualisme politik di Partai Demokrasi Indonesia. Dualisme di tubuh partai tersebut berawal ketika 16 fungsionaris DPP PDI menyatakan akan mengadakan kongres PDI untuk memisahkan diri dari kepengurusan Megawati Soekarnoputri. Pada akhirnya Megawati membebastugaskan enam belas fungsionaris tersebut. Meskipun demikian, mereka tetap mengadakan kongres di Medan dan menetapkan Soejadi sebagai ketua umum PDI. Keputusan tersebut mengakibatkan terjadi bentrokan pada 27 Juli 1997 antara pendukung Megawati dan Soejadi.

5. Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, pers mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Uraikan kebijakan Presiden B.J. Habibie yang berkaitan dengan kebebasan pers!

Jawaban:

Kemerdekaan pers pada masa pemerintahan B.J. Habibie ditunjukkan dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pers yang kemudian menjadi UU Pers pada 13 September 1999. Undang-Undang Pers menjamin perlindungan pers dan tugas-tugas wartawan. Meskipun pada masa pemerintahannya pers diberi kebebasan, Presiden B.J. Habibie mengimbau kepada pers agar bisa memisahkan antara informasi yang berimbang dengan propaganda pihak-pihak tertentu.



Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia

A. Landasan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Uji Kompetensi 1

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: c**

Pancasila merupakan dasar negara bangsa Indonesia. Tidak hanya itu, Pancasila digunakan sebagai landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan kebangsaan. Selain itu, Pancasila merupakan salah satu faktor objektif yang memengaruhi politik luar negeri Indonesia. Kondisi tersebut terjadi karena kedudukan Pancasila sebagai falsafat negara yang mengikat seluruh bangsa Indonesia.

2. **Jawaban: a**

Moh. Hatta merupakan salah satu tokoh yang paling mengkritisi perihal politik luar negeri Indonesia. Ia menyimpulkan suatu tujuan politik luar negeri Indonesia antara lain mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara; memperoleh barang-barang dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat, jika barang-barang itu tidak atau belum dapat dihasilkan sendiri; meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan damai, Indonesia dapat melaksanakan pembangunan; serta meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh pernyataan angka 1) dan 2).

3. **Jawaban: a**

Pembukaan UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Berdasarkan pembukaan UUD 1945

terutama alinea pertama dan keempat, politik luar negeri Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dunia. Selain itu, Indonesia secara aktif memperjuangkan hak kehidupan bangsa dan membantu dalam pelaksanaan perdamaian dunia.

4. **Jawaban: d**

Maklumat Politik Pemerintah 1 November 1945 memuat beberapa poin penting yang membicarakan politik luar negeri Indonesia. Dalam maklumat tersebut dijelaskan bahwa politik luar negeri Indonesia harus dilaksanakan secara damai. Politik luar negeri Indonesia mengedepankan kerja sama dengan negara lain di bidang ekonomi, politik, dan lain-lain.

5. **Jawaban: b**

Pada masa Demokrasi Terpimpin landasan operasional pelaksanaan politik luar negeri selalu berubah sesuai kondisi nasional pada saat itu. Beberapa landasan operasional politik luar negeri masa Demokrasi Terpimpin adalah pembukaan UUD 1945, pasal 11 dan pasal 13 ayat (1) dan (2) UUD 1945, serta Amanat Presiden berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" yang dibacakan pada 17 Agustus 1959 atau lebih dikenal dengan "Manifesto Politik Republik Indonesia." Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh pilihan b.

6. **Jawaban: d**

Tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang kebijakan luar negeri Indonesia ditegaskan pada amanat Presiden Soekarno 17 Agustus 1959. Untuk mempertahankan kepribadian Indonesia di tengah arus blok Barat dan blok Timur, diperlukan suatu paham yaitu antiimperialisme. Oleh karena

itu, paham antiimperialisme digunakan sebagai tujuan jangka pendek untuk melaksanakan politik luar negeri Indonesia agar menjadi negara yang tidak memihak blok mana pun.

7. **Jawaban: c**

Pelaksanaan manifesto politik (Manipol) di bidang politik luar negeri kembali ditekankan oleh Presiden Soekarno. Menurut Soekarno, Indonesia harus berusaha menghindari keberpihakan pada dua blok yang bersengketa dalam Perang Dingin dengan memprakarsai pembentukan Gerakan Non-Blok.

8. **Jawaban: a**

Keterangan pada soal terkait dengan Nefo dan Oldefo yang disampaikan Presiden Soekarno. Nefo merupakan kelompok negara sosialis dan negara berkembang. Oldefo merupakan negara imperialis dan menghambat kemajuan negara-negara berkembang. Oleh karena itu, Nefo harus berjuang melawan Oldefo. Oleh karena itu, negara-negara berkembang harus menjalin rasa setia kawan yang erat. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh pilihan **a**.

9. **Jawaban: e**

Tujuan jangka panjang politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin adalah menenyapkan imperialisme. Sisa-sisa penjajahan di Indonesia harus segera dihilangkan agar kestabilan negara dapat terjaga. Indonesia juga ingin mewujudkan perdamaian dunia yang kekal dan abadi agar seluruh dunia dapat bekerja sama dengan baik.

10. **Jawaban: b**

Salah satu sasaran politik luar negeri sesuai Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 adalah meningkatkan kualitas diplomasi antarnegara tetangga. Kerja sama tersebut bertujuan memelihara stabilitas dan kemakmuran dalam rangka mencapai pemulihan ekonomi yang cepat melalui intensifikasi kerja sama regional dan internasional.

B. Uraian

1. **Jawaban:**

Bangsa Indonesia mulai berinteraksi dengan bangsa lain sejak merdeka pada 17 Agustus 1945. Sebagai negara berdaulat, Indonesia berusaha menjalin interaksi internasional dengan berbagai negara tanpa memperhatikan persamaan latar

belakang politik, ekonomi, budaya, dan ideologi. Pemerintah Indonesia merepresentasikan sikapnya dalam pergaulan internasional melalui sifat politik luar negeri yang bebas aktif.

2. **Jawaban:**

Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia yaitu UUD 1945. Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 alinea pertama, landasan konstitusional pelaksanaan politik luar negeri Indonesia secara jelas dipaparkan "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu, ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." Dari alinea tersebut dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri Indonesia menentang segala bentuk penjajahan di dunia.

3. **Jawaban:**

Pidato Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1959 merupakan penjabaran garis-garis besar haluan negara yang berisi manifesto politik. Presiden Soekarno menjelaskan tujuan jangka pendek dan jangka panjang kebijakan luar negeri Indonesia. Tujuan jangka pendek kebijakan luar negeri Indonesia adalah melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dengan ditambah memantapkan sikap netral di tengah-tengah pengaruh blok Barat dan blok Timur. Adapun tujuan jangka panjang kebijakan luar negeri Indonesia adalah menenyapkan imperialisme serta mencapai dasar bagi perdamaian dunia.

4. **Jawaban:**

Pidato Presiden Soekarno 17 Agustus 1960 sangat penting karena menyangkut arah politik luar negeri bangsa Indonesia yang harus diperjelas lagi. Indonesia berusaha menghindari keberpihakan pada dua blok yang bersengketa dalam Perang Dingin dengan membentuk Gerakan Non-Blok. Dengan membentuk gerakan ini, Indonesia menunjukkan sikap aktif dan bebas berpendirian dalam kegiatan politik luar negeri.

5. **Jawaban:**

Pada 1978 MPR memperluas politik luar negeri bangsa Indonesia dengan mengeluarkan Ketetapan Nomor IV/MPR/1978 tentang perluasan politik luar negeri Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perluasan politik luar negeri dilakukan untuk meratakan pembangunan di berbagai bidang kehidupan.

B. Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Pelaksanaannya

Uji Kompetensi 2

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: b**

Sebagai negara merdeka dan berdaulat, Indonesia merumuskan politik luar negeri agar dapat berinteraksi dengan negara-negara lain. Bangsa Indonesia merumuskan landasan operasional sebagai langkah awal politik luar negeri. Salah satu tujuan awal politik luar negeri Indonesia berdasarkan landasan operasionalnya adalah mempertahankan kemerdekaan dari segala usaha yang dilakukan Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia.

2. **Jawaban: d**

Sejak menjadi bangsa merdeka, Indonesia berusaha selalu ikut serta dalam pergaulan internasional. Langkah ini sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang dijabarkan dalam pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Indonesia memilih menjadi negara netral serta tidak bersekutu dengan salah satu kekuatan besar yang saat itu menguasai dunia, yaitu blok Barat dan blok Timur. Pada masa itu bangsa Indonesia memilih menjadi negara non-blok serta berusaha menghimpun kekuatan negara-negara berkembang dalam memerangi kolonialisme dan imperialisme.

3. **Jawaban: c**

Sebagai negara merdeka dan berdaulat, bangsa Indonesia berusaha merumuskan politik luar negeri agar berinteraksi dengan negara-negara lain. Politik luar negeri merupakan suatu cara bagi Indonesia untuk menempatkan diri dalam pergaulan internasional. Diperlukan berbagai landasan agar politik luar negeri dapat terlaksana sesuai tujuan nasional.

4. **Jawaban: d**

Sutan Sjahrir merupakan tokoh yang berperan aktif dalam mengawal jalannya politik luar negeri Indonesia. Dalam pidatonya pada acara *Inter Asian Relations Conference* di New Delhi pada 23 Maret–2 April 1947, ia mengajak bangsa-bangsa di Asia untuk bersatu menciptakan perdamaian dunia tanpa memandang ras.

5. **Jawaban: b**

Arah politik luar negeri Indonesia pada awal kemerdekaan difokuskan pada upaya memberantas penjajahan di dunia. Indonesia menjadi pelopor aksi penolakan terhadap penjajahan dunia. Aksi ini ditunjukkan dengan keaktifan Indonesia dalam Konferensi Asia–Afrika (KAA) dan Gerakan Non-Blok (GNB). Penyelenggaraan KAA dan GNB bertujuan agar bangsa-bangsa yang sedang dijajah bersatu melawan segala bentuk imperialisme dan kolonialisme.

6. **Jawaban: b**

Inti keterangan pada angka 1) adalah penerapan politik luar negeri bergantung pada kabinet-kabinet yang berkuasa. Adapun inti keterangan pada angka 2) ialah penyelenggaraan KAA dan pembentukan GNB. Kabinet dengan orientasi politik berbeda, penyelenggaraan KAA, dan pembentukan GNB merupakan ciri-ciri pada masa Demokrasi Liberal. Dengan demikian, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh pilihan b.

7. **Jawaban: a**

Pada masa Demokrasi Liberal, Kabinet Sukiman menjalankan politik luar negeri Indonesia dengan sedikit melenceng dari prinsip bebas dan aktif. Kondisi tersebut terjadi karena pada masa ini tidak ada batasan yang jelas bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Akibatnya, Kabinet Sukiman jatuh dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan semakin lemah.

8. **Jawaban: d**

Arah politik luar negeri bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Liberal ditentukan oleh setiap kabinet yang berkuasa. Tidak ada batas "kanan" dan "kiri" yang jelas bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa ini. Akibatnya, timbul pertentangan dalam parlemen yang sering berujung pada jatuhnya kabinet itu sendiri.

9. **Jawaban: a**

Politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin tidak berjalan sesuai tujuannya. Untuk melaksanakan politik luar negeri sesuai tujuan awal, diperlukan cara tepat agar perdamaian dunia tercipta. Sikap radikal dan

revolusioner dirasa tepat untuk melaksanakan politik luar negeri Indonesia sesuai kondisi nasional saat itu.

10. **Jawaban: a**

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri justru menemui banyak permasalahan. Pembengkakan utang luar negeri mengakibatkan pemerintah memutuskan kerja sama dengan IMF. Selain itu, lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan dari wilayah kedaulatan Indonesia sangat merugikan bangsa Indonesia. Adapun peristiwa lepasnya Timor Timur dari wilayah kedaulatan Indonesia merupakan permasalahan yang terjadi pada masa Presiden B.J. Habibie. Pelaksanaan eksekusi mati bagi terpidana kasus narkoba yang berasal dari luar negeri merupakan permasalahan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jadi, jawaban yang paling tepat ditunjukkan oleh angka 1) dan 2).

B. Uraian

1. **Jawaban:**

Pada masa pemerintahan Kabinet Sukiman pemerintah Indonesia mengadakan perjanjian kerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat. Kerja sama tersebut dikenal dengan *Mutual Security Act* (MSA) oleh parlemen. Perjanjian tersebut dianggap sudah menyimpang dan condong kepada blok Barat. Meskipun masih dalam tahap pertukaran surat, kegaduhan di dalam negeri tidak bisa dihindarkan. Parlemen menjadi tidak bersimpati kepada kabinet dan berakibat lengsernya Kabinet Sukiman.

2. **Jawaban:**

Arah politik luar negeri bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Liberal difokuskan pada upaya menentang segala bentuk penjajahan di dunia. Perubahan arah politik luar negeri tersebut terjadi setelah bangsa Indonesia berhasil memperoleh pengakuan kedaulatan dari dunia internasional.

Pelaksanaan politik luar negeri pada masa ini juga bergantung pada kabinet-kabinet yang berkuasa. Setiap kabinet yang berkuasa membawa politik luar negeri Indonesia dengan cara berbeda. Perbedaan cara tersebut sering menimbulkan pertentangan dalam parlemen yang sering berujung pada jatuhnya kabinet. Kondisi tersebut terjadi karena tidak ada batas "kanan" dan "kiri" yang jelas bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.

3. **Jawaban:**

Bergabungnya Indonesia dalam organisasi negara-negara pengekspor minyak atau OPEC merupakan pencapaian yang baik bagi Indonesia pada masa Orde Baru. Melalui OPEC, Indonesia dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi. Selain itu, Indonesia pernah berperan sebagai ketua pertemuan organisasi kerja sama ekonomi Asia Pasifik atau APEC turut menyumbangkan prestasi Indonesia di tingkat dunia.

4. **Jawaban:**

Politik luar negeri pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ditandai dengan beberapa kunjungan ke luar negeri. Setiap kunjungannya ke luar negeri, Presiden Abdurrahman Wahid secara konsisten mencari dukungan bagi pemulihan ekonomi dan isu-isu dalam negeri yang mengancam integritas teritorial Indonesia.

5. **Jawaban:**

Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo politik luar negeri Indonesia dianggap memiliki warna baru karena banyak kebijakan yang memberikan keuntungan bagi Indonesia. Citra baik yang ditunjukkan oleh Indonesia mendapat respons dari berbagai negara lain. Misalnya, pemberian bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya di Indonesia. Sebaliknya, sikap tegas yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo dalam mengeksekusi mati terpidana kasus narkoba luar negeri dianggap melanggar HAM oleh negara-negara lain.

C. Peran Indonesia dalam Upaya Menciptakan Perdamaian Dunia

Uji Kompetensi 3

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: b**

Indonesia berusaha memelihara perdamaian dan meredakan berbagai konflik dunia melalui berbagai upaya. Salah satunya adalah mengadakan pertemuan-pertemuan dengan negara-negara di luar konflik. Misalnya, pada saat Ali Sastroamidjojo menjabat perdana menteri Indonesia, ia memelopori pelaksanaan Konferensi Kolombo untuk membicarakan nasib negara-negara dunia ketiga.

2. **Jawaban: d**

Pada April 1954 lima perdana menteri dari beberapa negara mengadakan pertemuan di Kolombo, Sri Lanka. Kelima perdana menteri tersebut berkumpul menyampaikan gagasannya untuk menyelenggarakan Konferensi Asia–Afrika. Kelima perdana menteri tersebut yaitu Sir John Kotelawala (Sri Lanka), Ali Sastroamidjojo (Indonesia), Jawaharlal Nehru (India), U Nu (Birma), dan Muhammad Ali Jinnah (Pakistan). Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh pilihan **d**.

3. **Jawaban: b**

Agenda yang dibahas dalam Konferensi Asia–Afrika adalah membahas mengenai permasalahan kemanusiaan yang terjadi di Palestina. Permasalahan tersebut menjadi pembahasan utama dalam agenda KAA. Selain itu, beberapa pembahasan yang lain adalah mengadakan kerja sama ekonomi, kerja sama budaya, dan perjuangan hak asasi manusia.

4. **Jawaban: d**

Misi Garuda II dan III dikirim pemerintah Indonesia ke wilayah konflik di Kongo, sedangkan Misi Garuda IV dikirim pemerintah Indonesia ke wilayah konflik di Vietnam. Sementara itu, Misi Garuda XIV dikirim pemerintah Indonesia ke wilayah konflik di Bosnia sejak 1992 sampai 1995. Jadi, jawaban yang paling tepat terdapat pada kombinasi **P3)** dan **Q2)**.

5. **Jawaban: b**

Setelah Deklarasi Djuanda disahkan, secara otomatis *Ordonantie* 1939 tidak berlaku lagi dan wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan yang

utuh. Untuk mempertegas Deklarasi Djuanda, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960 tentang perairan Indonesia untuk memperkuat Deklarasi Djuanda. Wilayah Indonesia yang semula luasnya 2.027.087 km² bertambah luas menjadi 5.193.250 km².

6. **Jawaban: d**

Dalam Gerakan Non-Blok (GNB), Jawaharlal Nehru merupakan Perdana Menteri India yang sangat memiliki pengaruh besar. Pada 1954 ia mencetuskan istilah *Non-Alignment* (tidak memihak). Dalam perkembangan selanjutnya menjadi organisasi *Non-Alignment Movement* (NAM). Selain itu, ia menjelaskan istilah "Panchsheel" yang kemudian menjadi prinsip Gerakan Non-Blok (GNB).

7. **Jawaban: b**

Gerakan Non-Blok dibentuk untuk memajukan perdamaian dunia dan kerja sama dunia. Gerakan Non-Blok merupakan gerakan untuk mengembangkan solidaritas di antara negara-negara berkembang untuk mencapai kemakmuran dan persamaan hak. Selain itu, Gerakan Non-Blok berusaha menahan pengaruh buruk dari blok Barat dan Blok Timur.

8. **Jawaban: a**

Perasaan senasib membuat beberapa negara di kawasan Asia Tenggara menghasilkan suatu inisiatif untuk membentuk kerja sama antarnegara di kawasan Asia Tenggara. Hampir seluruh negara di kawasan Asia Tenggara pernah mengalami penjajahan. Negara-negara tersebut misalnya Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dengan perasaan senasib tersebut, diperlukan suatu organisasi untuk menampung segala permasalahan yang menyangkut kehidupan antar-bangsa. Organisasi tersebut adalah ASEAN yang terbentuk pada 1967.

9. **Jawaban: a**

Hasil pelaksanaan JIM I dan JIM II dilaporkan Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas dalam KTT ASEAN di Brunei Darussalam pada 1989. Dengan laporan tersebut diharapkan ASEAN dapat mengambil peran untuk meredakan konflik di Kamboja dan konflik Kamboja–Vietnam.

10. **Jawaban: c**

Pembentukan Organisasi Konferensi Islam (OKI) atau *Organization of Islamic Cooperation* dilatarbelakangi oleh permasalahan yang terjadi di wilayah Timur Tengah. Permasalahan tersebut adalah pembakaran masjid Al-Aqsha di Yerusalem pada 21 Agustus 1969. Peristiwa ini menimbulkan beragam reaksi, terutama dari kalangan umat Islam karena Yerusalem merupakan kota suci bagi umat Islam selain Mekah dan Madinah.

B. Uraian

1. **Jawaban:**

Dokumen Dasasila Bandung tercantum dalam *Declaration on the Promotion of World Peace and Cooperation*. Melalui Dasasila Bandung negara-negara yang terlibat dalam KAA memiliki kekuatan dalam bernegara. Kekuatan tersebut adalah aspek kemerdekaan, hidup berdampingan secara damai (*peace-full coexistence*), dan kerja sama untuk keuntungan bersama (*mutual benefit*).

2. **Jawaban:**

Pasukan ini pertama kali dikirim Indonesia sebagai pasukan gabungan PBB untuk menyelesaikan konflik di Terusan Suez yang terjadi sejak 1956. Pada masa itu PBB membentuk sebuah komando dengan nama *United Nations Emergency Forces* (UNEF). Menanggapi upaya PBB tersebut, Indonesia bersedia mengirim pasukan khusus sebagai bentuk kontribusi Indonesia dalam upaya menjaga perdamaian dunia. Pasukan khusus inilah yang kemudian dikenal sebagai Misi Garuda.

3. **Jawaban:**

Konflik Bosnia terjadi karena perebutan wilayah dan perang antaretnik. Pemerintah Indonesia mengirim Misi Garuda XIV untuk bergabung dengan *United Nations Protection Force* (UNPROFOR) meredakan konflik di Bosnia. Misi Garuda XIV memiliki tugas menjaga keamanan rakyat Bosnia. Pengamanan bahan makanan dan obat-obatan bantuan dari PBB merupakan prioritas utama bagi Misi Garuda XIV.

4. **Jawaban:**

Deklarasi Djuanda menetapkan batas teritorial Indonesia yang sebelumnya 3 mil diperlebar menjadi 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik terluar pulau-pulau Indonesia pada saat air laut surut. Deklarasi ini menyebabkan *Ordonantie 1939* tidak berlaku. Selain itu, Deklarasi Djuanda menjadi landasan struktural dan legalitas bagi proses integrasi nasional Indonesia sebagai negara maritim. Oleh karena itu, dengan Deklarasi Djuanda wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh.

5. **Jawaban:**

Indonesia berperan aktif dalam penyelesaian konflik Kamboja-Vietnam. Peran Indonesia ditunjukkan dengan mengadakan pertemuan *Jakarta Informal Meeting* (JIM) I pada 25–28 Juli 1988. Pertemuan tersebut mempertemukan pihak-pihak yang bertikai dengan tujuan mencari jalan tengah untuk penyelesaiannya. Indonesia menjadi mediator dalam pertemuan tersebut. Dengan demikian, citra Indonesia di negara-negara lain semakin baik.

Penilaian Harian

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: c**

Kutipan pada soal merupakan alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Dari alinea tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah Indonesia secara aktif memperjuangkan hak kehidupan bangsa, serta terlibat aktif dalam misi perdamaian dunia. Perjuangan memperoleh kesejahteraan sama halnya dengan memperjuangkan ke-

pentingan banyak orang. Memperjuangkan kesejahteraan tersebut harus ditempuh dengan jalan damai.

2. **Jawaban: c**

Maklumat Politik Pemerintah 1 November 1945 berisi beberapa poin yaitu politik damai dan hidup berdampingan secara damai; tidak ikut campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain; politik bertetangga baik dan kerja sama dengan semua negara di bidang ekonomi, politik, dan lain-lain; serta selalu mengacu pada piagam PBB dalam melakukan hubungan dengan negara lain.

3. **Jawaban: b**

Tujuan pemerintah mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 adalah untuk mengganti ketetapan yang sebelumnya dikeluarkan oleh pemerintah. Ketetapan tersebut ditujukan untuk mengatur perluasan politik luar negeri Indonesia. Diharapkan setelah adanya ketetapan tersebut, pembangunan di seluruh bidang dapat terlaksana. Tidak hanya di sektor ekonomi, tetapi juga di sektor yang lain.

4. **Jawaban: b**

Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 disepakati oleh pemerintah Indonesia karena terjadinya krisis ekonomi dan krisis nasional pada 1997. Dengan munculnya krisis tersebut, integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi terancam. Untuk itu, ketetapan yang baru ini diharapkan dapat memberikan perubahan bagi stabilitas Indonesia.

5. **Jawaban: a**

Munculnya tujuan jangka pendek dan jangka panjang politik luar negeri Indonesia dilatarbelakangi oleh masa lalu Indonesia yang pernah dijajah bangsa-bangsa Barat. Penjajahan oleh bangsa-bangsa Barat sangat merugikan Indonesia. Oleh karena itu, perlu ditetapkan semangat antiimperialisme agar sisa-sisa penjajahan tidak dirasakan kembali oleh Indonesia.

6. **Jawaban: b**

Pada masa pemerintahan Kabinet Sukiman Indonesia mengirim surat permohonan bantuan kepada Amerika Serikat. Setelah pengiriman surat permohonan bantuan kepada Amerika Serikat, parlemen menganggap pemerintah Indonesia melanggar tujuan politik luar negeri Indonesia. Akibatnya, pemerintahan masa kabinet Sukiman tidak dipercaya lagi oleh parlemen. Oleh karena dianggap telah berbelok kepada blok Barat. Parlemen mengajukan mosi tidak percaya kepada Kabinet Sukiman dan berakhir dengan penggantian kabinet.

7. **Jawaban: e**

Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap politik luar negeri Indonesia dilakukan dengan agak condong ke Barat. Sikap tersebut dibuktikan dengan kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara yang pro-Barat seperti Australia, Inggris, Singapura, dan Malaysia. Selain itu, pada masa ini Indonesia kembali menjalin

hubungan dengan Belanda. Tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan Irian Barat yang belum selesai sejak Konferensi Meja Bundar.

8. **Jawaban: e**

Pada masa Orde Baru pemerintah Indonesia berhasil mengembalikan kepercayaan dunia. Keberhasilan ini ditunjukkan dengan keikutsertaan Indonesia dalam keanggotaan *Organization of the Petroleum Exporting Countries* (OPEC). Dengan bergabungnya Indonesia dalam OPEC, stabilitas ekonomi Indonesia semakin terjaga dengan baik.

9. **Jawaban: d**

Setelah Perang Dingin situasi politik mengalami perubahan. Perubahan tersebut berdampak pada kebijakan politik luar negeri Indonesia. Setelah Indonesia berhasil menumpas komunisme pada masa Orde Baru, Indonesia dihadapkan pada permasalahan pelanggaran HAM. Penumpasan komunisme yang diwarnai kekerasan menimbulkan isu baru yaitu penegakan hak asasi manusia.

10. **Jawaban: d**

Indonesia berhasil membersihkan namanya dari tuduhan pelanggaran HAM melalui pelaksanaan referendum di Timor Timur. Meskipun dinilai banyak pihak sebagai suatu kesalahan, Indonesia tetap menghormati hasil referendum tersebut. Selain itu, kebijakan ini mendatangkan keuntungan bagi Indonesia pada masa mendatang.

11. **Jawaban: e**

Presiden Soeharto membawa perubahan bagi politik luar negeri Indonesia. Perubahan tersebut tampak pada pemerintah Indonesia yang berupaya memperbaiki hubungan dengan Malaysia. Pada 11 Agustus 1966 pemerintah Indonesia menandatangani normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia. Dalam kesepakatan tersebut, pemerintah Indonesia mengakui Malaysia sebagai negara berdaulat.

12. **Jawaban: c**

Pada 2005 pemerintah Indonesia berhasil menyelesaikan konflik Aceh dengan mediasi mantan Presiden Finlandia, Marti Ahtisaari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dunia internasional kembali menaruh perhatian kepada Indonesia. Selain itu, bantuan Finlandia menunjukkan negara asing masih menaruh kepercayaan kepada Indonesia.

13. **Jawaban: a**

Setiap negara merdeka dan berdaulat memiliki politik luar negeri, tidak terkecuali Indonesia yang sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945. Indonesia memiliki politik luar negeri yang berfungsi sebagai penentu sikap pergaulan internasional. Politik luar negeri yang dijalankan Indonesia adalah bebas dan aktif.

14. **Jawaban: b**

Konflik di Mesir pada 1950-an terjadi karena Presiden Mesir, Gamal Abdul Nasser menetapkan kebijakan untuk menasionalisasi Terusan Suez. Kebijakan pemerintah Mesir tersebut menimbulkan pertikaian antara Mesir dan negara-negara yang berkepentingan di Terusan Suez seperti Inggris, Prancis, dan Israel sehingga mengganggu perdamaian dunia.

15. **Jawaban: b**

Pada masa Demokrasi Liberal Kabinet Sukiman melakukan kesepakatan dengan Duta Besar Amerika Serikat, Merle Cochran yang dikenal dengan istilah *Mutual Security Act* (MSA) sebagai bantuan ekonomi untuk Indonesia. Akan tetapi, tindakan tersebut dianggap oleh parlemen telah melanggar politik luar negeri bebas aktif.

16. **Jawaban: d**

Pembentukan ASEAN diharapkan mampu melindungi kepentingan negara-negara Asia Tenggara di lingkup internasional. Setelah ASEAN terbentuk, negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wadah untuk saling bermusyawarah. Musyawarah yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN ditujukan untuk menyelesaikan persoalan dan kepentingan internasional.

17. **Jawaban: e**

ASEAN merupakan organisasi yang ingin mempersatukan negara-negara di Asia Tenggara. Keinginan untuk mempersatukan negara-negara di Asia Tenggara tersebut menjadi landasan pemikiran pembentukan gerakan *Jakarta Informal Meeting* (JIM). Oleh karena itu, saat terjadi konflik Kamboja–Vietnam, Indonesia dan beberapa negara anggota ASEAN bersatu untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut.

18. **Jawaban: c**

Konferensi Tingkat Tinggi Islam I pada 1969 dipelopori oleh negara Arab Saudi, Somalia, Maroko, Malaysia, Pakistan, dan Nigeria. Raja

Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hassan II dari Maroko merupakan penggagas konferensi tersebut. Adapun Indonesia dan Oman merupakan negara yang mengikuti konferensi tersebut. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh angka 1), 3), dan 5).

19. **Jawaban: b**

Indonesia beberapa kali mengirimkan pasukan perdamaian dalam Misi Garuda. Misi Garuda yang dikirim pemerintah Indonesia sebagai berikut.

- 1) Misi Garuda II dipimpin oleh Letkol Inf Solichin
- 2) Misi Garuda III dipimpin oleh Brigjen TNI Kemal Idris
- 3) Misi Garuda V dipimpin oleh Letkol Inf Harsoyo

Jadi, jawaban yang paling tepat adalah kombinasi X1)–Y2).

20. **Jawaban: e**

Deklarasi Djuanda disusun sebagai usaha bangsa Indonesia untuk memperjuangkan batas wilayah laut sehingga wilayah Indonesia menjadi suatu kesatuan utuh dilihat dari berbagai aspek politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dalam Deklarasi Djuanda disebutkan batas teritorial Indonesia yang sebelumnya 3 mil diperlebar menjadi 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik terluar pulau-pulau Indonesia pada saat air laut surut.

B. Uraian

1. **Jawaban:**

Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia adalah UUD 1945. Menurut UUD 1945 alinea pertama dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri Indonesia menentang segala bentuk penjajahan di dunia. Selanjutnya, pada alinea keempat tujuan politik luar negeri Indonesia adalah aktif dalam memperjuangkan hak kehidupan bangsa dan terlibat aktif dalam misi perdamaian dunia.

2. **Jawaban:**

Pada masa Demokrasi Liberal, arah politik luar negeri bangsa Indonesia difokuskan untuk menghapus sisa-sisa penjajahan bangsa Barat. Sementara itu, pada masa Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno berperan besar dalam

kebijakan politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri pada masa Presiden Soekarno sangat tegas dalam memberantas imperialisme dan kolonialisme.

3. **Jawaban:**

Pada masa pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto berhasil menempatkan Indonesia pada posisi yang cukup baik. Kondisi tersebut dibuktikan dengan ditunjuknya Indonesia sebagai ketua pertemuan organisasi kerja sama ekonomi Asia Pasifik atau APEC dan ketua KTT Non-Blok pada periode 1992. Selain ketua pelaksanaan konferensi tingkat tinggi, Indonesia tergabung dalam organisasi negara-negara pengekspor minyak atau OPEC. Indonesia menjadi negara yang patut diperhitungkan dalam menjaga kestabilan perekonomian saat itu.

4. **Jawaban:**

Gerakan Non-Blok bertujuan untuk mengembangkan solidaritas antarnegara berkembang untuk mencapai kemakmuran. Selain itu, GNB diharapkan mampu meredakan ketegangan yang terjadi antara blok Timur dan blok Barat yang sedang bertikai. Anggota-anggota GNB juga berusaha menahan pengaruh negatif sebagai akibat dari Perang Dunia.

5. **Jawaban:**

Misi Garuda berperan dalam menjaga perdamaian di kawasan Mesir setelah konflik di Timur Tengah. Konflik yang dilatarbelakangi oleh nasionalisasi Terusan Suez tersebut menggerakkan Misi Garuda untuk mengirimkan pasukannya. Satu detasemen pasukan yang terdiri atas 550 orang diterjunkan untuk mengawal konflik di Timur Tengah. Pasukan tersebut berasal dari kesatuan-kesatuan Teritorium IV/Diponegoro dan Teritorium V/Brawijaya.

Penilaian Tengah Semester 2

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: e**

Krisis ekonomi di negara-negara Asia Tenggara sejak Juli 1996 memengaruhi perekonomian Indonesia. Melemahnya perekonomian Indonesia dapat dilihat bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Akibatnya, jumlah pengangguran di Indonesia meningkat. Peningkatan jumlah pengangguran menimbulkan krisis sosial, salah satunya meningkatnya tindak kriminal. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh pilihan e.

2. **Jawaban: a**

Gerakan reformasi di Indonesia dilatarbelakangi adanya krisis ekonomi, sosial, dan politik. Krisis politik disebabkan ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintahan Orde Baru. Ketidakpercayaan ini muncul akibat adanya penyelewengan dan penyimpangan demokrasi. Pemerintahan Orde Baru dianggap tidak menjalankan demokrasi secara benar karena Golkar selalu memenangi pemilu. Situasi tersebut diperparah dengan banyaknya anggota DPR/MPR yang terlibat praktik KKN. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh angka 1), 2), dan 3). Adapun pernyataan angka 4) dan 5) merupakan latar belakang krisis ekonomi Indonesia pada masa akhir Orde Baru.

3. **Jawaban: b**

Pada masa pemerintahan Orde Baru pembangunan di Indonesia berkembang pesat. Akan tetapi, sebagian besar rakyat Indonesia tidak dapat menikmati hasil pembangunan tersebut. Hasil pembangunan pada masa Orde Baru hanya dapat dinikmati oleh sekelompok orang. Sebagian besar rakyat Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan sehingga tidak dapat menikmati hasil pembangunan. Selain itu, pembangunan hanya berpusat di kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa dan tidak merata di seluruh Indonesia.

4. **Jawaban: a**

Nepotisme merupakan kecenderungan memasukkan anggota keluarga dalam lingkup pemerintahan. Salah satu bentuk praktik nepotisme pada masa Orde Baru adalah pengangkatan Siti Hardiyati Rukmana, putri pertama Presiden Soeharto sebagai Menteri Kesejahteraan Sosial dalam Kabinet Pembangunan VII. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh pilihan a.

5. **Jawaban: e**

Berbagai krisis yang melanda Indonesia pada 1997–1998 menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sedang dilanda krisis multidimensional. Krisis multidimensional merupakan kondisi genting yang melanda suatu negara dalam berbagai aspek kehidupan. Kondisi demikian sangat berpengaruh bagi kehidupan bangsa Indonesia karena telah mengganggu stabilitas nasional.

6. **Jawaban: e**

Pada 10 Maret 1998 pidato pertanggungjawaban Presiden Soeharto diterima oleh MPR. Presiden Soeharto kemudian kembali dilantik menjadi Presiden Indonesia bersama B.J. Habibie sebagai wakilnya pada 10 Maret 1998. Peristiwa tersebut memicu desakan pelaksanaan reformasi semakin kuat. Beberapa kelompok mahasiswa di kota besar di Indonesia menuntut reformasi di segala bidang. Salah satu tuntutan reformasi adalah meminta Presiden Soeharto turun dari jabatannya.

7. **Jawaban: e**

Puncak kejatuhan pemerintahan Orde Baru terjadi pada Mei 1998. Salah satu peristiwa yang mengiringi kejatuhan pemerintahan Orde Baru adalah gelombang demonstrasi mahasiswa pada 4 Mei 1998. Peristiwa tersebut dipicu oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL). Pengumuman tersebut dilakukan tanpa persetujuan DPR sehingga memicu protes mahasiswa.

8. **Jawaban: d**
Istilah tragedi Gejayan digunakan untuk menyebut unjuk rasa mahasiswa oleh beberapa perguruan tinggi di Jalan Gejayan, Yogyakarta pada 8 Mei 1998. Mereka menyampaikan keprihatinan atas kondisi perekonomian saat itu yang dilanda krisis moneter. Mereka juga mengajukan penolakan Soeharto sebagai presiden kembali, memprotes kenaikan harga, dan mendesak pelaksanaan reformasi.
9. **Jawaban: c**
Pada 19 Mei 1998 Soeharto mengumumkan akan membentuk Komite Reformasi, merombak kabinet, dan mempercepat pemilu. Akan tetapi, rapat pimpinan DPR menetapkan untuk meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya secara konstitusional.
10. **Jawaban: a**
Pengunduran diri Soeharto merupakan salah satu keberhasilan gerakan reformasi dalam mengkritik penyimpangan yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. Adapun maksud dan tujuan gerakan reformasi adalah memperbarui tatanan berbangsa dan bernegara sesuai Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, gerakan reformasi bertujuan mengembalikan kehidupan berbangsa sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
11. **Jawaban: b**
Presiden B.J. Habibie menduduki kursi kepresidenan menggantikan Presiden Soeharto. Dalam waktu pemerintahan yang singkat, Presiden B.J. Habibie berhasil meletakkan dasar-dasar demokrasi bagi Indonesia. Ia memerintahkan untuk membebaskan tahanan politik Orde Baru, menghapus SIUPP, mencabut undang-undang subversi, dan menjamin kebebasan berkumpul, berpendapat, serta membentuk partai politik. Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie terbentuk dua ratus partai politik dan organisasi baru. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh pilihan **b**.
12. **Jawaban: e**
Pada pidato pertama tanggal 21 Mei 1998, Presiden B.J. Habibie menyatakan tekadnya untuk melaksanakan reformasi secara bertahap dan konstitusional. Selain itu, Presiden B.J. Habibie berkomitmen terhadap aspirasi rakyat untuk memulihkan kehidupan politik yang demokratis dan meningkatkan kepastian hukum. Pidato tersebut merupakan penjabaran visi kepemimpinan Presiden B.J. Habibie untuk menjawab tuntutan reformasi.
13. **Jawaban: e**
Pada masa pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid berupaya menyelesaikan agenda reformasi. Agenda reformasi yang disuarakan oleh para aktivis adalah menghilangkan segala bentuk warisan pemerintah Orde Baru. Untuk merealisasikannya, Presiden Abdurrahman Wahid mengambil kebijakan membubarkan Departemen Penerangan. Kebijakan ini dilakukan karena Departemen Penerangan dianggap menjadi alat bagi penguasa untuk menghalang-halangi kebebasan berekspresi dan berpendapat. Sejak pembubaran Departemen Penerangan, pers di Indonesia berkembang pesat.
14. **Jawaban: c**
Salah satu keputusan mengejutkan yang dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid adalah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 mengenai pemulihan hak-hak sipil penganut agama Konghucu. Salah satu bukti diakuinya agama Konghucu adalah kebebasan penyelenggaraan perayaan imlek di Indonesia. Dengan demikian, pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid telah mengakomodasi kepentingan kaum minoritas di Indonesia.
15. **Jawaban: c**
Dalam voting yang dilakukan oleh anggota MPR, Abdurrahman Wahid memperoleh suara lebih banyak dibandingkan Megawati Soekarnoputri. Sidang istimewa MPR pada 20 Oktober 1999 memutuskan Abdurrahman Wahid akan menduduki kursi kepresidenan dan Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden. Meskipun partainya memenangkan pemilu, Megawati Soekarnoputri tidak otomatis terpilih menjadi presiden pada 1999.
16. **Jawaban: d**
Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden Indonesia pada periode 2001–2004 menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri masalah utang luar negeri warisan pemerintah Orde Baru diselesaikan dengan beberapa langkah, yaitu meminta penundaan pembayaran utang, mengakhiri kerja sama dengan IMF, mem-

bubarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, dan mengeluarkan kebijakan privatisasi BUMN.

17. **Jawaban: a**

Cita-cita untuk kembali mencapai swasembada pangan diusahakan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono–Jusuf Kalla. Untuk menciptakan swasembada pangan, pada 2008 pemerintah mengeluarkan kebijakan revitalisasi pertanian dengan target swasembada gula pada 2008, swasembada daging pada 2010, dan swasembada kedelai pada 2010.

18. **Jawaban: e**

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono–Boediono pemerintah menaikkan anggaran pendidikan sebanyak 20% dalam APBN. Kenaikan anggaran pendidikan sebanyak ini terjadi pertama kali sepanjang sejarah Indonesia. Pemanfaatan 20% APBN untuk pendidikan ditujukan untuk program pendidikan dasar, peningkatan kualitas pendidikan, dan perbaikan kurikulum.

19. **Jawaban: d**

Gaya *blusukan* merupakan ciri khas Presiden Joko Widodo sejak menjabat sebagai Wali kota Surakarta dan Gubernur DKI Jakarta. Hingga diangkat menjadi presiden, ciri khas tersebut tidak hilang, bahkan sering ditiru oleh menteri-menteri dalam kabinetnya. Melalui gaya tersebut, Joko Widodo dapat mendengarkan secara langsung aspirasi rakyat. Dengan tindakan tersebut pula, ia dapat mengambil langkah tepat untuk mengatasi permasalahan dalam masyarakat.

20. **Jawaban: e**

Kebijakan ekonomi pertama Presiden Joko Widodo adalah menaikkan bahan bakar minyak (BBM) akibat naiknya harga minyak dunia. Kenaikan BBM ini berdampak pada kenaikan bahan-bahan pokok dan tarif kendaraan umum yang cukup meresahkan masyarakat. Kenaikan harga BBM dari Rp 6.500,00 menjadi Rp8.500,00 ini diikuti demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia.

21. **Jawaban: c**

Politik luar negeri suatu negara lahir ketika negara tersebut memperoleh kedaulatannya. Setiap negara berdaulat memiliki kebijakan terkait politik

luar negerinya. Negara berdaulat menjalankan politik luar negeri yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri dan situasi internasional. Selain itu, setiap politik luar negeri pasti memiliki landasan atau dasar. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh kombinasi **X1), X2), dan Y3)**.

22. **Jawaban: a**

Politik luar negeri bebas aktif memiliki landasan ideal, konstitusional, dan operasional. Landasan operasional politik luar negeri bebas aktif diperlukan agar prinsip bebas aktif dapat dioperasionalkan dalam politik luar negeri Indonesia. Dalam perkembangannya, landasan operasional politik luar negeri Indonesia senantiasa berubah sesuai kepentingan nasional.

23. **Jawaban: d**

Setiap bangsa berdaulat memiliki prinsip politik luar negeri. Prinsip politik luar negeri bangsa Indonesia disepakati sejak kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Pemerintah Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri yang berfungsi merepresentasikan sikap pemerintah Indonesia dalam pergaulan internasional. Prinsip politik luar negeri yang dijalankan Indonesia bersifat bebas aktif.

24. **Jawaban: b**

Salah satu tujuan politik luar negeri Indonesia adalah berpartisipasi aktif menjaga perdamaian dunia. Penerapan tujuan ini ditunjukkan Indonesia pada masa Perang Dingin. Pada masa itu pengaruh blok Barat dan blok Timur telah menyulut berbagai konflik di kawasan Asia Tenggara, khususnya kawasan Indo-Cina. Untuk menyikapi konflik tersebut, Indonesia menunjukkan ketegasan dengan bersikap netral dan terus mengupayakan persatuan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

25. **Jawaban: a**

Pada September 1948 Moh. Hatta menyampaikan pandangannya terkait politik luar negeri Indonesia. Pidato politik tersebut berjudul *Mendayung Antara Dua Karang*. Melalui pidato tersebut, Moh. Hatta menegaskan bahwa Indonesia tidak memihak pada salah satu blok yang ada. Indonesia juga tidak berniat menciptakan suatu blok yang baru. Indonesia juga akan bersahabat baik dengan negara-negara di blok Barat dan blok Timur.

26. **Jawaban: c**

Pada 1956 terjadi konflik di wilayah Terusan Suez. Konflik ini dipicu oleh serangan Inggris, Prancis, dan Israel terhadap Mesir terkait kepentingan di Terusan Suez. Untuk meredakan konflik tersebut, pada 5 November 1956 Sekjen PBB membentuk sebuah komando PBB dengan nama *United Nations Emergency Forces* (UNEF). Pemerintah Indonesia menyatakan kesanggupannya mengirimkan pasukan perdamaian dalam UNEF pada 8 November 1956. Pasukan tersebut kemudian dikenal dengan Misi Garuda I.

27. **Jawaban: a**

Dalam upaya menyelesaikan konflik di Kongo, pemerintah Indonesia mengirimkan Misi Garuda II dan III pada 1960 dan 1962. Selama bertugas di Kongo, Kontingen Garuda mendapat julukan *Les Spiritesses* dari pasukan pemberontak Kongo. Julukan tersebut berkaitan erat dengan strategi gerilya yang dijalankan oleh Kontingen Garuda. Strategi tersebut dinilai sebagai cara bertempur yang tidak biasa dilakukan oleh pasukan-pasukan lain.

28. **Jawaban: c**

Pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah pernyataan yang menjadi dasar terbentuknya kedaulatan wilayah laut pada 13 Desember 1957. Pernyataan tersebut dikenal dengan Deklarasi Djuanda. Penyusunan Deklarasi Djuanda dilakukan sebagai usaha bangsa Indonesia untuk memperjuangkan batas wilayah laut sehingga wilayah Indonesia menjadi suatu kesatuan utuh dilihat dari berbagai aspek politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dalam Deklarasi Djuanda, batas teritorial Indonesia yang sebelumnya 3 mil diperlebar menjadi 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik terluar pulau-pulau Indonesia pada saat air laut surut. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh pilihan c.

29. **Jawaban: a**

Penggalan Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Republik Indonesia. Isi Deklarasi Djuanda memberi manfaat besar bagi Indonesia yaitu berupa kesatuan wilayah lautan dan daratan yang bulat dan utuh.

30. **Jawaban: b**

Gerakan Non-Blok (GNB) lahir pada masa Perang Dingin. Kekhawatiran akan munculnya perang terbuka antara Uni Soviet dan Amerika Serikat memunculkan inisiatif negara-negara dunia ketiga untuk membentuk GNB. Perkembangan GNB mengalami perubahan pada awal tahun 1990-an. Peristiwa runtuhnya Tembok Berlin pada 1989 dan bubarnya Uni Soviet menandai berakhirnya Perang Dingin. Setelah Perang Dingin, beberapa kalangan menganggap GNB sudah tidak relevan lagi keberadaannya.

31. **Jawaban: c**

Dasasila Bandung dan Semangat Bandung yang menjadi landasan pemikiran para peserta KAA merupakan tonggak penting pembentukan organisasi *Non-Aligned Movement* (NAM) atau Gerakan Non-Blok (GNB). Negara-negara anggota GNB ingin memperoleh kemerdekaan hidup berdampingan secara damai (*peace-full coexistence*), kerja sama untuk keuntungan bersama (*mutual benefit*), dan perdamaian.

32. **Jawaban: b**

Wacana pada soal terkait dengan peristiwa pembakaran masjid Al-Aqsha akibat perang antara Israel dan Palestina. Peristiwa tersebut terjadi pada 21 Agustus 1969. Peristiwa ini menimbulkan reaksi dunia, terutama dari kalangan umat Islam. Setelah peristiwa itu, negara-negara Islam sepakat membentuk sebuah organisasi yang bernama *Organization of Islamic Cooperation* atau Organisasi Konferensi Islam (OKI). Pembentukan organisasi ini bertujuan memecahkan masalah di Timur Tengah, termasuk penyelesaian masalah pembakaran masjid Al-Aqsha.

33. **Jawaban: c**

Gambar pada soal adalah KTT ASEAN XIX tahun 2011 yang diselenggarakan di Indonesia. KTT ASEAN tersebut menghasilkan perjanjian kerja sama antarnegara-negara ASEAN. Salah satu dokumen yang menandai kerja sama antarnegara-negara ASEAN dalam bidang politik dan keamanan adalah deklarasi kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara atau *Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone* (SEANWFZ).

34. **Jawaban: d**

Peran Indonesia dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) tecermin dari upaya pengajuan rencana peninjauan kembali mekanisme dan sarana OKI. Indonesia juga turut serta menyelesaikan masalah penduduk muslim Moro di Filipina, mendukung kemerdekaan Palestina, serta mendukung perjuangan OKI dalam menentang rasialisme, diskriminasi, dan kolonialisme di dunia. Jadi, pilihan yang tepat ditunjukkan pernyataan angka 2), 4), dan 5).

35. **Jawaban: e**

Konflik Kamboja–Vietnam terjadi pada periode 1970–1980-an. Konflik tersebut mengakibatkan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara terganggu. Oleh karena itu, Indonesia tergugah untuk berperan aktif membantu penyelesaian konflik tersebut. Peran aktif Indonesia tersebut diwujudkan dengan menyelenggarakan *Jakarta Informal Meeting* (JIM). Pertemuan ini diadakan pada 1988 di Istana Bogor. Dalam pertemuan ini Indonesia mengajak pihak-pihak yang berkonflik untuk duduk bersama mencari solusi atas konflik yang terjadi.

B. Uraian

1. **Jawaban:**

Memasuki tahun 1997, negara-negara di Asia Tenggara mengalami guncangan krisis ekonomi. Salah satu dampak terjadinya krisis ekonomi adalah turunnya nilai tukar mata uang di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan Indonesia. Nilai tukar rupiah merosot dari Rp2.500,00/US\$ hingga Rp17.000,00/US\$. Kondisi ini mengakibatkan bursa saham jatuh dan banyak perusahaan bangkrut. Dampak krisis ini benar-benar dirasakan karena harga kebutuhan sehari-hari mengalami kenaikan. Dengan banyaknya perusahaan yang bangkrut, banyak pekerja kehilangan pekerjaannya.

2. **Jawaban:**

Krisis multidimensional pada 1997–1998 merupakan pemicu munculnya gerakan reformasi. Pada awalnya gerakan reformasi hanya dilakukan di beberapa perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Pada perkembangannya, tuntutan ini

semakin meluas karena tidak mendapatkan respons dari pemerintah. Oleh karena itu, para mahasiswa harus turun ke jalan bersama organisasi massa lainnya yang juga menuntut reformasi. Agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan.

3. **Jawaban:**

Peran mahasiswa di Surakarta menuntut reformasi pada 1998 dipelopori oleh mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Universitas Muhammadiyah Solo (UMS). Mahasiswa di Surakarta melakukan aksi demonstrasi karena dipicu oleh demonstrasi di wilayah Jakarta dan Yogyakarta. Gelombang demonstrasi mahasiswa Surakarta tersebut menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Selain itu, gelombang demonstrasi mahasiswa Surakarta tersebut memprotes kenaikan harga bahan pokok dan mendesak dilakukannya reformasi.

4. **Jawaban:**

Pada 12 Maret 1998 pelantikan Soeharto sebagai presiden untuk ketujuh kalinya mendapat penolakan karena beberapa faktor berikut.

- Demokrasi tidak dilaksanakan semestinya.
- Banyak anggota DPR/MPR yang menerapkan sistem nepotisme.
- Pemerintahan Orde Baru lebih condong ke negara Barat.
- Ketidakadilan dalam bidang hukum.

5. **Jawaban:**

Abdurrahman Wahid merupakan Presiden keempat Republik Indonesia yang menjabat sekira dua tahun (1999–2001). Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tidak berlangsung lama karena hubungan dengan kelompok Poros Tengah yang merupakan pendukungnya ketika mencalonkan diri sebagai presiden tidak berjalan baik. Selain itu, kursi DPR yang sebagian besar diduduki oleh Golkar menggunakan kekuasaan DPR untuk menggoyang kursi kepresidenan Abdurrahman Wahid. Kondisi ini berdampak pada hubungan yang tidak harmonis antara DPR dengan presiden. MPR pun akhirnya mengadakan sidang istimewa yang menghasilkan keputusan memecahkan Presiden Abdurrahman Wahid.

6. **Jawaban:**

Interaksi internasional bangsa Indonesia dimulai sejak merdeka pada 17 Agustus 1945. Interaksi tersebut memiliki berbagai tujuan, baik sebagai upaya memperoleh dukungan kemerdekaan maupun dukungan untuk menghadapi ancaman dari negara lain. Dalam menjalin interaksi internasional dengan berbagai negara, Indonesia tidak membedakan latar belakang politik, ekonomi, budaya, dan ideologi.

7. **Jawaban:**

Prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia sebagai berikut.

- a. Negara Indonesia menjalankan politik damai yang berarti bahwa bangsa Indonesia bersama-sama dengan masyarakat dari bangsa-bangsa lain berupaya menegakkan perdamaian dunia.
- b. Negara Indonesia ingin bersahabat dengan negara-negara lain atas dasar saling menghargai dan tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Indonesia menjalankan politik bertetangga baik dengan semua negara di dunia.
- c. Negara Indonesia menjunjung tinggi sendi-sendi hukum nasional.
- d. Negara Indonesia membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman pada Piagam PBB.

8. **Jawaban:**

Landasan operasional politik luar negeri Indonesia mengalami perubahan pada masa reformasi. Secara substansi, landasan operasional politik luar negeri Indonesia merujuk pada Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999. Keluarnya ketetapan tersebut dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi dan krisis nasional pada 1997 yang dapat mengancam integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, ketetapan tersebut menekankan perlunya upaya reformasi di segala bidang, termasuk politik luar negeri.

9. **Jawaban:**

Gerakan Non-Blok (GNB) atau *Non-Aligned Movement* (NAM) merupakan organisasi internasional yang terdiri atas lebih dari seratus negara yang tidak beraliansi dengan blok kekuatan besar mana pun. Indonesia memiliki peran penting dalam GNB sebagai berikut.

- a. Sebagai salah satu negara pemrakarsa.
- b. Sebagai salah satu negara pengundang dalam KTT I GNB di Beograd.
- c. Menjadi ketua GNB pada 1992–1995.

10. **Jawaban:**

Pembentukan ASEAN dilatarbelakangi persamaan kehidupan bangsa-bangsa di Asia Tenggara sebagai berikut.

- a. Persamaan bidang kebudayaan, bahasa, adat, tata krama, dan pola kehidupan.
- b. Persamaan senasib akibat kolonialisme bangsa asing.
- c. Persamaan letak geografis yang strategis dalam percaturan politik dan ekonomi internasional.



Perkembangan Iptek di Indonesia

A. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Uji Kompetensi 1

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: b**

Bangsa Eropa yang melakukan penelitian ilmiah di Indonesia turut menyumbang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya, pada abad XVI peneliti ahli botani George Rumphius menyelesaikan penelitiannya dengan judul *Herbarium Amboinese* di Kepulauan Maluku. Oleh karena itu, bangsa Eropa memiliki peran penting dalam perkembangan iptek di Indonesia.

2. **Jawaban: b**

Pendirian organisasi *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* (Lembaga Keilmuan dan Kesenian) di Batavia dilatarbelakangi oleh pemikiran-pemikiran ilmiah dan ilmu pengetahuan yang mulai berkembang sejak adanya revolusi intelektual pada akhir abad XVIII. Pada awalnya organisasi tersebut berfungsi sebagai perkumpulan ilmiah para peneliti Belanda. Selanjutnya, keberadaan perkumpulan ini mendorong Belanda untuk mendirikan organisasi serupa di wilayah jajahannya.

3. **Jawaban: b**

Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI) didirikan oleh bangsa Indonesia sebagai pengganti *Organisatie voor Natuurwetenschappelijk Onderzoek* atau Organisasi untuk Penyelidikan dalam Ilmu Pengetahuan Alam (OPIPA) bentukan Belanda. Organisasi ini berkonsentrasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sebagai wujud kontribusi negara terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, pemerintah membentuk MIPI.

4. **Jawaban: b**

Tugas dan kewenangan LIPI sesuai Ketetapan MPRS Nomor 18/B/1967 adalah mengarahkan iptek yang berkembang agar dapat bermanfaat bagi rakyat Indonesia, mencari kebenaran ilmiah; sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945; dan mempersiapkan pembentukan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI). Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh angka 1), 2), dan 4).

5. **Jawaban: a**

Radio swasta yang berdiri pada masa kolonial Belanda antara lain *Nederlandsch Indische Radio Omroep* (NIROM) di Jakarta. Selain itu, di Solo terdapat *Solosche Radio Vereeniging* (SRV). Di Yogyakarta terdapat *Mataramsche Vereeniging voor Radio Omroep* (MAVRO). Selanjutnya, terdapat EMRO di Madiun. Sementara itu, *Bataviaasche Radio Vereeniging* (BRV) yang berdiri pada 1926 di Jakarta merupakan radio milik pemerintah Batavia dan *Hoso Kanri Kyoku* merupakan radio bentukan Jepang. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh kombinasi X1) dan Y1).

6. **Jawaban: a**

Lahirnya RRI dilatarbelakangi oleh pertemuan antara delegasi radio-radio dan sekretaris negara A.G. Pringgodigdo. Pertemuan tersebut terjadi karena situasi politik yang sedang gaduh akibat menyerahnya Jepang terhadap Sekutu. Momen tersebut dimanfaatkan pejuang radio Indonesia untuk segera membentuk organisasi penyiaran tingkat nasional dan usaha untuk menguasai peralatan, radio *Hoso Kanri Kyoku*.

7. **Jawaban: d**

Penggunaan kapal jung sudah dikenal masyarakat Jawa sebelum bangsa Barat datang ke Nusantara. Kapal jenis jung ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat Jawa untuk melakukan perjalanan perdagangan ke wilayah lain. Selain itu, masyarakat Jawa menggunakan kapal jung untuk mengangkut personel angkatan perang ke wilayah lain. Selanjutnya, penggunaan kapal sebagai alat transportasi semakin berkembang pada masa pemerintah kolonial Belanda.

8. **Jawaban: a**

Teknologi kereta api mulai dikembangkan pada masa pemerintah kolonial Belanda. Menteri Urusan Negara Jajahan Belanda J.C. Baud mengusulkan pembangunan jalur rel kereta api untuk keperluan pengangkutan hasil pertanian dari perdesaan ke perkotaan atau pelabuhan. Pada akhirnya pembangunan rel kereta api dimulai dari 1862 sampai dengan 1939. Pembangunan rel kereta api dilakukan Jawa, Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Sulawesi.

9. **Jawaban: d**

Penanaman beberapa tanaman dalam suatu lahan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan diversifikasi pertanian. Wacana pada soal menjelaskan bahwa petani di Dieng telah menerapkan metode diversifikasi pertanian. Diversifikasi pertanian dapat dilakukan dengan memperbanyak jenis kegiatan pertanian dan memperbanyak jenis tanaman pada satu lahan guna menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian.

10. **awaban: b**

Ekstensifikasi pertanian merupakan usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian baru. Perluasan lahan tersebut dapat dilakukan dengan membuka hutan. Wilayah seperti Sumatra, Kalimantan, dan Papua menjadi daerah yang cocok untuk penerapan program ekstensifikasi. Hal ini karena di wilayah tersebut masih didominasi oleh kawasan hutan dan daerah jarang penduduk.

B. Uraian

1. **Jawaban:**

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diperlukan untuk mengatur siaran-siaran yang ditayangkan di televisi. Apabila tayangan televisi menyajikan adegan kekerasan, pornografi, tayangan tidak mendidik, dan jauh dari kesantunan, KPI bertugas untuk menindak program siaran tersebut. Dengan adanya KPI, terdapat standar yang boleh dan tidak boleh ditayangkan di televisi.

2. **Jawaban:**

Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) Palapa merupakan proyek yang dibangun pemerintah Orde Baru untuk mengembangkan sistem informasi di Indonesia. PT Telkom Indonesia yang sebelumnya bernama Perumtel menjadi perusahaan yang mengelola SKSD. Satelit generasi pertama yang diluncurkan oleh Telkom adalah Satelit Palapa A-1. Satelit ini diluncurkan pada Juli 1976 di Cape Keneddy, Amerika Serikat. Selanjutnya, secara berturut-turut pemerintah Indonesia meluncurkan Satelit Palapa B-1, Palapa B-2, Palapa B-2P, Palapa C-1, Palapa C-2, Telkom-1, Telkom-2, Telkom-3, dan Telkom-4. Satelit terbaru yang diluncurkan bangsa Indonesia adalah Satelit Nusantara Satu dengan teknologi *High Throughtput Satellite* (HTS) pada Februari 2019.

3. **Jawaban:**

Pemerintah kolonial Belanda memanfaatkan alat transportasi darat untuk mengawasi daerah-daerah jajahannya. Oleh karena itu, pemerintah Belanda membangun jalan raya sebagai penunjang dalam mengawasi daerah jajahannya. Daendels membangun Jalan Raya Pos sekira 1.000 km dari Anyer (Banten) hingga Panarukan (Jawa Timur). Pembangunan jalan raya tersebut bertujuan untuk mempermudah akses pejabat Belanda berinteraksi dengan buruh. Selain itu, dengan adanya jalan raya arus transportasi penduduk di daerah jajahan menjadi lancar.

4. **Jawaban:**

Dalam rangka mewujudkan teknologi tingkat tinggi, pemerintah Indonesia berkeinginan untuk membangun industri pesawat terbang nasional.

Oleh karena itu, Presiden Soeharto memanggil ahli aeronautika dari Indonesia lulusan Universitas Aachen, Jerman bernama B.J. Habibie. Selanjutnya, B.J. Habibie mendirikan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk mewujudkan pengembangan industri dirgantara nasional.

5. **Jawaban:**

Peran strategis sektor pertanian dalam perekonomian dan pembangunan nasional sebagai berikut. *Pertama*, kontribusi terhadap pendapatan nasional. *Kedua*, penyerapan tenaga kerja. *Ketiga*, penyedia bahan baku sektor lain. *Keempat*, penyedia bahan pangan bagi masyarakat. *Kelima*, pasar bagi produk non-pertanian.

B. Dampak Perkembangan Iptek di Indonesia

Uji Kompetensi 2

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: c**

Pada awalnya peralatan elektronik hanya dimiliki masyarakat kelas menengah ke atas (kaya) karena harganya yang mahal. Seiring berjalannya waktu banyak perusahaan memproduksi barang-barang elektronik karena peminatnya semakin tinggi. Perusahaan-perusahaan ini bersaing untuk mendapatkan pasar dengan menurunkan harga jual. Dengan demikian, peralatan ini dapat dengan cepat sampai ke tangan masyarakat karena harganya yang terjangkau.

2. **Jawaban: d**

Perkembangan iptek memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, yakni berkaitan dengan perkembangan ekonomi dan industri. Perkembangan ekonomi dan industri ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, terjadinya industrialisasi, serta produktivitas dunia industri semakin meningkat. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh pilihan **d**.

3. **Jawaban: b**

Perkembangan teknologi dimanfaatkan perusahaan-perusahaan industri untuk meningkatkan hasil produksi. Banyak pengusaha beralih menggunakan teknologi modern dalam usaha mereka. Penggunaan teknologi secara tidak langsung menyingkirkan peran tenaga manusia. Manusia kini hanya sebagai operator yang menjalankan dan mengawasi mesin. Oleh karena itu, penggunaan teknologi modern dapat menghemat tenaga kerja.

4. **Jawaban: b**

Perkembangan teknologi informasi mempermudah masyarakat mengakses informasi. Meskipun demikian, banyak masyarakat belum mampu menyaring informasi yang diperoleh. Kondisi tersebut mempermudah penyebaran informasi dan berita palsu (*hoax*) oleh oknum tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, masyarakat harus berhati-hati dalam menyaring dan menyebarkan informasi agar tidak menyebarkan informasi palsu (*hoax*).

5. **Jawaban: d**

Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi menyebabkan bentuk komunikasi tatap muka (*face to face*) menjadi semakin surut. Seseorang yang terus menerus bergaul dengan komputer atau gawainya cenderung menjadi individualis. Dengan demikian, kegiatan sosial seseorang akan menjadi semakin berkurang dari waktu ke waktu.

6. **Jawaban: a**

Pembangunan tol memberi dampak positif bagi masyarakat, yaitu dapat mengurangi kemacetan di jalan utama. Akan tetapi, pembangunan jalan tol dapat memicu terjadinya banjir. Kondisi ini karena pembangunan tol harus membuka lahan baru dan menutupnya dengan cor atau semen. Akibatnya, daerah resapan air menjadi berkurang. Kondisi tersebut dapat menyebabkan banjir/genangan air.

7. **Jawaban: c**

Pemerintah Orde Baru mewujudkan program Revolusi Hijau dengan menetapkan kebijakan menggunakan mesin-mesin produksi, subsidi harga pupuk, kredit pertanian, penetapan harga dasar gabah, pembangunan irigasi, penyeragaman bibit,

dan penyuluhan pertanian. Dengan menerapkan kebijakan tersebut, pada 1984 Indonesia berhasil mencapai swasembada beras. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh angka **1), 3), dan 5)**.

8. **Jawaban: b**

Penggunaan bibit unggul dapat mengurangi risiko serangan hama penyakit. Selain itu, penggunaan bibit unggul dapat memaksimalkan hasil pertanian. Munculnya varietas tanaman dengan usia pendek akan menambah intensitas penanaman dalam setahun.

9. **Jawaban: a**

Pada masa Revolusi Hijau petani tidak diperkenankan menggunakan bibit sendiri. Petani harus menggunakan bibit yang disediakan pemerintah. Bibit ini merupakan hasil rekayasa genetika yang sangat bergantung pada penggunaan pupuk dan pestisida kimia. Dengan demikian, pelaksanaan Revolusi Hijau menguntungkan produsen pupuk karena meningkatnya permintaan akan pupuk.

10. **Jawaban: e**

Akibat munculnya jenis pupuk kimia yang lebih efektif dibanding pupuk organik, petani mulai enggan menggunakan pupuk organik. Bahkan, untuk mencapai produksi maksimal, tidak jarang petani menggunakan pupuk sintesis dengan dosis lebih tinggi dari anjuran. Penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan ini menyebabkan penurunan kualitas padi.

B. Uraian

1. **Jawaban:**

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan seperti halnya yang dilakukan beberapa negara di dunia, pemerintah menetapkan kebijakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Penyelenggaraan UNBK pertama kali dilaksanakan pada 2014 dan terbatas SMP Indonesia Singapura dan SMP Indonesia Kuala Lumpur. Selanjutnya, secara bertahap Ujian Nasional di sekolah-sekolah Indonesia menggunakan sistem UNBK. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2018 jumlah pelajar yang mengikuti UNBK 7.030.892 peserta didik. Jika melihat kondisi tersebut, kualitas pendidikan di Indonesia menjadi semakin maju dan mengikuti negara-negara maju di dunia.

2. **Jawaban:**

Dengan berkembangnya teknologi transportasi manusia dapat melakukan perjalanan jauh dalam waktu singkat. Manusia dapat memanfaatkan transportasi udara, laut, dan darat. Penggunaan teknologi transportasi mengakibatkan peningkatan polusi. Selain polusi, daerah resapan air menjadi semakin berkurang akibat pembangunan sarana transportasi seperti pembuatan jalan raya.

3. **Jawaban:**

Berbagai perubahan dan kemudahan dalam media elektronik telah memengaruhi pola pikir masyarakat. Masyarakat berpikir semakin mudah mendapatkan berbagai hal secara instan. Selain itu, masyarakat menjadi mudah terpengaruh hal baru tanpa menyaring informasi yang diperoleh. Banyak informasi dan berita palsu (*hoax*) yang tersebar di dunia maya yang disebarkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Jika tidak berhati-hati dalam menyaring informasi, masyarakat akan mudah termakan tipuan berita *hoax* tersebut.

4. **Jawaban:**

Penggunaan teknologi modern pada perusahaan industri dapat mempercepat proses produksi, meningkatkan proses produksi, dan menghemat tenaga kerja. Akibatnya, perusahaan lebih memilih menggunakan tenaga mesin dibanding tenaga manusia. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran karena teknologi mampu mengganti tenaga kerja manusia. Selain meningkatkan pengangguran, beberapa perusahaan industri yang menggunakan teknologi modern menghasilkan limbah bahan bakar yang dapat menyebabkan pencemaran air dan asapnya dapat menyebabkan polusi udara.

5. **Jawaban:**

Di beberapa daerah, padi ditanam secara terus menerus tanpa diselingi tanaman lain. Penanaman padi tanpa diselingi mengakibatkan siklus hama tidak terputus. Sementara itu, penggunaan obat pemberantas hama secara terus menerus akan menyebabkan hama lebih kebal terhadap pestisida. Bahkan, beberapa petani menggunakan pestisida dalam jumlah berlebihan yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem.

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: e**

Pada 18 Mei 1817 Gubernur Jenderal Hindia Belanda Baron van der Capellen melakukan kesepakatan dengan Caspar George Carl Reinwardt. Kesepakatan tersebut berisi usaha untuk mendirikan pusat penelitian botani. Pusat penelitian botani tersebut diberi nama *s'Lands Plantetuin te Buienzorg* yang sekarang dikenal dengan nama Kebun Raya Bogor.

2. **Jawaban: c**

Indonesia termasuk negara yang berupaya melakukan riset ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu bersaing dengan negara-negara lain. Sejak kemerdekaan Indonesia sampai masa reformasi, Indonesia dapat dikatakan berhasil dalam mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. **Jawaban: e**

Organisatie voor Natuurwetenschappelijk Onderzoek atau Organisasi untuk Penyelidikan dalam Ilmu Pengetahuan Alam (OPIPA) merupakan badan peneliti ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pendirian badan ini bertujuan untuk menggantikan badan penelitian bentukan pemerintahan kolonial Belanda. Apabila badan ini dikelola oleh bangsa Indonesia sendiri dapat berpengaruh lebih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional.

4. **Jawaban: b**

Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) merupakan lembaga ilmu pengetahuan yang dibentuk secara independen. AIPI dibentuk sebagai dewan penasihat ilmiah oleh LIPI dalam kegiatan penelitian di Indonesia. Sesuai tugas dan kewenangannya, AIPI ditetapkan sebagai lembaga yang mengatur penelitian dan LIPI yang mengelola kesekretariatnya. Oleh karena itu, AIPI dan LIPI diharapkan dapat menciptakan sinergi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

5. **Jawaban: c**

Setelah kemerdekaan pemerintah Indonesia fokus dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Untuk mengembangkan iptek, pemerintah membentuk beberapa lembaga riset,

di antaranya Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan *Economic Research Institute for ASEAN and East Asia* (ERIA). Sementara itu, BNPB dan BPS bukan merupakan lembaga riset. BNPB merupakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sedangkan BPS adalah Badan Pusat Statistik. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh kombinasi **P2)** dan **Q3)**.

6. **Jawaban: b**

Pada masa pendudukan Jepang radio-radio swasta yang berdiri sejak masa penjajahan Belanda diambil alih oleh pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang memanfaatkan radio untuk memengaruhi rakyat Indonesia dengan informasi-informasi politik gaya Jepang. Siaran radio masa Jepang hanya untuk menyampaikan kepentingan-kepentingan Jepang semata.

7. **Jawaban: a**

Kemajuan radio di Indonesia dimulai sejak perubahan *Government Owned Radio* ke arah *Public Service Broadcasting* sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2000 yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia pada 7 Juni 2000. Siaran radio yang awalnya hanya dipusatkan pada penyiaran milik pemerintah, mulai dibebaskan untuk masyarakat umum. Perubahan tersebut menyebabkan munculnya radio-radio swasta di beberapa daerah di Indonesia.

8. **Jawaban: c**

Telepon pintar (*smartphone*) merupakan alat komunikasi yang saat ini sudah menjadi gaya hidup masyarakat. Penggunaan telepon pintar merupakan hasil teknologi komunikasi yang sudah semakin maju. Kemajuan teknologi komunikasi semakin memudahkan penggunaannya untuk berkomunikasi satu sama lain.

9. **Jawaban: b**

Pada relief candi Borobudur terdapat relief perahu bercadik. Relief tersebut menandakan bahwa Indonesia sudah mengenal sistem pelayaran. Sarana transportasi air digunakan oleh masyarakat Indonesia kuno untuk melakukan perjalanan antarpulau. Sarana transportasi air

dipilih karena kondisi alam saat itu lebih banyak lautan daripada daratan. Oleh karena itu, masyarakat kuno membutuhkan perahu untuk bepergian.

10. **Jawaban: b**

Masyarakat Indonesia turut berperan dalam pembangunan Jalan Raya Pos dari Anyer (Banten) sampai Panarukan (Jawa Timur). Pembangunan ini merupakan proyek yang diprogramkan Daendels saat menjabat gubernur jenderal di Belanda. Meskipun proyek ini merupakan kerja paksa, masyarakat pribumi tetap berperan dalam kemajuan sarana transportasi darat di Indonesia.

11. **Jawaban: d**

Pembangunan jalur kereta api pada masa kolonial Belanda mulai dikembangkan sejak 1862. Pembangunan jalur rel kereta api tersebut dimaksudkan sebagai sarana pengangkutan hasil pertanian dari perdesaan ke perkotaan atau pelabuhan. Jalur Bogor–Batavia dipilih oleh pemerintah kolonial Belanda karena menghubungkan daerah penghasil kopi dengan pusat pemerintahan yang ada di Batavia.

12. **Jawaban: a**

Pelaksanaan pembangunan MRT di Jakarta sudah direncanakan sejak 1985. Pada saat itu proyek tersebut masih dalam kajian pemerintah. Hingga akhirnya pada 2005 Presiden Republik Indonesia menegaskan bahwa proyek MRT Jakarta menjadi proyek nasional. Untuk melaksanakan proyek tersebut, pemerintah mendirikan perusahaan MRT yang diperkuat dengan Perda DKI Jakarta Nomor 3 tahun 2008.

13. **Jawaban: c**

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto mengembangkan berbagai industri strategis yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui BPPT, dibentuklah Badan Perencana Industri Strategis (BPIS). BPIS berhasil mengembangkan industri strategis seperti Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN), Perusahaan Armada Laut (PAL), dan Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN). Sementara itu, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakorsurtanal) atau sekarang disebut Badan Informasi Geospasial (BIG) merupakan lembaga yang meneliti pemetaan dan sumber daya alam. Badan

Standardisasi Nasional adalah lembaga yang menetapkan akreditasi sesuai satuan dan ukuran. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh angka 2), 3), dan 4).

14. **Jawaban: a**

Pada awal pembentukannya IPTN hanya diperbolehkan mengambil alih teknologi pesawat terbang berdasarkan lisensinya. Pada akhirnya IPTN berhasil mendapatkan izin merakit pesawat sendiri. Selanjutnya, IPTN diberi izin memproduksi komponen pesawat sendiri setelah proses perakitan pesawat berjalan sempurna.

15. **Jawaban: c**

Untuk menunjang keselamatan penerbangan di Indonesia pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012. Kedua dasar tersebut menjadi dasar pengoperasian Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI). Sistem navigasi penerbangan diperlukan untuk mengatur lalu lintas penerbangan agar tidak terjadi kecelakaan pesawat.

16. **Jawaban: c**

LPPNPI disebut juga sebagai AirNav Indonesia. Tiap-tiap bandara memiliki menara AirNav Indonesia. AirNav Indonesia didirikan untuk menetapkan keselamatan dan pelayanan navigasi penerbangan agar dapat terselenggara dengan baik. AirNav Indonesia bekerja sesuai dengan standar keselamatan. Standar tersebut terdiri atas sumber daya manusia (SDM), peralatan, serta prosedur mengikuti perkembangan dan standar yang diatur secara ketat dalam *Civil Aviation Safety Regulations* (CASR).

17. **Jawaban: b**

Munculnya Revolusi Hijau di Indonesia didasarkan pada kondisi berikut.

- 1) Kebutuhan penduduk semakin meningkat.
- 2) Produktivitas pertanian masih rendah.
- 3) Produksi pertanian belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pokok.

Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan angka 1), 2), dan 4).

18. **Jawaban: c**

Intensifikasi pertanian dilakukan dengan program Panca Usaha Tani. Program Panca Usaha Tani meliputi kegiatan sebagai berikut.

- 1) Penggunaan bibit unggul.
- 2) Penggunaan pupuk kimia.
- 3) Penggunaan pestisida.
- 4) Pemberantasan hama.
- 5) Peningkatan irigasi.

Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh pilihan **c**.

19. **Jawaban: c**

Secara konsepsi pembangunan nasional, sektor pertanian masih menjadi prioritas dalam program pembangunan pemerintahan setelah reformasi. Hal ini karena sektor pertanian memiliki peran strategis terhadap perekonomian nasional. Secara umum program Revolusi Hijau bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.

20. **Jawaban: b**

Ekstensifikasi pertanian banyak dilakukan di daerah jarang penduduk seperti di luar Pulau Jawa, khususnya di beberapa daerah tujuan transmigrasi. Sebagai contoh, wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Papua. Sementara itu, Pulau Jawa lebih cocok diterapkan program intensifikasi pertanian.

21. **Jawaban: e**

Untuk meningkatkan hasil produksi perkebunan, pemerintah menetapkan kebijakan berikut.

- 1) Merehabilitasi perkebunan dan pabrik.
- 2) Menetapkan intensifikasi.
- 3) Melakukan ekstensifikasi.
- 4) Melakukan diversifikasi tanaman.

Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan pilihan **c**.

22. **Jawaban: b**

Dalam rangka mewujudkan program Revolusi Hijau pemerintah menetapkan kebijakan penggunaan bibit unggul. Perkembangan dalam bidang bioteknologi mampu memunculkan varietas tanaman yang memiliki produktivitas tinggi dan buah yang berkualitas. Varietas tanaman baru ini merupakan jenis tanaman berusia pendek sehingga mempercepat masa panen.

23. **Jawaban: d**

Penggunaan teknologi pertanian modern tentu dapat menggeser tenaga kerja manusia. Sebagai contoh, saat masa panen padi petani pemilik sawah menggunakan tenaga kerja di sekitar rumah mereka. Akan tetapi, setelah munculnya

thresher proses potong hingga perontokan dilakukan menggunakan mesin. Akibatnya, petani pemilik sawah lebih memilih menggunakan mesin *thresher* untuk menghemat waktu dan biaya panen.

24. **Jawaban: a**

Rehabilitasi pertanian merupakan usaha pemulihan produktivitas sumber daya pertanian kritis. Rehabilitasi pertanian bertujuan memperbaiki lahan pertanian yang semula tidak produktif menjadi produktif atau mengganti tanaman yang tidak produktif menjadi tanaman lebih produktif menggunakan bibit unggul.

25. **Jawaban: c**

Kehadiran teknologi pertanian modern yang diperkenalkan pada masa Revolusi Hijau berdampak pada meningkatnya angka ketergantungan masyarakat perdesaan. Masyarakat perdesaan mulai meninggalkan teknologi tradisional seperti ani-ani saat panen. Selain itu, petani enggan menggunakan pupuk organik. Mereka lebih memilih menggunakan pupuk kimia yang dianggap lebih menguntungkan karena dapat meningkatkan hasil panen.

26. **Jawaban: b**

Sebelum penerapan Revolusi Hijau, Indonesia merupakan negara pengimpor beras. Akan tetapi, setelah penerapan program Revolusi Hijau terjadi peningkatan produksi beras dan mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional. Ini dibuktikan pada saat 1984 Indonesia mencapai swasembada beras.

27. **Jawaban: e**

Program Revolusi Hijau bertujuan meningkatkan hasil perkebunan Indonesia. Sejak pelaksanaan Revolusi Hijau, volume ekspor tanaman perkebunan seperti kopi, dan cokelat terus meningkat. Akibatnya, tanaman pangan di Indonesia menjadi semakin menurun karena banyaknya lahan yang digunakan untuk menanam tanaman perkebunan.

28. **Jawaban: e**

Mesin pada gambar adalah *handtractor*. Penggunaan *handtractor* dapat mempercepat dan mempermudah pengolahan tanah. Alat ini dapat mempercepat proses menggemburkan tanah. Dengan demikian, petani dapat mempercepat proses produksi/tanam.

29. **Jawaban: d**

Revolusi Hijau memperkenalkan jenis tanaman monokultur pada masyarakat. Akibatnya, terjadi perubahan pola penanaman oleh petani. Perubahan pola ini menyebabkan adanya spesialisasi atau pengkhususan jenis tanaman. Contoh spesialisasi tanaman, yaitu penggunaan lahan khusus untuk menanam semangka, wortel, cabai, dan kentang. Perkembangan spesialisasi jenis tanaman didukung adanya peningkatan daerah urban, permintaan pasar, dan perluasan komunikasi modern.

30. **Jawaban: c**

Petani beranggapan penggunaan pupuk dapat meningkatkan produktivitas tanamannya. Oleh karena itu, petani menggunakan pupuk kimia dengan dosis berlebihan. Selain itu, untuk menghindari serangan hama penyakit, petani melakukan aplikasi pestisida secara reguler, terjadwal, dan melebihi keperluan. Akibatnya, pupuk kimia dan pestisida mengurangi tingkat kesuburan tanah.

B. Uraian

1. **Jawaban:**

Untuk menggantikan Durenas dan MIPI, pada 1967 pemerintah membentuk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Tugas LIPI sebagai berikut.

- Membimbing perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berakar di Indonesia agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
- Menjamin kebebasan ilmiah selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
- Mempersiapkan pembentukan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI).

2. **Jawaban:**

Jalur kereta api di luar Pulau Jawa dikerjakan oleh *Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij* (NIS). Pada 1874 dibangun jalur kereta api di Aceh, Sumatra Utara (1886) dan Sumatra Barat (1891). Selain itu, pada 1923 di wilayah Sulawesi tepatnya jalur kereta api Makassar–Takalar dibangun jalur kereta api sekira 47 km.

3. **Jawaban:**

Pada akhir 1980-an telepon seluler sudah digunakan di Indonesia. Akan tetapi, penggunaannya hanya sebatas kalangan tertentu saja. Pada akhir 1990-an, penggunaan telepon seluler mulai berkembang. PT Telkom yang mengawali adanya sistem *Global System for Mobile* (GSM). Momentum tersebut merupakan cikal bakal perkembangan telepon seluler di Indonesia. Selanjutnya, berkembang operator GSM swasta pertama, yaitu Satelindo kemudian diikuti oleh operator-operator lain.

4. **Jawaban:**

Rehabilitasi pertanian merupakan usaha pemulihan produktivitas sumber daya pertanian kritis yang membahayakan kondisi lingkungan. Rehabilitasi pertanian bertujuan memperbaiki lahan pertanian yang semula tidak produktif menjadi produktif atau mengganti tanaman yang tidak produktif menjadi tanaman lebih produktif.

5. **Jawaban:**

Melalui program Revolusi Hijau, petani tidak diperkenankan menggunakan bibit sendiri. Petani harus menggunakan bibit yang disediakan pemerintah. Bibit ini merupakan hasil rekayasa genetika yang sangat bergantung pada penggunaan pupuk dan pestisida kimia. Penggunaan pupuk dan pestisida menyebabkan penurunan kualitas padi yang dihasilkan. Selain itu, terjadi kepunahan beberapa varietas padi di Indonesia akibat penggunaan bibit dari pemerintah.

Penilaian Akhir Semester 2

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: d**

Pada 1997 krisis ekonomi mulai melanda Indonesia. Krisis ekonomi mengakibatkan kegiatan bisnis mengalami stagnasi, akibatnya perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pekerjanya. Oleh karena itu, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mengalami peningkatan dari 4,68 juta orang pada 1997 menjadi 5,46 juta pada 1998.

2. **Jawaban: c**

Pada masa Orde Baru pemerintah berupaya meningkatkan perekonomian Indonesia melalui pembukaan penanaman modal asing. Dalam perkembangannya, kebijakan tersebut menimbulkan dampak negatif. Berdasarkan data majalah *Eksekutif* yang terbit pada Agustus 1995, 70% perekonomian di Indonesia dikuasai oleh etnik Tionghoa. Data tersebut menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi antara etnik Tionghoa dan masyarakat pribumi.

3. **Jawaban: c**

Kabinet-kabinet di Indonesia yang dibentuk pasca-Orde Baru sebagai berikut. *Pertama*, Kabinet Reformasi Pembangunan dibentuk Presiden B.J. Habibie. *Kedua*, Kabinet Persatuan Nasional dibentuk Presiden Abdurrahman Wahid. *Ketiga*, Kabinet Gotong Royong dibentuk Presiden Megawati Soekarnoputri. *Keempat*, Kabinet Indonesia Bersatu I dan II dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. *Kelima*, Kabinet Kerja dibentuk Presiden Joko Widodo. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh angka 1), 3), dan 5).

4. **Jawaban: c**

Peristiwa penting yang menandai memanasnya kondisi politik di Indonesia menjelang pemilu 1997 adalah peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli).

Peristiwa itu muncul akibat pertikaian internal dalam Partai Demokrasi Perjuangan (PDI). Saat itu kader pendukung Soerjadi menyerang markas PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta yang dikuasai oleh kader yang mendukung Megawati. Kerusuhan tersebut menyebabkan timbulnya korban jiwa dan pembakaran bangunan.

5. **Jawaban: a**

Kegiatan pers pada masa Orde Baru dibatasi dengan Permenpen Nomor 1 Tahun 1994. Melalui peraturan tersebut, pemerintah dapat membatalkan surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP) bagi media yang tidak sejalan dengan sikap pemerintah. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan B.J. Habibie ketentuan pembatalan SIUPP dihapuskan. Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah telah menunjukkan dukungannya pada kemerdekaan pers.

6. **Jawaban: c**

Penegakan hukum pada masa Orde Baru tidak berjalan maksimal akibat adanya rekayasa proses peradilan. Oleh karena itu, Presiden B.J. Habibie memberikan amnesti dan abolisi kepada beberapa tahanan dan narapidana politik korban rekayasa peradilan pada masa Orde Baru. Kebijakan Presiden B.J. Habibie tersebut dilakukan untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia.

7. **Jawaban: e**

Pada awal masa pemerintahannya, Presiden B.J. Habibie dihadapkan pada permasalahan ekonomi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Presiden B.J. Habibie memisahkan Bank Indonesia menjadi lembaga yang independen dengan tujuan memisahkan Bank Indonesia dari kontrol pemerintah.

8. **Jawaban: e**

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, agama Konghucu diakui sebagai salah satu agama yang dianut masyarakat Indonesia.

Presiden Abdurrahman Wahid juga menetapkan perayaan tahun baru Imlek sebagai hari libur nasional. Sikap tersebut menunjukkan Presiden Abdurrahman Wahid menghargai kelompok minoritas di Indonesia.

9. **Jawaban: e**

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid partai-partai Islam membentuk sebuah koalisi yang disebut Koalisi Poros Tengah. Koalisi Poros Tengah terdiri atas PKB, PAN, PBB, PPP, dan Partai Keadilan. Motor utama dalam Koalisi Poros Tengah adalah PAN. Jadi, jawaban yang tepat adalah pilihan e.

10. **Jawaban: d**

Agenda Kabinet Gotong Royong sebagai berikut.

- 1) Menghapus korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- 2) Menyelamatkan rakyat Indonesia dari penderitaan akibat krisis yang berkepanjangan.
- 3) Meneruskan pembangunan politik.
- 4) Mempertahankan supremasi hukum.
- 5) Menjaga pertahanan hak-hak asasi manusia.

Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan pilihan d.

11. **Jawaban: d**

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berusaha mengulang kembali kesuksesan swasembada pangan pada masa pemerintahan Orde Baru. Untuk mencapai swasembada pangan, pemerintah mengeluarkan kebijakan revitalisasi pertanian.

12. **Jawaban: a**

Bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai landasan ideal bagi pelaksanaan politik luar negeri. Sebagai dasar negara, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan pijakan dan pedoman bagi Indonesia dalam menjalin hubungan dengan negara lain.

13. **Jawaban: a**

Indonesia memiliki tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek dalam melakukan kebijakan luar negeri. Tujuan jangka panjang Indonesia yaitu melenyapkan imperialisme serta mencapai perdamaian dunia yang kekal dan abadi. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan pilihan 1) dan 2).

14. **Jawaban: c**

Pada saat terjadi Perang Dingin Indonesia berusaha bersikap netral dan tidak terlibat di dalamnya. Bangsa Indonesia menegaskan tidak akan memihak salah satu blok yang bertikai. Sikap

tersebut merupakan langkah paling tepat dalam menciptakan perdamaian dunia atau paling tidak meredakan ketegangan akibat Perang Dingin.

15. **Jawaban: b**

Perbedaan arah politik luar negeri yang diterapkan setiap kabinet pada masa Demokrasi Liberal sering menimbulkan pertentangan dalam parlemen. Pertentangan tersebut berujung pada jatuhnya kabinet yang sedang berkuasa. Jatuhnya kabinet pada masa itu terjadi karena tidak ada batas yang jelas bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Akibatnya pelaksanaan politik luar negeri Indonesia menjadi kabur.

16. **Jawaban: c**

Pada masa Demokrasi Liberal Presiden Soekarno berusaha agar Indonesia mendapatkan citra positif dari negara-negara Asia dan dunia internasional. Oleh karena itu, dalam forum PBB Indonesia berusaha menjalin hubungan dengan banyak negara dari berbagai penjuru dunia.

17. **Jawaban: b**

Pada masa Orde Lama politik luar negeri Indonesia condong kepada blok Timur. Akan tetapi, pada masa Orde Baru politik luar negeri Indonesia condong ke blok Barat. Kecenderungan tersebut tampak dari hubungan luar negeri antara Indonesia dan Amerika Serikat. Akibat hubungan tersebut, Indonesia menjadi negara dunia ketiga yang cukup disegani dalam pergaulan internasional.

18. **Jawaban: a**

Politik luar negeri yang diterapkan Presiden Soeharto berhasil meningkatkan nilai tawar Indonesia. Keberhasilan tersebut tecermin dari terpilihnya Indonesia sebagai ketua pertemuan APEC dan ketua KTT Non-Blok pada periode 1990-an. Selain itu, Indonesia bergabung dalam organisasi negara-negara pengekspor minyak atau OPEC.

19. **Jawaban: c**

Pada April 1954 lima perdana menteri mengadakan pertemuan di Kolombo, Sri Lanka. Kelima perdana menteri tersebut yaitu Sir John Kotelawala (Sri Lanka), Ali Sastroamidjojo (Indonesia), Jawaharlal Nehru (India), U Nu (Birma), dan Muhammad Ali Jinnah (Pakistan). Pertemuan yang dikenal dengan Konferensi Kolombo tersebut bertujuan membicarakan nasib

negara-negara dunia ketiga, Asia-Afrika. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh angka 1), 4), dan 5).

20. **Jawaban: a**

Orientasi politik luar negeri Indonesia pada awal masa reformasi dipengaruhi oleh kondisi dalam negeri akibat krisis multidimensional dan transisi pemerintahan. Fokus utama politik luar negeri diarahkan pada upaya pemulihan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia dan pemulihan perekonomian nasional.

21. **Jawaban: d**

Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri politik luar negeri Indonesia masih menunjukkan kelemahan. Salah satu bukti lemahnya Indonesia dalam hubungan politik luar negeri adalah lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia pada 2001.

22. **Jawaban: d**

Konflik terkait permasalahan Terusan Suez mendorong PBB membentuk pasukan khusus untuk memelihara perdamaian di kawasan Timur Tengah yang bernama *United Nations Emergency Forces* (UNEF). Tindakan tersebut ditanggapi pemerintah Indonesia dengan mengirim pasukan Garuda I di bawah pimpinan Letnan Kolonel Inf. Hartoyo dan Letnan Kolonel Suadi Suromihardjo.

23. **Jawaban: a**

Untuk memperkuat integrasi dan kerja sama, negara-negara ASEAN sepakat mengembangkan suatu kebijakan baru. Kebijakan tersebut adalah pembentukan komunitas Asia Tenggara yang terbuka, stabil dan sejahtera, saling peduli, serta kemitraan bersama yang dinamis.

24. **Jawaban: d**

Dalam Deklarasi Djuanda disebutkan batas teritorial Indonesia yang sebelumnya 3 mil diperlebar menjadi 12 mil sehingga luas wilayah laut Indonesia menjadi bertambah. Dengan demikian, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan. Dalam Deklarasi Djuanda, laut merupakan pemersatu bangsa Indonesia dan wahana pembangunan nasional.

25. **Jawaban: b**

Konflik Kamboja–Vietnam yang berlarut-larut mendorong Indonesia dan negara ASEAN lainnya untuk memprakarsai upaya mediasi guna menyelesaikan masalah tersebut secara damai

dan adil. Langkah nyata Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik tersebut diwujudkan dengan pertemuan *Jakarta Informal Meeting* (JIM).

26. **Jawaban: d**

Teknologi transportasi yang berkembang di Eropa dibawa ke Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda. Tujuan pengembangan sarana transportasi di Indonesia adalah mempermudah dan mempercepat proses pengawasan terhadap daerah-daerah yang jauh dari pusat kegiatan pemerintah.

27. **Jawaban: e**

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 1967, LIPI memiliki tugas sebagai berikut.

- 1) Membimbing perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.
- 2) Menjamin kebebasan ilmiah selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
- 3) Mempersiapkan pembentukan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.

28. **Jawaban: c**

Penyebaran informasi di Indonesia melalui radio berkembang sejak periode kolonial Belanda. Beberapa stasiun radio yang didirikan pada masa kolonial Belanda, yaitu *Bataviaasche Radio Vereeniging* (BRV) dan *Nederlandesch Indische Radio Omroep* (NIROM) di Jakarta, *Solosche Radio Vereeniging* (SRV) di Solo, *Mataramsche Vereeniging voor Radio Omroep* (MVRO), serta PPRK di Bandung. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh kombinasi **X2)** dan **Y3)**

29. **Jawaban: c**

Pada masa Orde Baru radio dikenal sebagai media penerangan paling efektif. Radio digunakan sebagai sarana menyampaikan informasi, alat komunikasi, dan penerangan, terutama di daerah perdesaan. Radio menjadi sumber informasi paling cepat pada masanya dan dapat menjangkau ke berbagai pelosok negeri.

30. **Jawaban: b**

Telepon seluler dapat menyampaikan informasi dan menghubungkan komunikasi antarpenggunanya. Akan tetapi, telepon seluler juga dapat mengurangi kepedulian sosial. Saat ini orang lebih sibuk bercengkerama dengan telepon selulernya daripada bersosialisasi melalui tatap muka secara langsung.

31. **Jawaban: e**
Dampak positif perkembangan iptek bagi kehidupan manusia sebagai berikut.
1) Menambah wawasan dan pengetahuan.
2) Meningkatkan kesejahteraan.
3) Meningkatkan kualitas pendidikan.
4) Meningkatkan mobilitas manusia.
Jadi, jawaban yang tepat terdapat pada pilihan e.
32. **Jawaban: b**
Salah satu dampak buruk perkembangan teknologi adalah terjadinya permasalahan sosial dalam masyarakat. Kondisi ini tampak dari penyalahgunaan teknologi untuk kegiatan negatif seperti pornografi, tindakan penipuan, dan pencurian data. Jika kondisi ini berlangsung tanpa segera diantisipasi, permasalahan sosial dalam masyarakat akan semakin meningkat.
33. **Jawaban: a**
Peningkatan sarana transportasi modern menyebabkan kondisi lingkungan semakin sesak dengan polusi. Banyaknya polusi menyebabkan komposisi oksigen berkurang sehingga lingkungan menjadi tidak sehat.
34. **Jawaban: c**
Teknologi cakar ayam ditemukan oleh Ir. Sedyatmo. Teknologi ini sangat berguna dalam bidang pembangunan konstruksi bangunan. Teknologi cakar ayam dapat digunakan dalam pendirian konstruksi bangunan atau jalan pada tanah yang bersifat labil seperti rawa dan tanah liat.
35. **Jawaban: a**
Program Revolusi Hijau berusaha mengombinasikan pengetahuan, teknologi, dan kebijakan politik pertanian. Pada dasarnya Revolusi Hijau men-canangkan perubahan sistem pertanian menggunakan teknologi untuk meningkatkan produksi pangan. Di Indonesia Revolusi Hijau dilaksanakan untuk meningkatkan hasil produksi padi.

B. Uraian

1. **Jawaban:**
Melalui pengaruh globalisasi, kecemasan masyarakat akibat krisis multidimensional terefleksikan dalam aksi-aksi unjuk rasa untuk menuntut adanya reformasi. Gerakan reformasi bertujuan menuntut perubahan politik dan ekonomi serta perubahan kepemimpinan nasional.

2. **Jawaban:**
Presiden B.J. Habibie melakukan program reformasi ekonomi untuk mengatasi krisis yang terjadi di Indonesia. Program tersebut berisi langkah-langkah berikut.
a. Melakukan reformasi perbankan dalam rangka program pemulihan ekonomi.
b. Menetapkan undang-undang antimonopoli sebagai langkah ke arah penegakan lingkungan bisnis yang lebih transparan.
c. Melibatkan pedagang menengah, kecil, dan koperasi guna mencegah monopoli.
3. **Jawaban:**
Menurut Mohammad Hatta, kelima sila dalam Pancasila berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan kebangsaan yang ideal dan mencakup seluruh sendi kehidupan manusia. Pancasila sebagai falsafah negara mengikat seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila merupakan salah satu faktor objektif yang memengaruhi politik luar negeri Indonesia.
4. **Jawaban:**
Tujuan politik luar negeri Indonesia mengacu pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu *"Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial"*. Berdasarkan tujuan nasional tersebut, Indonesia memiliki urgensi untuk turut memperjuangkan kebebasan kehidupan dunia dari belenggu kolonialisme.
5. **Jawaban:**
Landasan operasional politik luar negeri Indonesia senantiasa berubah sesuai kepentingan nasional. Perubahan ini disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri dan perubahan situasi internasional. Setiap periode pemerintahan memiliki variasi perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri yang berbeda. Oleh karena itu, Indonesia mengalami dinamika dalam menjalankan politik luar negeri.
6. **Jawaban:**
Nefo merupakan negara-negara berkembang dan negara sosialis yang dianggap progresif, termasuk negara-negara yang baru merdeka atau sedang memperjuangkan kemerdekaannya. Adapun

negara kolonialis, imperialis, dan penghambat kemajuan bangsa-bangsa yang sedang berkembang dikelompokkan sebagai Oldefo.

7. **Jawaban:**

Arah politik luar negeri bangsa Indonesia masa Orde Lama difokuskan pada upaya menentang segala bentuk penjajahan di dunia. Politik luar negeri pada masa itu menunjukkan sikap anti-imperialisme dan antikolonialisme yang sangat tegas dan cenderung konfrontatif. Sementara itu, pada masa Orde Baru hubungan luar negeri diarahkan sebagai sarana mewujudkan stabilitas ekonomi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah Orde Baru berupaya meningkatkan hubungan baik dengan negara-negara tetangga.

8. **Jawaban:**

Dengan ditandatanganinya Piagam ASEAN, anggota ASEAN menyetujui perubahan ASEAN dari organisasi longgar (*loose organization*) menjadi organisasi yang berdasarkan hukum (*rules-based organization*). Piagam tersebut mengubah ASEAN menjadi organisasi internasional yang memiliki aturan jelas serta struktur organisasi efektif dan efisien. Piagam ASEAN juga berguna dalam memberikan kerangka kerja hukum dan kelembagaan ASEAN.

9. **Jawaban:**

Industri penerbangan di Indonesia pertama kali didirikan oleh Nurtanio dan dinamakan Lembaga Persiapan Industri Penerbangan (LAPIP). Pada 21 Maret Nurtanio meninggal, untuk mengenang jasanya nama Nurtanio diabadikan dalam lembaga pengganti LAPIP yaitu Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio (LIPNUR). LIPNUR selanjutnya berubah menjadi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN). Dalam perkembangannya IPTN berubah nama menjadi PT Dirgantara Indonesia atau *Indonesian Aerospace*.

10. **Jawaban:**

Intensifikasi pertanian merupakan program utama pemerintah dalam mewujudkan Revolusi Hijau. Penerapan program tersebut tidak terlepas dari luas lahan pertanian di Indonesia yang semakin terbatas. Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi. Oleh karena itu, intensifikasi pertanian dianggap paling cocok untuk meningkatkan produksi pertanian.

Remedial Semester 2

A. Pilihlah jawaban yang tepat!

1. Krisis ekonomi di Indonesia sudah mulai terasa sejak 1997 ditandai dengan . . .
 - a. praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pemerintahan semakin meningkat
 - b. perusahaan asing mendapat perlakuan istimewa dari pemerintah
 - c. utang luar negeri dapat dibayar dengan mudah oleh pemerintah
 - d. nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat semakin melemah
 - e. demonstrasi yang dimotori mahasiswa semakin meningkat
2. Krisis ekonomi di Indonesia pada 1997 didahului terjadinya krisis . . .
 - a. moneter
 - b. kekuasaan
 - c. kepercayaan
 - d. pemerintahan
 - e. multidimensional
3. Salah satu penyebab runtuhnya pemerintahan Orde Baru adalah terjadinya krisis hukum. Krisis hukum di Indonesia terjadi karena . . .
 - a. kekuasaan kehakiman berada di bawah kekuasaan
 - b. kedudukan pejabat kehakiman hanya setingkat menteri
 - c. kekuasaan kehakiman sering diintervensi oleh eksekutif
 - d. pengangkatan pejabat kehakiman tidak sesuai pendidikannya
 - e. kekuasaan kehakiman masih bercampur dengan kekuasaan
4. Kerusuhan pada 27 Juli 1996 merupakan salah satu bentuk krisis politik di Indonesia menjelang pemilu 1997. Peristiwa tersebut terjadi karena adanya . . .
 - a. demonstrasi di Semanggi
 - b. kerusuhan di gedung DPR/MPR
 - c. dualisme dalam Partai Demokrasi Indonesia
 - d. perselisihan dalam kabinet
 - e. sikap sentimen terhadap etnik tertentu
5. Keputusan dalam sidang umum MPR pada 1–11 Maret 1997 memicu aksi protes di berbagai daerah. Keputusan yang dimaksud adalah . . .
 - a. pemilihan presiden secara langsung
 - b. pelaksanaan pemilu 1999 untuk memilih presiden
 - c. penetapan Soeharto sebagai presiden Indonesia
 - d. pembacaan surat pengunduran diri Presiden Soeharto
 - e. pelantikan Presiden B.J. Habibie untuk menggantikan Soeharto
6. Agenda reformasi yang disuarakan kaum reformis semakin gencar pada akhir 1998. Langkah awal untuk mewujudkan agenda tersebut adalah . . .
 - a. melaksanakan pemilu
 - b. membentuk partai politik
 - c. mengganti Undang-Undang Dasar 1945
 - d. memperbaiki sistem perekonomian negara
 - e. mengganti pemimpin pemerintahan
7. Pembebasan tokoh-tokoh yang mengkritik pemerintahan Orde Baru merupakan salah satu tuntutan dalam agenda reformasi. Agenda reformasi yang dimaksud adalah . . .
 - a. pemberantasan KKN
 - b. amandemen UUD 1945
 - c. penegakan supremasi hukum
 - d. penghapusan dwifungsi ABRI
 - e. suksesi kepemimpinan nasional
8. Pada pemilu 1999 Presiden B.J. Habibie memutuskan tidak mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia periode berikutnya. Kondisi tersebut disebabkan . . .

- a. keinginan B.J. Habibie menetap di Jerman
 - b. mendapat penolakan dari partai oposisi
 - c. laporan pertanggungjawaban B.J. Habibie ditolak MPR
 - d. B.J. Habibie tidak mendapat dukungan dari partai politik
 - e. B.J. Habibie ingin membangun industri pesawat terbang
9. Presiden Abdurrahman Wahid merupakan calon presiden alternatif setelah Megawati Soekarnoputri. Pencalonan Abdurrahman Wahid didukung oleh
- a. koalisi partai oposisi
 - b. koalisi Poros Tengah
 - c. Fraksi Golkar
 - d. Partai Persatuan Pembangunan
 - e. Fraksi Amanat Nasional
10. Presiden Abdurrahman Wahid berusaha mewujudkan demokrasi di Indonesia. Upaya Presiden Abdurrahman Wahid untuk mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan cara
- a. memberikan kebebasan berkumpul
 - b. membubarkan Departemen Penerangan
 - c. mengesahkan undang-undang antimonopoli
 - d. memberi kebebasan untuk membentuk partai politik
 - e. mengesahkan undang-undang perlindungan hak asasi manusia
11. Perhatikan pernyataan berikut!
- 1) Menegakkan supremasi hukum.
 - 2) Mewujudkan *good governance*.
 - 3) Mendirikan KPK dan pengadilan tindak pidana korupsi.
 - 4) Mengubah cara berpikir dalam *public service*.
 - 5) Menjamin dan menjaga hak-hak asasi manusia.
 - 6) Kultur budaya kerja yang disiplin dan tanggung jawab.

Kebijakan yang diterapkan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri ditunjukkan oleh angka

- a. 1), 2), dan 3)
- b. 1), 3), dan 4)
- c. 1), 3), dan 5)
- d. 2), 3), dan 6)
- e. 3), 4), dan 6)

12. Agenda bidang politik pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono–Jusuf Kalla adalah mewujudkan Indonesia yang aman dan damai. Kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah

a.	– mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua – memberantas pembalakan hutan
b.	– memberantas terorisme – mengakui agama Konghucu
c.	– mendirikan pengadilan tindak pidana korupsi – menetapkan hari Imlek sebagai libur nasional
d.	– melakukan perjanjian Helsinki – memberantas pembalakan liar
e.	– memberantas terorisme – mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua

13. Kondisi perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono–Jusuf Kalla lebih stabil. Kondisi tersebut tecermin dari keberhasilan Indonesia
- a. melunasi utang IMF
 - b. menekan kemiskinan
 - c. mengurangi jumlah pengangguran
 - d. mencapai swasembada kedelai
 - e. mengekspor minyak ke berbagai negara
14. Pada 17 Oktober 2014 Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM. Pengumuman tersebut dianggap tidak tepat dan memicu aksi demonstrasi di berbagai daerah karena
- a. harga minyak dunia mengalami penurunan
 - b. harga BBM tidak sebanding dengan ketersediaan jumlah BBM
 - c. mayoritas masyarakat Indonesia tidak mampu membeli BBM
 - d. aksi demonstrasi tersebut didorong oleh partai oposisi
 - e. kenaikan BBM menyebabkan perusahaan industri mengalami kebangkrutan
15. Perhatikan kutipan berikut!

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu, ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."

Berdasarkan kutipan di atas, landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia berarti

- a. menentang segala bentuk imperialisme dan kolonialisme
- b. memperjuangkan hak-hak negara dan perdamaian dunia
- c. memperjuangkan negara-negara yang ingin merdeka
- d. membagi dunia menjadi tiga poros kekuatan politik
- e. menjadi pelopor perdamaian bagi negara lain

16. Perhatikan pernyataan berikut!

- 1) Menunjukkan sifat bebas aktif dan melaksanakan ketertiban dunia.
- 2) Menjaga kepentingan dunia dengan mengikuti program Non-Blok.
- 3) Menjunjung tinggi sikap antiimperialisme dan antikolonialisme.
- 4) Mengabdikan pada kepentingan nasional.
- 5) Melaksanakan diplomasi untuk memulihkan perekonomian kawasan.

Sifat politik luar negeri Indonesia sesuai Ketetapan MPRS Nomor XII/MPRS/1966 ditunjukkan oleh angka

- a. 1), 2), dan 3)
- b. 1), 2), dan 4)
- c. 1), 3), dan 4)
- d. 2), 3), dan 4)
- e. 3), 4), dan 5)

17. Politik luar negeri Indonesia memiliki landasan operasional. Landasan operasional politik luar negeri pada masa Demokrasi Terpimpin ditunjukkan oleh pilihan

a.	– Maklumat Politik Pemerintah tanggal 1 November 1945 – Pasal 11 dan pasal 13 ayat (1) dan (2) UUD 1945
b.	– Maklumat Politik Pemerintah tanggal 1 November 1945 – Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1966
c.	– Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1966 – Pasal 11 dan pasal 13 ayat (1) dan (2) UUD 1945
d.	– Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1959 – Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1966
e.	– Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 – Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1966

18. Pelaksanaan Manifesto Politik pada politik luar negeri Indonesia ditegaskan kembali lewat pidato *Djalannja Revolusi Kita* (Djarek). Isi pidato tersebut adalah

- a. membentuk Gerakan Non-Blok untuk menghindari dari keberpihakan negara adikuasa
- b. melanjutkan perjuangan antiimperialisme dan mempertahankan kepribadian Indonesia
- c. menyatukan negara-negara berkembang untuk bekerja sama melawan imperialisme
- d. melenyapkan imperialisme dan kolonialisme yang masih mengakar kuat di Indonesia
- e. mencampuri urusan kemerdekaan dan politik luar negeri negara lain

19. Perjanjian pemberian bantuan yang disepakati oleh Indonesia dan Amerika Serikat saat Kabinet Sukiman menimbulkan polemik. Tindakan tersebut menyebabkan

- a. terjadinya peristiwa Malari
- b. jatuhnya Kabinet Sukiman
- c. munculnya protes dari parlemen
- d. munculnya mosi tidak percaya kepada DPR
- e. terjadinya konflik internal dalam pemerintahan

20. Konsep *New Emerging Forces* (Nefo) dan *Old Established Forces* (Oldefo) dikemukakan oleh Presiden Soekarno. Pernyataan yang sesuai dengan konsep Nefo adalah

- a. Nefo merupakan pesaing dari Oldefo
- b. Nefo merupakan negara-negara yang sedang berkembang
- c. pembentukan Nefo bertujuan untuk membantu Oldefo
- d. negara-negara Nefo ingin menggantikan peran negara-negara adikuasa
- e. Nefo merupakan negara yang bekerja sama dengan negara-negara maju

21. Pada masa Orde Baru Indonesia berusaha menyelesaikan konflik dengan Malaysia. Fakta yang sesuai dengan penyelesaian konflik tersebut adalah

- a. Indonesia mengakui kedaulatan Malaysia secara utuh
- b. pemerintah Indonesia melakukan program kerja sama politik dengan Malaysia
- c. Indonesia dan Malaysia menjalin kerja sama ekonomi
- d. Malaysia mengakui kekuatan ekonomi bangsa Indonesia
- e. Indonesia dan Malaysia bergabung dalam negara persekutuan Inggris

22. Politik luar negeri Indonesia pada masa reformasi berbeda dari masa sebelumnya. Tujuan utama politik luar negeri pada masa tersebut adalah
- membangun kepercayaan negara-negara di dunia
 - membangun hubungan diplomasi antar-anggota ASEAN
 - mengikuti pertemuan-pertemuan yang diadakan dewan PBB
 - mengikuti pertemuan-pertemuan yang diadakan di kawasan Asia
 - mencari bantuan dana untuk memulihkan perekonomian negara
23. Pada 1955 Ali Sastroamidjojo ikut terlibat dalam konferensi di Kolombo, Sri Lanka. Peran Ali Sastroamidjojo dalam konferensi tersebut adalah
- menolak hasil konferensi yang diadakan oleh negara-negara Barat
 - memprakarsai pelaksanaan Konferensi Asia Afrika bersama empat negara lain
 - memimpin jalannya pertemuan negara-negara nonblok dengan doktrin Barat
 - melindungi kepentingan negara-negara blok Barat dan blok Timur
 - mendukung negara-negara adikuasa untuk bergabung dengan Gerakan Non-Blok
24. Perhatikan tabel berikut!

No.	A	B
1)	Misi Garuda II	Konflik Kongo
2)	Misi Garuda IV	X

Konflik yang ditunjukkan oleh huruf "X" adalah

- konflik Timur Tengah
 - konflik Vietnam
 - konflik Bosnia
 - konflik Filipina
 - konflik Kamboja
25. Pada 13 Desember 1957 pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda. Tujuan Deklarasi Djuanda adalah
- memperjuangkan batas wilayah kedaulatan NKRI
 - melindungi bangsa Indonesia dari konflik dengan negara lain

- memperkuat peraturan batas wilayah yang sebelumnya diatur oleh PBB
- menolak peraturan internasional mengenai batas teritorial laut
- memperjuangkan peraturan baru mengenai batas wilayah NKRI

26. Tidak semua negara nonblok merupakan pemrakarsa Gerakan Non-Blok. Beberapa negara yang memprakarsai Gerakan Non-Blok ditunjukkan oleh pilihan

a.	– Indonesia – Ghana
b.	– Indonesia – Thailand
c.	– Mesir – Thailand
d.	– Yugoslavia – Arab
e.	– Arab – Indonesia

27. ASEAN merupakan organisasi regional di wilayah Asia Tenggara. Pendirian ASEAN dilatarbelakangi oleh
- adanya perasaan senasib karena imperialisme dan kolonialisme
 - meningkatnya kerja sama antara negara-negara Asia Tenggara
 - munculnya berbagai konflik ideologi di negara-negara Asia Tenggara
 - tatanan politik luar negeri negara-negara di Asia Tenggara sudah berubah
 - adanya kebijakan internasional yang dibuat negara-negara Asia Tenggara
28. Pada 24 April 1778 Belanda mendirikan *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*. Tujuan Belanda mendirikan organisasi tersebut adalah
- mengkoordinasi lembaga-lembaga ilmiah yang ada di Hindia Belanda
 - mencari kebenaran ilmiah dan ilmu pengetahuan di Hindia Belanda
 - mengajak masyarakat pribumi ikut serta dalam penelitian ilmiah
 - membentuk perkumpulan ilmiah dan ilmu pengetahuan
 - menyiapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern

29. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dibentuk sesuai Ketetapan MPRS Nomor 18/B/1967. Salah satu tugas LIPI adalah
- menghubungkan para peneliti di Indonesia untuk saling bertukar ide
 - mengembangkan iptek di Indonesia agar dapat dimanfaatkan umat manusia
 - mengembangkan iptek yang sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia
 - mendorong peneliti Indonesia untuk mendapatkan bahan penelitian
 - mempermudah peneliti ilmiah dalam menyampaikan hasil penelitiannya
30. Pada masa pendudukan Jepang radio digunakan sebagai alat propaganda politik. Salah satu fakta yang mendukung pernyataan tersebut adalah
- siaran-siaran kedaerahan seperti lagu-lagu berbahasa Jawa dan wayang kulit dilarang oleh Jepang
 - program politik Jepang yang disiarkan secara berulang-ulang
 - kegiatan Jepang sering menggunakan siaran radio *Hosokyoku*
 - siaran lagu-lagu Jepang dan kebudayaan Jepang diputar setiap hari
 - agenda politik Jepang di Indonesia yang disiarkan setiap hari
31. Adegan kekerasan dan tidak mendidik pada siaran televisi Indonesia perlu diatur agar tidak berdampak buruk bagi masyarakat. Upaya pemerintah Indonesia dalam mengatur siaran televisi adalah
- membuat undang-undang penghentian siaran pada stasiun televisi yang bermasalah
 - membentuk Komisi Penyiaran Indonesia untuk mengatur penyiaran di televisi
 - menyajikan siaran-siaran pendamping sebagai sarana edukasi masyarakat
 - mendirikan Persatuan Artis Film Indonesia yang mengatur tayangan film
 - menghapus aktivitas penyiaran yang meresahkan masyarakat
32. Pada Kabinet Pembangunan II pemerintah meluncurkan Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) Palapa. Tujuan peluncuran SKSD Palapa adalah
- membentuk sistem informasi yang mendukung pemerintah
 - menghubungkan komunikasi Indonesia dengan negara-negara Barat
 - memperbaiki sistem jaringan radio dan televisi
 - memperlancar komunikasi Indonesia dengan negara-negara lain
 - mempermudah masyarakat Indonesia untuk mendapatkan informasi dari luar negeri
33. Pada 1862 Belanda membangun jalur kereta api Semarang–*Vorstenlanden*. Tujuan Belanda membangun jalur kereta api tersebut adalah
- mengembangkan teknologi transportasi darat di Hindia Belanda
 - menghubungkan daerah penghasil tenaga kerja dengan pusat pemerintahan
 - memperlancar distribusi hasil perkebunan dan pertanian antardaerah
 - menghubungkan daerah penghasil pertanian dengan pusat pemerintahan
 - memudahkan para pejabat Hindia Belanda untuk mengunjungi daerah jajahannya
34. Usaha pemerintah Indonesia meningkatkan produksi pangan melalui program Revolusi Hijau dilakukan dengan cara
- | | |
|----|---|
| a. | – melibatkan perusahaan swasta dalam mengembangkan perkebunan
– mengurangi penggunaan pestisida sintesis |
| b. | – merehabilitasi perkebunan dan pabrik yang ada
– meningkatkan peran petani dalam proses distribusi |
| c. | – mengusahakan metode diversifikasi pertanian
– menggalakkan sistem pancausaha tani dan saptausaha tani |
| d. | – mengurangi penggunaan tenaga kerja manusia
– memaksimalkan penggunaan pupuk organik |
| e. | – mengurangi penggunaan lahan pertanian
– meningkatkan penggunaan pestisida sintesis |
35. Perhatikan keterangan berikut!
- Seorang petani selain bertani juga beternak ayam.
 - Seorang petani menanam padi dan jagung pada sebuah lahan.
- Keterangan di atas terkait dengan salah satu program dalam Revolusi Hijau, yaitu
- rehabilitasi pertanian
 - mekanisasi pertanian
 - intensifikasi pertanian
 - diversifikasi pertanian
 - ekstensifikasi pertanian

36. Intensifikasi pertanian merupakan metode unggulan dalam program Revolusi Hijau. Metode ini lebih cocok diterapkan di Pulau Jawa dan Bali karena
 - a. wilayah pertaniannya sempit
 - b. mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani
 - c. merupakan pusat pertanian di Indonesia
 - d. pusat arus perdagangan Indonesia
 - e. tingkat pertumbuhan penduduknya rendah
37. Salah satu cara meningkatkan hasil pertanian adalah dengan menerapkan program ekstensifikasi pertanian. Metode ekstensifikasi pertanian dilakukan dengan
 - a. membuka lahan pertanian baru
 - b. memaksimalkan penggunaan lahan
 - c. meningkatkan dosis penggunaan pupuk
 - d. memaksimalkan penggunaan mesin produksi
 - e. membuka lapangan pekerjaan di bidang pertanian
38. Sektor pertanian menjadi prioritas dalam setiap program pembangunan nasional karena
 - a. membantu perbaikan ekonomi saat terjadi krisis
 - b. mampu menampung pengangguran di Indonesia
 - c. menjadi mata pencaharian utama bagi masyarakat Indonesia
 - d. memiliki kemampuan sebagai stabilisator harga pasar
 - e. memiliki peran strategis terhadap pendapatan nasional
39. Salah satu dampak positif perkembangan teknologi adalah pemanfaatan teknologi modern guna mengembangkan industri rumah tangga. Dari fakta tersebut dapat dimaknai bahwa telah terjadi
 - a. peningkatan tenaga kerja
 - b. proses industrialisasi usaha
 - c. pemanfaatan peluang usaha
 - d. proses produksi suatu usaha
 - e. peningkatan pendapatan usaha
40. Salah satu dampak negatif perkembangan iptek adalah menyebabkan permasalahan sosial yaitu
 - a. meningkatnya solidaritas kelompok
 - b. meningkatnya jumlah pengangguran
 - c. menyebabkan kerusakan lingkungan
 - d. menurunnya peluang usaha masyarakat
 - e. memperlebar kesenjangan sosial masyarakat

B. Kerjakan soal-soal berikut!

1. Agenda reformasi yang disuarakan mahasiswa dan kaum reformis menyangkut berbagai bidang di antaranya bidang ekonomi dan politik. Uraikan pelaksanaan agenda reformasi pada kedua bidang tersebut!
2. Pada 1999 Indonesia menyelenggarakan pemilu. Deskripsikan tujuan penyelenggaraan pemilu tersebut!
3. Presiden Joko Widodo berhasil mengambil alih beberapa saham perusahaan asing di Indonesia. Uraikan salah satu keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo tersebut!
4. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 dikeluarkan pemerintah pada masa reformasi sebagai landasan operasional politik luar negeri Indonesia. Uraikan tujuan pemerintah mengeluarkan ketetapan tersebut!
5. Pada era pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berusaha memulihkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Jelaskan upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan hal tersebut!
6. Pertemuan *Jakarta Informal Meeting* (JIM) I diadakan pada 25–28 Juli 1988. Uraikan tujuan bangsa Indonesia mengadakan pertemuan tersebut!
7. Pada periode reformasi di Indonesia terjadi perubahan landasan operasional politik luar negeri. Mengapa demikian? Tuliskan penjelasan Anda secara singkat!
8. Radio di Indonesia dimanfaatkan untuk sarana penyampaian berita-berita pemerintah. Jelaskan perkembangan siaran radio di Indonesia pada awal kemerdekaan!
9. Pelaksanaan Revolusi Hijau mempunyai dampak positif dan negatif. Uraikan dampak positif pelaksanaan program Revolusi Hijau pada sektor pertanian pangan!
10. Salah satu dampak negatif perkembangan iptek adalah dapat menyebabkan permasalahan sosial. Uraikan permasalahan sosial tersebut!

Kunci Jawaban dan Pembahasan Remedial Semester 2

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: d**

Krisis ekonomi Indonesia merupakan dampak dari penurunan nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada awal Juli 1997 nilai tukar rupiah terhadap dolar Rp2.500,00/US\$ dan terus mengalami kemerosotan hingga 9%. Bahkan, pada Januari 1998 nilai tukar rupiah mencapai Rp17.000,00/US\$.

2. **Jawaban: a**

Krisis ekonomi di Indonesia pada 1997 merupakan efek domino dari krisis moneter di Thailand akibat menurunnya nilai tukar mata uang bath terhadap dolar Amerika Serikat. Krisis moneter di Thailand berdampak pada negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Timur lainnya, salah satunya Indonesia.

3. **Jawaban: c**

Pada masa Orde Baru kekuasaan kehakiman berada di bawah kekuasaan eksekutif. Hakim sering dijadikan sebagai alat pembenaran atas tindakan dan kebijakan pemerintah. Akibatnya, banyak rekayasa dalam proses peradilan di Indonesia.

4. **Jawaban: c**

Kondisi politik di Indonesia mulai memanas menjelang pemilu 1997 yang ditandai terjadinya kerusuhan pada 27 Juli 1996. Peristiwa tersebut muncul akibat terjadinya pertikaian internal di dalam Partai Demokrasi Perjuangan (PDI). Kerusuhan tersebut menyebabkan timbulnya korban jiwa dan pembakaran bangunan kantor PDI.

5. **Jawaban: c**

Pada pemilu 1997 Golkar kembali memperoleh kemenangan. Pelaksanaan pemilu 1997 diikuti dengan sidang umum MPR pada 1–11 Maret 1998 yang memilih secara aklamasi Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Pelantikan Soeharto sebagai presiden untuk ketujuh kalinya mendapat penolakan dari mahasiswa dan hampir sebagian besar masyarakat Indonesia. Akibatnya, terjadi protes dan demonstrasi di berbagai daerah menuntut pergantian kepemimpinan.

6. **Jawaban: e**

Agenda utama reformasi yang disuarakan mahasiswa dan kaum reformis adalah menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Mahasiswa beranggapan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin baru yang dapat mengatasi krisis ekonomi, hukum, dan politik di Indonesia. Dengan demikian, langkah awal untuk mewujudkan reformasi adalah pergantian pemerintahan.

7. **Jawaban: c**

Hukum pada masa Orde Baru tidak berjalan sebagaimana mestinya dengan adanya rekayasa dalam proses peradilan. Oleh karena itu, Presiden B.J. Habibie memberikan amnesti dan abolisi kepada beberapa tahanan dan narapidana politik korban rekayasa peradilan pada masa Orde Baru. Kebijakan Presiden B.J. Habibie tersebut berkaitan dengan salah satu agenda reformasi, yakni penegakan supremasi hukum.

8. **Jawaban: c**

Sebagian besar anggota MPR hasil pemilu 1999 menolak pidato pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie. Setelah penolakan itu, Presiden B.J. Habibie membatalkan pencalonannya sebagai kandidat presiden.

9. **Jawaban: b**

Koalisi Poros Tengah merupakan koalisi partai politik yang mendukung pencalonan Presiden Abdurrahman Wahid. Koalisi Poros Tengah berhasil mengalahkan pengaruh PDI dalam parlemen yang merupakan pemenang umum dalam pemilu 1999.

10. **Jawaban: b**

Dalam upaya mewujudkan demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia, Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan Departemen Penerangan. Langkah ini dilakukan karena Departemen Penerangan dianggap menghalangi kebebasan pers pada masanya.

11. **Jawaban: c**

Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan kebijakan-kebijakan dengan tujuan mencapai kesejahteraan rakyat yang tertuang dalam agenda Kabinet Gotong Royong. Agenda Kabinet Gotong Royong sebagai berikut.

- 1) Membuktikan sikap tegas untuk menghapus KKN.
- 2) Menyusun langkah-langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis.
- 3) Menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.
- 4) Mempertahankan supremasi hukum.
- 5) Menjaga hak-hak asasi manusia.
- 6) Mencegah praktik korupsi dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor)

Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan angka 1), 3), dan 5).

12. **Jawaban: d**

Agenda bidang politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yaitu berusaha mewujudkan Indonesia yang aman dan damai. Kebijakan-kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mewujudkan Indonesia yang aman dan damai sebagai berikut. *Pertama*, melakukan perjanjian Helsinki dengan Gerakan Aceh Merdeka untuk mengatasi konflik di Aceh. *Kedua*, memberantas dan melakukan penanganan aktivitas *illegal logging* di Indonesia. *Ketiga*, berpartisipasi aktif dalam memberantas terorisme. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan pilihan **d**.

13. **Jawaban: a**

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono–Jusuf Kalla menjadikan sektor ekonomi sebagai agenda utama dengan tujuan mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Dengan berbagai upaya perbaikan dalam bidang ekonomi, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono–Jusuf Kalla berhasil menjadikan perekonomian Indonesia lebih stabil. Kondisi tersebut tecermin dari keberhasilan Indonesia melunasi utang IMF.

14. **Jawaban: a**

Pada awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo menetapkan kebijakan kenaikan harga BBM yang menyebabkan terjadinya aksi demonstrasi di berbagai daerah. Kebijakan Presiden Joko Widodo tersebut dianggap tidak tepat karena pada saat itu harga minyak dunia mengalami penurunan.

15. **Jawaban: a**

Kutipan pada soal merupakan alinea pertama pada Pembukaan UUD 1945. Dari alinea tersebut, dapat dipahami bahwa Indonesia secara aktif memperjuangkan kebebasan dengan berasaskan kemanusiaan dan keadilan. Selain itu, Indonesia fokus dalam menentang segala bentuk imperialisme dan kolonialisme. Untuk menghapus bentuk penjajahan tersebut ditempuh dengan mencari jalan keadilan.

16. **Jawaban: c**

Ketetapan MPRS Nomor XII/MPRS/1966 dikeluarkan pada 5 Juli 1966. Isi ketetapan tersebut menjelaskan sifat politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri Indonesia harus dijalankan secara bebas dan aktif. Selain itu, tujuan politik luar negeri Indonesia adalah menghapus imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Selanjutnya, politik luar negeri harus mengikuti kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat agar berjalan lancar. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh angka 1), 3), dan 4).

17. **Jawaban : a**

Landasan operasional politik luar negeri pada masa Demokrasi Terpimpin selalu berubah sesuai dengan kondisi politik nasional saat itu. Beberapa landasan operasional politik luar negeri masa Demokrasi Terpimpin adalah Pembukaan UUD 1945; pasal 11 dan pasal 13 ayat (1) dan (2) UUD

1945; serta amanat presiden berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" yang dibacakan pada 17 Agustus 1959 atau lebih dikenal dengan "Manifesto Politik Republik Indonesia." Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh pilihan **a**.

18. **Jawaban: a**

Pelaksanaan Manifesto Politik (Manipol) di bidang politik luar negeri kembali ditekankan oleh Presiden Soekarno. Menurut Presiden Soekarno, Indonesia harus berusaha menghindari keberpihakan pada dua blok yang bersengketa dalam Perang Dingin dengan memprakarsai pembentukan Gerakan Non-Blok (GNB).

19. **Jawaban: b**

Mutual Security Act (MSA) merupakan perjanjian mengenai bantuan senjata dan ekonomi Amerika Serikat kepada Indonesia. Perjanjian ini menyebabkan jatuhnya Kabinet Sukiman. Persetujuan ini menimbulkan penafsiran bahwa Indonesia telah menjadi anggota blok Barat. Perjanjian ini bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut bangsa Indonesia. Kesepakatan tersebut menyebabkan Ahmad Soebardjo mengundurkan diri dari jabatan menteri luar negeri.

20. **Jawaban: b**

Pada 1961 Konsep Nefo dan Oldefo ditawarkan Presiden Soekarno pada Konferensi Non-Blok I di Beograd. Nefo merupakan blok negara-negara baru merdeka dan negara berkembang yang berusaha memperjuangkan kedaulatannya. Adapun blok Oldefo adalah negara-negara yang menghambat kemajuan bangsa-bangsa yang sedang berkembang.

21. **Jawaban: a**

Pada 11 Agustus 1966 pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian dengan Malaysia. Isi perjanjian tersebut adalah Indonesia mengakui kedaulatan Malaysia. Normalisasi hubungan tersebut dijalankan dengan baik hingga menghasilkan kerja sama antara Indonesia dan Malaysia, misalnya dengan pendirian ASEAN.

22. **Jawaban: a**

Pandangan politik luar negeri Indonesia pada masa reformasi dipengaruhi oleh kondisi dalam negeri akibat krisis ekonomi dan krisis nasional yang terjadi di Indonesia. Fokus utama politik luar

negeri diarahkan pada upaya pemulihan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia dan pemulihan perekonomian nasional.

23. **Jawaban: b**

Pada April 1954 Ali Sastroamidjojo beserta empat perdana menteri mengadakan pertemuan di Kolombo, Sri Lanka. Perdana menteri tersebut berkumpul untuk menyampaikan gagasannya untuk menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika (KAA). Perdana menteri yang turut memprakarsai pelaksanaan KAA adalah Sir John Kotelawala (Sri Lanka), Ali Sastroamidjojo (Indonesia), Jawaharlal Nehru (India), U Nu (Birma), dan Muhammad Ali Jinnah (Pakistan). KAA dilaksanakan pada 18–24 April 1955 di Bandung.

24. **Jawaban: b**

Pada 1973–1974 pemerintah Indonesia mengirimkan Misi Garuda IV yang dipimpin oleh Brigjen Wiyogo Atmodarminto. Pasukan Misi Garuda bertanggung jawab atas penyelesaian konflik yang terjadi di Vietnam. Adapun misi Garuda II di Kongo dipimpin oleh Letkol Inf. Solichin.

25. **Jawaban: a**

Deklarasi Djuanda dikeluarkan pada pemerintahan Kabinet Djuanda Kartawidjaja. Deklarasi Djuanda merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah Indonesia untuk mempertegas batas wilayah kedaulatan. Batas wilayah yang dicapai harus menjadi suatu kesatuan utuh dilihat dari berbagai aspek seperti politik, sosial, budaya, dan keamanan.

26. **Jawaban: a**

Beberapa negara pemrakarsa Gerakan Non-Blok antara lain Indonesia yang diwakili oleh Presiden Soekarno, Yugoslavia yang diwakili oleh Presiden Joseph Broz Tito, Mesir yang diwakili oleh Presiden Gamal Abdul Nasser, Ghana yang diwakili oleh Presiden Kwame Nkrumah, dan India yang diwakili oleh Perdana Menteri Jawaharlal Nehru. Jadi, jawaban yang paling tepat terdapat pada pilihan **a**.

27. **Jawaban: a**

ASEAN terbentuk karena adanya ikatan antara negara-negara di Asia Tenggara. Selain itu, perasaan senasib akibat penjajahan bangsa asing

semakin memperkuat solidaritas negara-negara se-Asia Tenggara. Dalam perkembangannya timbul inisiatif untuk membentuk organisasi kerja sama antarnegara di kawasan Asia Tenggara.

28. **Jawaban: d**

Belanda mendirikan *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* pada 24 April 1778 untuk membentuk perkumpulan ilmiah dan ilmu pengetahuan di Batavia. Langkah ini merupakan upaya mengembangkan iptek yang sebelumnya sudah dikembangkan di Belanda. Pendirian organisasi tersebut sebagai respons dari revolusi intelektual yang mulai berkembang pada akhir abad XVIII.

29. **Jawaban: b**

LIPI memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan yaitu mengarahkan perkembangan iptek yang ada di Indonesia agar dapat dimanfaatkan masyarakat Indonesia. Selain itu, LIPI mencari kebenaran ilmiah yang sesuai dengan landasan konstitusi Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945.

30. **Jawaban: b**

Pada masa pendudukan Jepang, pemerintah Jepang melarang program-program radio yang sebelumnya disiarkan pada masa kolonial Belanda. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, pemerintah Jepang melaksanakan siaran program politik secara terus-menerus. Program politik Jepang yang disiarkan bertema "*Hakko Ichiu*" atau Kemakmuran Bersama.

31. **Jawaban: b**

Tayangan kekerasan, pornografi, dan tidak mendidik dalam televisi sangat meresahkan masyarakat. Langkah pemerintah untuk menghindari tayangan negatif tersebut adalah membentuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI hadir sebagai pengatur siaran yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

32. **Jawaban: e**

SKSD Palapa dibangun dengan tujuan memperkuat sistem informasi baru di Indonesia. Sistem informasi tersebut sangat berguna bagi media seperti radio dan televisi. Oleh karena itu, informasi dari luar negeri dapat masuk ke Indonesia.

33. **Jawaban: d**

Jalur kereta api di Jawa dibangun untuk keperluan mengangkut hasil pertanian dari perdesaan ke perkotaan dan pelabuhan. Pada masa Hindia Belanda, pusat pemerintahan berdekatan dengan pelabuhan. Semarang dianggap sebagai daerah penghasil pertanian yang produktif. Oleh karena itu, jalur Semarang–*Vorstenlanden* dipilih untuk menghubungkan hasil pertanian tersebut.

34. **Jawaban: c**

Dalam rangka meningkatkan hasil produksi pertanian, pemerintah menerapkan Program Revolusi Hijau. Pelaksanaan Revolusi Hijau dilakukan melalui berbagai cara, seperti diversifikasi pertanian, intensifikasi pertanian (pancausaha tani dan saptausaha tani), ekstensifikasi pertanian, mekanisasi pertanian, dan rehabilitasi pertanian. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan pilihan c.

35. **Jawaban: d**

Keterangan pada soal merupakan bentuk penerapan metode diversifikasi pertanian. Diversifikasi pertanian merupakan usaha penganeekaragaman jenis usaha atau tanaman pertanian guna menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian.

36. **Jawaban: a**

Intensifikasi pertanian merupakan metode pengolahan lahan pertanian yang ada dengan sebaik-baiknya. Metode intensifikasi pertanian banyak diterapkan di daerah yang memiliki lahan pertanian sempit, seperti Pulau Jawa dan Bali.

37. **Jawaban: a**

Ekstensifikasi pertanian merupakan upaya peningkatan hasil pertanian dengan memperluas lahan pertanian. Ekstensifikasi pertanian dapat dilakukan dengan membuka hutan, semak belukar, dan daerah pertanian yang belum dimanfaatkan secara optimal.

38. **Jawaban: e**

Sektor pertanian di Indonesia selalu ditetapkan sebagai sektor strategis dalam setiap pemerintahan dan pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan sektor pertanian memiliki peran strategis terhadap perekonomian nasional, salah satunya memiliki kontribusi secara langsung terhadap pendapatan nasional.

39. **Jawaban: b**

Perkembangan iptek memiliki dampak positif terhadap perkembangan sektor perindustrian. Dengan diciptakannya mesin-mesin, banyak industri rumah tangga yang beralih menggunakan teknologi modern dalam mengembangkan usahanya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi industrialisasi dalam suatu usaha.

40. **Jawaban: b**

Adanya teknologi modern pengganti tenaga kerja manusia mendorong berbagai perusahaan industri lebih memilih menggunakan teknologi mesin karena dinilai lebih efektif dan efisien. Akibatnya, jumlah pengangguran semakin meningkat karena tidak mempunyai kualifikasi sesuai kebutuhan. Tenaga kerja manusia hanya bertugas sebagai operator mesin dan mengawasi saja.

B. Uraian

1. **Jawaban:**

Pelaksanaan agenda reformasi dalam bidang politik dilakukan dengan memberikan batasan pada kekuasaan presiden, serta pelaksanaan pemilu yang demokratis. Sementara itu, agenda reformasi dalam bidang ekonomi dilakukan dengan menstabilkan perekonomian nasional, menghapuskan segala bentuk monopoli, serta menyelesaikan utang negara.

2. **Jawaban:**

Penyelenggaraan pemilu 1999 merupakan upaya Presiden B.J. Habibie mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis. Pemilu 1999 yang merupakan pemilu pertama pada periode reformasi diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memilih parlemen dan anggota MPR. Pada pemilu ini terdapat 48 parpol yang lolos untuk memilih anggota legislatif.

3. **Jawaban:**

Pada 2018 PT Pertamina memiliki kendali penuh atas pertambangan minyak di Blok Mahakam setelah sekira 30 tahun blok minyak ini dikendalikan perusahaan asing. Selain itu, pada 2019 pemerintah Indonesia melalui PT Inalum berhasil menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia setelah 51 tahun Freeport McMoran menguasai 90,4% saham. Kepemilikan mayoritas saham tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

4. **Jawaban:**

Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 berisi Garis-Garis Besar Haluan Negara yang dijalankan pada 1999–2004. Tujuan dikeluarkan ketetapan tersebut adalah menekankan perubahan di segala bidang. Perubahan tersebut untuk memberantas segala macam penyelewengan yang terjadi pada pemerintahan sebelumnya, misalnya, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

5. **Jawaban :**

Pemerintah Indonesia berusaha memulihkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Salah satunya adalah upaya penyelesaian konflik terhadap Gerakan Aceh Merdeka (GAM). GAM merupakan organisasi separatis yang menginginkan Aceh lepas dari NKRI. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan perundingan dengan GAM dengan bantuan Finlandia sebagai mediatornya.

6. **Jawaban :**

Konflik yang terjadi antara Kamboja dan Vietnam memicu keprihatinan banyak negara, termasuk Indonesia. Untuk membantu penyelesaian konflik tersebut, Indonesia mengadakan pertemuan *Jakarta Informal Meeting* (JIM). Tujuan pelaksanaan pertemuan tersebut adalah melakukan mediasi atas permasalahan yang terjadi antara Vietnam dan Kamboja.

7. **Jawaban:**

Pada masa reformasi terjadi perubahan landasan operasional politik luar negeri Indonesia. Secara substantif, landasan operasional politik luar negeri Indonesia dapat dilihat melalui Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999. Keluarnya ketetapan tersebut dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi dan krisis nasional pada 1997 yang dapat mengancam integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, ketetapan tersebut menekankan perlunya upaya reformasi.

8. **Jawaban:**

Pada masa kolonial radio di Indonesia berstatus swasta. Radio masa kolonial misalnya NIROM di Jakarta. NIROM merupakan radio yang terbesar dan terlengkap. Pada masa pendudukan Jepang, radio digunakan untuk alat propaganda politik Jepang. Selanjutnya, pada masa

kemerdekaan, radio Indonesia yang pertama adalah RRI. RRI lahir saat Indonesia memanfaatkan situasi pasca-Jepang menyerah kepada Sekutu. Berita kemerdekaan Indonesia disiarkan lewat RRI dan radio-radio amatir.

9. **Jawaban:**

Pelaksanaan Revolusi Hijau membawa pengaruh signifikan pada sektor pertanian di Indonesia. Dengan pelaksanaan Revolusi Hijau, Indonesia mampu mencapai swasembada beras pada 1984. Selain swasembada beras, petani diperkenalkan tanaman monokultur dan tanaman yang tahan terhadap hama penyakit.

10. **Jawaban:**

Teknologi dapat memicu terjadinya permasalahan sosial dalam masyarakat. Akibat perkembangannya yang semakin pesat berbagai penyalahgunaan teknologi semakin sering ditemukan, seperti pornografi, penipuan hingga pencurian data. Pesatnya teknologi komunikasi membuat bentuk komunikasi *face to face* menjadi semakin surut. Selain itu, teknologi dapat meningkatkan pengangguran karena banyak tenaga kerja tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan atau karena penggunaan teknologi industri yang mampu menggantikan tenaga manusia.

Latihan Ujian Sekolah Berstandar Nasional

A. Pilihan Ganda

1. **Jawaban: b**

Manusia dan sejarah memiliki hubungan erat. Tanpa manusia, sejarah akan menjadi hampa karena sejarah menceritakan kisah kehidupan pada masa lalu. Dengan demikian, peristiwa yang tidak memiliki hubungan dengan manusia tidak termasuk bagian dari sejarah.

2. **Jawaban: c**

Berdasarkan pemaparan para ahli dalam Seminar Sejarah Nasional I tahun 1957, periodisasi sejarah Indonesia disusun menurut dasar berikut.

- 1) Segi kebudayaan (*culture*).
- 2) Perkembangan peradaban (*civilization*).
- 3) Agama yang masuk di Indonesia.

Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh angka 2), 3), dan 4).

3. **Jawaban: b**

Kesinambungan dapat diartikan sebagai proses yang berlanjut dari masa lalu hingga masa kini. Kesinambungan dapat terjadi apabila masyarakat tetap mengadopsi lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan lama dalam kehidupan masa kini. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh pilihan **b**.

4. **Jawaban: d**

Peristiwa sejarah merupakan peristiwa yang unik. Artinya, tidak ada peristiwa lain yang sama dengan peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Peristiwa sejarah bersifat unik karena hanya terjadi satu kali seumur hidup dan tidak pernah terulang secara persis untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, tidak ada peristiwa sejarah yang

berulang. Setiap peristiwa akan berbeda dengan peristiwa sebelumnya. Meskipun demikian, pola peristiwa sejarah dapat berulang.

5. **Jawaban: c**

Konsep diakronik dalam sejarah terkait dengan perkembangan dalam gerak waktu. Pada tema penelitian, konsep diakronik biasanya ditandai dengan penyebutan waktu. Berdasarkan tabel pada soal, tema penelitian yang menyebutkan unsur waktu yaitu kombinasi **X2)**, **X3)**, dan **Y2)**. Jadi, jawaban yang tepat adalah **c**. Adapun **X1)**, **Y1)**, dan **Y3)** merupakan tema penelitian sejarah yang menggunakan konsep sinkronik.

6. **Jawaban: c**

Fosil *Homo sapiens* yang ditemukan di Indonesia dibagi dalam tiga jenis, yaitu *Homo wajakensis*, *Homo soloensis*, dan *Homo floresiensis*. Dari ketiga jenis tersebut, *Homo floresiensis* memiliki perbedaan ciri fisik yang paling mencolok dibandingkan jenis *Homo sapiens* lain. Perbedaan ini terlihat dari ukuran tubuhnya yang mungil atau menyerupai *hobbit*. *Homo floresiensis* diperkirakan memiliki tinggi badan 100 cm dan berat badan sekira 30 kg.

7. **Jawaban: a**

Zaman megalitikum berarti zaman batu besar. Manusia purba yang hidup pada zaman ini memiliki hasil kebudayaan yang terbuat dari batu berukuran besar. Wujud kebudayaan megalitikum berkaitan dengan sarana pemujaan seperti menhir, sarkofagus, dolmen, dan arca batu. Wujud kebudayaan tersebut mencerminkan bahwa manusia pada zaman megalitikum sudah mengenal sistem kepercayaan animisme dan dinamisme.

8. **Jawaban: b**

Gambar pada soal menunjukkan peninggalan masa praaksara berupa bejana perunggu. Bejana perunggu merupakan hasil kebudayaan pada masa perundagian yang digunakan sebagai wadah penyimpan air sekaligus alat upacara. Selain bejana perunggu, hasil kebudayaan pada masa perundagian yaitu kapak corong, moko, nekara, dan arca perunggu. Dengan demikian, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh pilihan **b**.

9. **Jawaban: c**

Kerajaan Kediri mulai dilanda ketidakstabilan pada masa pemerintahan Raja Kertajaya. Ketidakstabilan ini dipicu oleh kebijakan-kebijakan Kertajaya yang cenderung mengurangi hak-hak para brahmana. Kertajaya bahkan meminta para brahmana untuk menyembah dirinya sebagai dewa. Kondisi tersebut menyebabkan banyak kaum brahmana yang meninggalkan pusat Kerajaan Kediri dan mengungsi ke wilayah Tumapel.

10. **Jawaban: b**

Kemunduran Kerajaan Majapahit terjadi setelah masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Kemunduran Kerajaan Majapahit dilatarbelakangi oleh faktor-faktor berikut.

- 1) Tidak adanya tokoh kuat yang mampu mempertahankan kesatuan wilayah sepeninggal Gajah Mada dan Hayam Wuruk.
- 2) Terjadi perang saudara antaranggota kerajaan.
- 3) Banyak daerah bawahan melepaskan diri.
- 4) Masuk dan berkembangnya agama Islam.

Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh angka **1)** dan **3)**.

11. **Jawaban: b**

Pengaruh budaya Hindu–Buddha pada bangunan candi di Indonesia terlihat dari keberadaan hiasan makara. Makara umumnya berbentuk makhluk mitologi Hindu yang berfungsi sebagai penolak bala. Makara memiliki bentuk menyerupai naga dan dianggap sebagai kendaraan Dewa Baruna.

12. **Jawaban: d**

Puncak kejayaan Kerajaan Aceh Darussalam terjadi pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pada masa tersebut Kerajaan Aceh berhasil memegang hegemoni atas kegiatan

perdagangan di Selat Malaka. Keberhasilan ini didukung oleh ketangguhan Angkatan Laut Kerajaan Aceh.

13. **Jawaban: b**

Ternate dan Tidore merupakan dua kerajaan maritim di Maluku yang terlibat persaingan ketat akibat perebutan pasar untuk menjual rempah-rempah. Rempah-rempah merupakan komoditas utama bagi kedua kerajaan tersebut. Sebagai upaya mengendalikan hegemoni perdagangan rempah-rempah, Ternate dan Tidore membentuk persekutuan. Kerajaan Ternate membentuk persekutuan *Uli Lima*, sedangkan Kerajaan Tidore membentuk persekutuan *Uli Siwa*.

14. **Jawaban: d**

Perjanjian Saragosa ditandatangani pada 1529 untuk mengakhiri konflik antara Portugis dan Spanyol di Kepulauan Maluku. Isi Perjanjian Saragosa sebagai berikut.

- 1) Maluku menjadi daerah di bawah pengaruh Portugis.
- 2) Spanyol harus meninggalkan Kepulauan Maluku dan memusatkan kekuasaannya di Filipina.

Jadi, jawaban yang tepat adalah pilihan **d**.

15. **Jawaban: a**

Hak oktroi merupakan hak istimewa yang diberikan Kerajaan Belanda terhadap VOC. Salah satu hak oktroi adalah hak memonopoli perdagangan di daerah jajahan. Untuk melakukan monopoli perdagangan, VOC menerapkan sejumlah kebijakan seperti *hongi tochten*, *ekstirpasi*, *contingenten*, dan *verplichte leverantie*.

16. **Jawaban: e**

Saat menjalankan pemerintahan di Hindia Belanda, Raffles berpedoman pada tiga prinsip berikut.

- 1) Segala bentuk kerja rodi dan penanaman wajib dihapuskan dan menggantinya dengan penanaman bebas oleh rakyat.
- 2) Peran bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan menetapkan para bupati sebagai pegawai pemerintah.
- 3) Tanah merupakan milik negara. Oleh karena itu, rakyat bertindak sebagai penyewa.

17. **Jawaban: c**

Tokoh pada soal merupakan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro merupakan pemimpin Perang Jawa (1825–1830). Peperangan ini berlangsung secara alot dan menyebabkan kerusakan dan kerugian di sebagian besar wilayah Jawa. Dampak paling besar yang dirasakan Belanda adalah terkurasnya kas pemerintah karena digunakan untuk menanggung biaya perang.

18. **Jawaban: c**

Sebelum abad XX perlawanan rakyat Indonesia menitikberatkan pada perlawanan fisik yang bersifat kedaerahan. Pemimpin perlawanan biasanya orang-orang kharismatik di daerah tertentu yang berkedudukan sebagai elite tradisional atau elite agama. Kegagalan perlawanan rakyat pada periode ini disebabkan oleh belum adanya persatuan dan mengandalkan persenjataan tradisional.

19. **Jawaban: e**

Pada 26 Januari 1824 Belanda mengadakan kesepakatan dengan kaum Padri untuk melakukan gencatan senjata. Kaum Padri menyetujui kesepakatan tersebut. Akan tetapi, setelah kesepakatan tersebut Belanda justru mengambil kembali beberapa wilayah yang telah dikuasai oleh kaum Padri. Oleh karena itu, kaum Padri membatalkan perjanjian damai dengan Belanda.

20. **Jawaban: d**

Pada 1912 kedudukan H. Samanhudi sebagai ketua Sarekat Dagang Islam digantikan oleh Haji Oemar Said Cokroaminoto. Ia kemudian mengubah nama organisasi menjadi Sarekat Islam (SI). Perubahan nama dilakukan agar Sarekat Islam tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang lain seperti politik dan sosial.

21. **Jawaban: b**

Pernyataan pada soal merupakan salah satu isi ikrar Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda diikrarkan pada Kongres Pemuda II tanggal 27–28 Oktober 1928 di Jakarta. Kongres ini menghasilkan beberapa keputusan yang menunjukkan adanya nasionalisme yang menjiwai para pemuda. Pernyataan pada soal menunjukkan ungkapan nasionalisme yang dimiliki para pemuda masa itu.

22. **Jawaban: a**

Penerapan politik liberal di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh Revolusi Industri di Inggris. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda berusaha mengembangkan perekonomian dari sektor industri. Salah satu industri yang berkembang di Hindia Belanda adalah industri manufaktur. Perkembangan industri manufaktur memunculkan golongan buruh dan majikan.

23. **Jawaban: e**

Kebutuhan akan pegawai pemerintahan terdorong pemerintah kolonial Belanda mendirikan *Opleidingscholen voor Inlandsche Ambtenaren* (OSVIA). OSVIA merupakan sekolah bagi siswa yang ingin menjadi pejabat pribumi. Para lulusan OSVIA diproyeksikan menjadi pegawai pemerintah kolonial yang bersedia dibayar dengan upah rendah.

24. **Jawaban: b**

Soekarno dan Moh. Hatta merupakan presiden dan wakil presiden yang dipilih melalui sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. Pemilihan presiden pada saat itu dilakukan secara aklamasi. Salah satu penyebabnya adalah pemilihan presiden melalui pemilu pada awal kemerdekaan tidak mungkin dilaksanakan.

25. **Jawaban: a**

Naskah proklamasi kemerdekaan diketik Sayuti Melik setelah ditandatangani oleh Soekarno dan Moh. Hatta. Selanjutnya, Moh. Hatta meminta B.M. Diah menggandakan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Moh. Hatta juga meminta B.M. Diah untuk menyebarkan naskah tersebut. Tindakan tersebut dilakukan agar berita kemerdekaan diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi, jawaban yang tepat adalah pilihan a.

26. **Jawaban: e**

Rakyat Indonesia di berbagai daerah berhasil mengetahui berita kemerdekaan Indonesia melalui kantor berita *Domei*. Setelah dibacakan di kediaman Soekarno, naskah proklamasi segera disampaikan kepada kepala bagian radio kantor berita *Domei*, Waidan B. Panelewen melalui wartawannya, Syahrudin. Selanjutnya, Waidan B. Panelewen segera memerintahkan F. Wuz (markonis) menyiarkan berita proklamasi tersebut. Jadi, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh angka 3), 4), dan 5).

27. **Jawaban: d**

Agresi Militer I Belanda pada 21 Juli 1947 mengalami kegagalan setelah para diplomat Republik Indonesia berhasil menarik simpati publik internasional. Publik internasional melihat Belanda telah mengingkari kesepakatan dalam Perundingan Linggajati. Akhirnya, Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan guna mengakhiri pertikaian antara Indonesia dan Belanda.

28. **Jawaban: a**

Gerakan politik keagamaan yang dikenal dengan nama Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) mendukung berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) di Jawa Barat. Latar belakang munculnya gerakan DI/TII adalah kekecewaan terhadap salah satu isi Perundingan Renville. Salah satu ketentuannya adalah Indonesia harus menarik pasukannya dari daerah kantong gerilya yang berada di dalam garis demarkasi van Mook.

29. **Jawaban: d**

Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) diprakarsai oleh Soumokil dan Manusama yang mendapat dukungan sepenuhnya dari pemerintah Belanda dan pasukan KNIL. Pemberontakan ini bertujuan melepaskan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh pernyataan angka 2) dan 4).

30. **Jawaban: b**

Sri Sultan Hamengku Buwono IX merupakan salah satu raja lokal dari Yogyakarta yang memberi dukungan bagi kemerdekaan Indonesia. Pada September 1945 Sri Sultan Hamengku Buwono IX menyatakan dukungannya tersebut kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Sri Sultan Hamengku Buwono IX juga menyatakan bahwa Kesultanan Yogyakarta merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

31. **Jawaban: b**

Sistem presidensial diberlakukan di Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Tidak sampai satu tahun setelah kemerdekaan, sistem pemerintahan presidensial digantikan oleh sistem parlementer. Pemberlakuan sistem parlementer dalam struktur ketatanegaraan Indonesia ditandai dengan

pembentukan kabinet parlementer pertama yang bertanggung jawab kepada BP-KNIP pada 14 November 1945. Pelaksanaan sistem parlementer pertama pada masa itu masih menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi.

32. **Jawaban: e**

Indikator pada soal merupakan keterangan yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT). Pada 1957 sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Kebijakan ini dilaksanakan pada periode 1957–1961. RPLT mendapat persetujuan dari parlemen pada 11 November 1958. Pembiayaan RPLT diperkirakan mencapai Rp12,5 miliar.

33. **Jawaban: c**

Periode Demokrasi Terpimpin merupakan periode yang diwarnai banyak penyimpangan konstitusi. Presiden Soekarno telah melakukan beberapa penyimpangan terhadap UUD 1945. Bentuk penyimpangan tersebut yaitu membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan membentuk kembali DPR sesuai keinginannya, yaitu DPR-GR.

34. **Jawaban: a**

Sejak kembali menjadi anggota PBB pada 1966, Indonesia berusaha menunjukkan peran aktifnya. Keaktifan tersebut juga ditunjukkan Indonesia dengan membantu PBB menjaga perdamaian dunia. Upaya ini dilakukan Indonesia melalui pengiriman pasukan Garuda untuk bergabung dengan pasukan perdamaian PBB.

35. **Jawaban: c**

Pemerintah Orde Baru menaruh perhatian besar terhadap sektor pendidikan. Kebijakan wajib belajar sembilan tahun pada masa Orde Baru dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan selama enam tahun di sekolah dasar dan tiga tahun di sekolah menengah pertama. Kebijakan wajib belajar sembilan tahun mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan dasar.

36. **Jawaban: e**

Pada masa pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid melakukan reformasi peran Polri dan TNI. Di dalam tubuh TNI, reformasi

tersebut bertujuan agar TNI tetap berfungsi sebagai penjaga pertahanan sehingga tidak terlibat dalam kegiatan politik dan tetap berdiri netral sebagai abdi negara.

37. **Jawaban: b**

Pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Untuk memberantas korupsi, pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi tersebut dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK bertugas mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi secara transparan.

38. **Jawaban: d**

Pada masa Orde Baru pemerintah memiliki rencana untuk mencanangkan konsep alih teknologi tingkat tinggi. Rencana tersebut diimplementasikan dengan membentuk Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang diketuai B.J. Habibie. Di bawah arahan B.J. Habibie BPPT berusaha mengembangkan berbagai ide strategis berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang.

39. **Jawaban: c**

Beberapa masalah yang muncul akibat perkembangan teknologi transportasi yaitu lahan pertanian berkurang karena dialihfungsikan menjadi jalan, peningkatan jumlah kendaraan yang berujung kemacetan, kesenjangan sosial, serta pencemaran lingkungan karena polusi asap kendaraan bermotor.

40. **Jawaban: e**

Penyusunan Deklarasi Djuanda dilakukan sebagai usaha bangsa Indonesia untuk memperjuangkan batas wilayah laut sehingga wilayah Indonesia menjadi suatu kesatuan utuh dilihat dari berbagai aspek politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dalam Deklarasi Djuanda disebutkan batas teritorial Indonesia yang sebelumnya 3 mil diperlebar menjadi 12 mil. Dengan adanya Deklarasi Djuanda wilayah Indonesia semakin bertambah luas.

B. Uraian

41. **Jawaban:**

Manusia hidup dalam ruang yang bernama lingkungan tempat tinggal. Di lingkungan ini manusia hidup dan berkembang. Perkembangan manusia ini juga ditentukan oleh aspek waktu. Oleh karena itu, kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu.

42. **Jawaban:**

Pada masa bercocok tanam dan beternak, manusia memilih tinggal di daerah lembah atau sekitar sungai daripada daerah pegunungan. Pemilihan tempat ini didasarkan pada beberapa faktor, yaitu daerah lembah memiliki struktur tanah lebih subur dan sangat menguntungkan bagi kegiatan bercocok tanam, ketersediaan sumber air yang melimpah untuk kebutuhan hidup, serta akses yang mudah dijangkau.

43. **Jawaban:**

Politik Pintu Terbuka (*Open Door Policy*) di Indonesia berawal dari peresmian Undang-Undang Agraria pada 1870. Disebut Politik Pintu Terbuka karena ditandai dengan adanya kebebasan usaha berupa penanaman modal swasta di bidang perkebunan dan pertambangan. Para pengusaha diperkenankan menyewa lahan kosong milik bumiputra untuk menjalankan usahanya.

44. **Jawaban:**

Indische Partij merupakan organisasi yang terang-terangan menyatakan tujuannya untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Dalam pergerakannya, *Indische Partij* memanfaatkan media pers untuk mengkritik pemerintah kolonial Belanda. Salah satu contoh kritik tersebut adalah tulisan Suwardi Suryaningrat yang berjudul *Als ik eens Nederlander was*. Tulisan tersebut berisi kritikan tajam atas perayaan seratus tahun kemerdekaan Belanda di Indonesia.

45. **Jawaban:**

Penolakan terhadap pelantikan Presiden Soeharto pada 1998 dilatarbelakangi oleh beberapa penyimpangan yang dilakukan pemerintah Orde Baru sebagai berikut.

- a. Demokrasi tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
- b. Praktik nepotisme yang sering terjadi dalam pemerintahan.
- c. Terjadinya ketidakadilan dalam bidang hukum.